



LAPORAN KINERJA INTERIM

TRIWULAN I

BALAI BESAR POM DI BANDUNG

2021



KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena penyusunan Laporan Kinerja Interim Balai Besar POM di Bandung Triwulan I Tahun 2021 dapat diselesaikan. Sebagai instansi pemerintah yang memiliki komitmen untuk membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, BBPOM di Bandung telah melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pada triwulan I tahun 2021 maka disusunlah Laporan Kinerja (LAPKIN) Interim Balai Besar POM di Bandung Triwulan I Tahun 2021 ini.

LAPKIN disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.01.21.04.15.2163 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Addendum Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar/Balai POM serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.



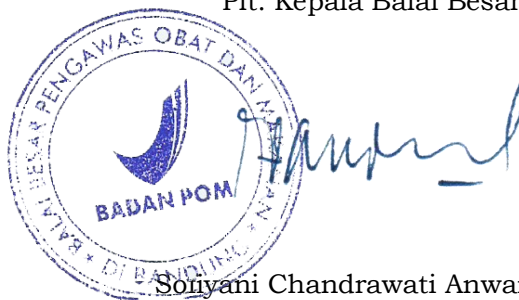
LAPORAN KINERJA INTERIM BALAI BESAR POM DI BANDUNG TRIWULAN I TAHUN 2020

Laporan Kinerja Interim Balai Besar POM di Bandung Triwulan I Tahun 2020 memiliki dua fungsi utama yaitu (1) merupakan sarana bagi Balai Besar POM di Bandung untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, serta (2) sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*), baik dalam bentuk regulasi maupun alokasi sumber daya yang dimiliki oleh Balai Besar POM di Bandung. Berbagai kendala dan hambatan dialami dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2021, namun dengan meningkatkan efektifitas dan efisiensi sumber daya yang ada serta kerjasama yang baik maka target kinerja dapat dicapai.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja Interim Balai Besar POM di Bandung Triwulan I Tahun 2021 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Balai Besar POM di Bandung kepada pemberi mandat dan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung pada masa yang akan datang.

Bandung, 09 April 2021

Plt. Kepala Balai Besar POM di Bandung

The image shows a circular official stamp of the Badan POM (Indonesian Food and Drug Administration) with the text "BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN" and "BADAN POM" in the center. To the right of the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Sonyani Chandrawati Anwar, S.Si, Apt., MSi



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv

Bab 1 Pendahuluan	1.1	LATAR BELAKANG	1
	1.2	GAMBARAN UMUM ORGANISASI	1
	1.3	STRUKTUR ORGANISASI	4
	1.4	ISU STRATEGIS	4
Bab 2 Perencanaan Kinerja	2.1	RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024	16
	2.2	RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021	22
	2.3	PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2021	23
	2.4	RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) TAHUN 2021	25
	2.5	METODE PENGUKURAN	27
Bab 3 Perencanaan Kinerja	3.1	CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	29
	3.2	REALISASI ANGGARAN	99
Bab 4 Perencanaan Kinerja	4.1	KESIMPULAN	109
	4.2	SARAN	110

LAMPIRAN	112
----------------	-----



RINGKASAN EKSEKUTIF

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Balai Besar POM Balai Besar POM di Bandung Triwulan I Tahun 2021 sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Kinerja Balai Besar POM di Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan anggarannya sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya selama triwulan I tahun 2021. Selain sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada publik/pemberi mandat, Laporan Kinerja Interim Balai Besar POM di Bandung Triwulan I Tahun 2021 ini merupakan instrumen untuk mengevaluasi pencapaian Kinerja Balai Besar POM di Bandung selama triwulan I tahun 2021 yang dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan kinerja di tahun berikutnya.

Dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, tujuan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 ditetapkan. Tujuan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, yaitu :

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
- 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu.
- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan
- 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.



LAPORAN KINERJA INTERIM BALAI BESAR POM DI BANDUNG TRIWULAN I TAHUN 2021

Tujuan yang telah ditetapkan menjadi arahan bagi Balai Besar POM di

Bandung dalam merumuskan sasaran kegiatan, kebijakan, program, dan
TERWUJUDNYA OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT DI WILAYAH KERJA BBPOM DI
BANDUNG

MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KEAMANAN DAN MUTU OBAT DAN MAKANAN WILAYAH
KERJA BBPOM DI BANDUNG

MENINGKATNYA KEPUASAN PELAKU USAHA DAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN
MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN OBAT DAN MAKANAN SERTA PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH KERJA BBPOM DI
BANDUNG

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA
BBPOM DI BANDUNG

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PRODUK DAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH
KERJA BBPOM DI BANDUNG

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENINDAKAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI
BANDUNG

TERWUJUDNYA TATAKELOLA PEMERINTAHAN BBPOM DI BANDUNG YANG OPTIMAL

TERWUJUDNYA SDM BBPOM DI BANDUNG YANG BERKINERJA OPTIMAL

MENGUATNYA LABORATORIUM, PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

TERKELOLANYA KEUANGAN BBPOM DI BANDUNG SECARA AKUNTABEL

Pengukuran kinerja yang tercantum dalam dokumen Kinerja Balai Besar POM di Bandung Tahun 2020 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Balai Besar POM di Bandung yang telah ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2020. Perjanjian kinerja tersebut merupakan ikhtisar Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandung Tahun 2020-2024.

Sasaran kegiatan yang telah ditetapkan pada Penetapan Kinerja dan Rencana Aksi Penetapan Kinerja Tahun 2021 sebanyak 11 (sebelas) sasaran kegiatan. Dari sasaran kegiatan tersebut diukur berdasarkan 28 (dua puluh delapan) indikator sasaran kegiatan, namun pada triwulan I tahun 2021 hanya 14 (empat belas) yang dapat diukur, dengan hasil sebagai berikut: 2 (dua) indikator sasaran kegiatan dengan kriteria **Sangat Baik**, 4 (empat) indikator sasaran kegiatan dengan kriteria **Baik**, 5 (lima) indikator sasaran kegiatan dengan kriteria **Cukup**, 2 (dua) indikator sasaran kegiatan dengan kriteria **Cukup**, dan 1 (satu) indikator sasaran kegiatan dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

Pada triwulan I tahun 2021, hasil pengukuran tingkat efisien berdasarkan indikator sasaran kegiatan sebanyak 28 (dua puluh delapan) indikator secara



**LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2021**

kumulatif masuk kedalam kategori Tidak Efisien (75%). Namun, berdasarkan data pada tabel di atas maka dapat diketahui sebanyak 10 (Sepuluh) indikator yang belum dapat diukur tingkat efisiensinya dan 18 (delapan belas) indikator yang masuk kedalam kategori Tidak Efisien (75%). BBPOM di Bandung melaksanakan 19 (sembilan belas) Rincian Output (RO), namun hanya 12 (dua belas) RO yang dapat diukur tingkat efisiensinya. Dari data perhitungan tingkat efisiensi, nilai TE tertinggi KIE Obat dan Makanan Aman oleh BB/BPOM adalah (TE=8,35) dan Sampel Pangan Fortifikasi yang diperiksa oleh BB/BPPOM (TE=2,15). Sedangkan nilai TE terendah adalah Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang diselesaikan oleh BB/BPOM (TE=-0,28). Berdasarkan perhitungan Nilai TE keseluruhan, dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan BBPOM di Bandung terlaksana secara efisien (TE=0.27) .

Pada tahun 2021, pagu anggaran Balai Besar POM di Bandung sebesar Rp. 57,089,510,000,- yang terdiri dari 2 program yaitu: (1) Program Pengawasan Obat dan Makanan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 31.191.604.000,-; dan (2) Program Dukungan Manajemen dengan pagu anggaran sebesar Rp. 25.897.906.000,-. Realisasi anggaran pada triwulan I tahun 2021, berdasarkan Omspan sebesar Rp. 5.924.311.156,- (10,38%),

Hasil evaluasi kinerja ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi Balai Besar POM di Bandung untuk dapat memperlihatkan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Bandung, 09 April 2021

Plt. Kepala Balai Besar POM di Bandung



[Signature]
Sofiyani Chandrawati Anwar, S.Si, Apt., MSi





BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

1.4 ISU STRATEGIS

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Interim Balai Besar POM di Bandung Triwulan I Tahun 2021 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama triwulan I Tahun 2021 dan tahun kedua dari Renstra Balai Besar POM di Bandung Tahun 2020-2024 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi organisasi. Laporan Kinerja Interim ini juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja seluruh unit organisasi dan untuk mendapatkan masukan dari stakeholders untuk perbaikan kinerja Balai Besar POM di Bandung.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Pengawasan Obat dan Makanan memiliki fungsi strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk mendukung daya saing nasional. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan maka diperlukan adanya penguatan kelembagaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Badan POM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Untuk melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi dalam rangka mewujudkan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan yang proporsional, efektif, dan efisien



guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/892/M.KT.01/2020 tanggal 16 Juli 2020 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sebagai tindak lanjut, maka diterbitkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Klasifikasi UPT BPOM terdiri atas: a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM sebanyak 21 (dua puluh satu); b. Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM sebanyak 12 (dua belas); dan c. Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM sebanyak 40 (empat puluh).

KEDUDUKAN

UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. UPT BPOM dipimpin oleh Kepala.

TUGAS

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020, Balai Besar POM di Bandung mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:



- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

**TABEL 1.1
WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG**

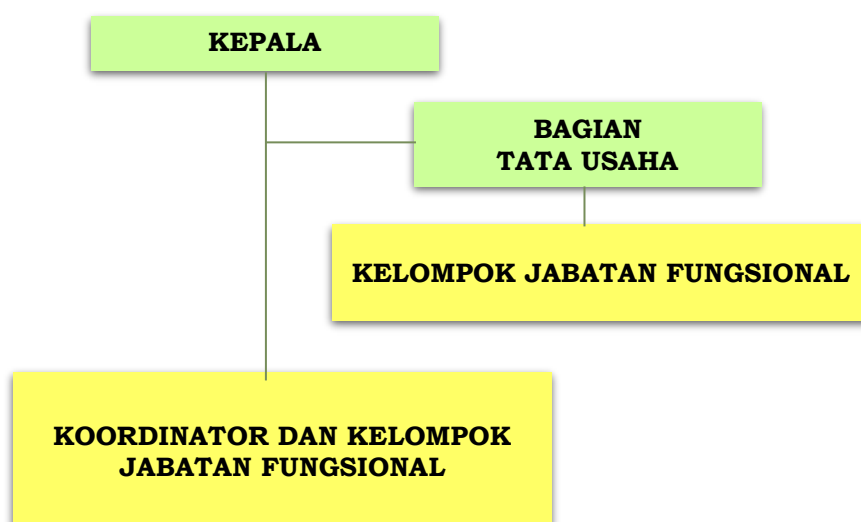
UPT	Kedudukan	Wilayah Kerja
BBPOM di Bandung	Alamat Jl. Pasteur No. 25 Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung	1. Kota Bandung 2. Kabupaten Subang 3. Kabupaten Cianjur 4. Kabupaten Garut 5. Kabupaten Bandung Barat 6. Kabupaten Majalengka 7. Kabupaten Sumedang 8. Kabupaten Bandung 9. Kabupaten Karawang 10. Kota Bekasi 11. Kabupaten Bekasi 12. Kabupaten Sukabumi 13. Kota Cimahi 14. Kota Sukabumi 15. Kabupaten Purwakarta 16. Kabupaten Cirebon

UPT	Kedudukan	Wilayah Kerja
		17. Kota Cirebon, 18. Kabupaten Indramayu 19. Kabupaten Kuningan

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar POM di Bandung disusun berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang diundangkan pada tanggal 7 September 2020.

**GAMBAR 1.1
STRUKTUR ORGANISASI BBPOM DI BANDUNG**



1.4 ISU STRATEGIS

Seiring dengan perkembangan yang terjadi di Indonesia pada tahun kerja 2021 maka muncul beberapa isu strategis yang mempengaruhi kinerja, antara lain:

ISU INTERNAL

Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Pada Tahun 2017, BPOM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Namun demikian, BPOM masih memerlukan adanya



peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir pengawasan Obat dan Makanan secara holistik. Di sisi lain, Pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan/fragmentasi kebijakan.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) tersebut, terjadi perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BPOM dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan Perpres tersebut di atas, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Balai Besar POM di Bandung dalam menjalankan fungsi penindakan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan diberi kewenangan intelijen dan penyidikan di bidang Obat dan Makanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Sumberdaya Manusia

Balai Besar POM di Bandung memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuandan keahlian sesuai dengan kebutuhan pengawasan Obat dan Makanan. Peningkatan kompetensi terus menerus dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pelatihan-pelatihan teknis. Namun demikian, jumlah kebutuhan SDM belum tercukupi sesuai dengan analisis beban kerja (ABK).

Sarana Prasarana

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Sarana prasarana terdiri dari 1). sarana dan prasarana kerja; 2). Alat Laboratorium. Sarana dan prasarana kerja terdiri dari Ruang kerja, Ruang penunjang dalam gedung, Ruang/ fasilitas penunjang luar gedung, perlengkapan kantor, rumah dinas dan kendaraan operasional.

Luas lahan Balai Besar POM di Bandung seluas 4.268 m² dengan luas lantai bangunan sebesar 5.686 m². Bangunan yang ada selain memiliki fungsi sebagai area perkantoran, juga termasuk fungsi pelayanan publik dan laboratorium. Pemenuhan terhadap kebutuhan sarana prasarana adalah 78,1% yang terdiri dari pemenuhan alat laboratorium 61,7% dan pemenuhan sarana prasarana kerja 94,6%, sehingga masih diperlukan tambahan untuk penambahan alat laboratorium.

Peralatan Laboratorium

Pengujian laboratorium merupakan tulang punggung pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Bandung. Laboratorium Balai Besar POM di Bandung telah mendapat sertifikat akreditasi sebagai laboratorium penguji dari Komite Akreditasi Nasional dengan nomor sertifikat LP-173-IDN. Ilmu dan teknologi terus berkembang, begitu pula dengan proses pengujian. Untuk itu, laboratorium harus terus ditingkatkan kapasitasnya agar pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan secara optimal. Untuk melakukan pengujian, laboratorium telah dilengkapi dengan peralatan yang memadai agar dapat menghasilkan hasil uji yang valid dan dapat



dipercaya. Namun, dibandingkan terhadap Standar Minimum Laboratorium Balai Besar POM di Bandung, masih terdapat gap sehingga pengadaan peralatan laboratorium terus dilakukan. Pada tahun 2019, pemenuhan Standar Minimum Alat Laboratorium adalah sebesar 62,4%.

ISU EKSTERNAL

Secara garis besar, isu bersifat eksternal yang dihadapi oleh Balai Besar POM di Bandung adalah sebagai berikut :

Sistem Kesehatan Nasional (SKN)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012, SKN adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Salah satu subsistem SKN adalah sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, yang meliputi berbagai kegiatan untuk menjamin: (i) aspek keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan yang beredar; (ii) ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial; (iii) perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat, penggunaan obat yang rasional; serta (iv) upaya kemandirian di bidang kefarmasian melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri.

Sebagaimana tertuang dalam PP no.72 Tahun 2012 tersebut, maka Balai Besar POM di Bandung sebagai salah satu penyelenggara subsistem sediaan farmasi, dan makanan, dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pengawasan baik *pre-market* maupun *post-market* Obat dan Makanan sehingga dapat menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu yang beredar memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Pengawasan tersebut dilaksanakan melalui berbagai upaya secara komprehensif oleh Balai Besar POM di Bandung, yaitu melalui :

- a) Upaya terkait jaminan aspek keamanan, khasiat/kemanfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar mulai dari pengawasan, pelaksanaan regulasi, pembinaan, penegakan hukum dan perlindungan masyarakat, serta;
- b) Upaya terkait kemandirian pelaku usaha Obat dan Makanan.

Fokus sistem kesehatan nasional tahun 2021 dengan berkaca pada terjadinya Pandemi covid-19 menurut Bappenas akan menjadi salah satu *major project* dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021. Adapun fokus penguatan Sistem Kesehatan Nasional di 2021 antara lain penguatan gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS), penguatan ketahanan kesehatan dan penguatan sumber daya melalui pemenuhan fasilitas dan



alat kesehatan. Balai Besar POM di Bandung sebagai UPT dari Badan POM memegang peranan penting di ketiga fokus penguatan ini, diantaranya dalam memberikan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) untuk mengkampanyekan GERMAS pada masyarakat, memperkuat sistem pengawasan dengan penguatan kapasitas dan jejaring laboratorium serta pengawalan dalam pemenuhan vaksin dan obat, termasuk vaksin covid-19

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

JKN merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal layak menuju terwujudnya kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Program JKN diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam JKN juga diberlakukan penjaminan mutu obat yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Implementasi JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran produk obat, baik dari dalam maupun luar negeri karena industri obat akan berusaha menjadi supplier obat untuk program pemerintah tersebut. Selain peningkatan jumlah obat yang akan diregistrasi, jenis obat pun akan sangat bervariasi. Hal ini, disebabkan adanya peningkatan demand terhadap obat sebagai salah satu produk yang dibutuhkan. Sementara dampak tidak langsung dari penerapan JKN adalah terjadinya peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya.

Tingginya permintaan obat akan mendorong banyak industri farmasi melakukan pengembangan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi dengan perluasan sarana yang dimiliki. Dengan adanya peningkatan kapasitas dan fasilitas tersebut, diasumsikan akan terjadi peningkatan permohonan sertifikasi CPOB. Dalam hal ini tuntutan terhadap peran Balai Besar POM di Bandung akan semakin besar, antara lain adalah peningkatan pengawasan pre-market melalui sertifikasi CPOB dan post-market melalui intensifikasi pengawasan obat pasca beredar. Seiring dengan penerapan JKN, akan banyak industri farmasi yang harus melakukan resertifikasi CPOB yang berlaku 5 (lima) tahun. Dari sisi penyediaan (supply side) JKN, kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian BPOM harus terus diperkuat. Begitu pula dengan pengembangan dan pemeliharaan kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan (penguji dan inspektur), serta kuantitas SDM yang harus terus ditingkatkan sesuai dengan naiknya beban kerja.

Implementasi JKN dalam menghadapi Pandemi covid-19 pada tahun 2020 juga memberikan dampak langsung maupun tidak langsung pada pengawasan Obat dan Makanan. Meningkatnya kapasitas produksi industri farmasi maupun obat tradisional yang menghasilkan Vitamin, Suplemen Kesehatan, Obat Tradisional, juga industri



kosmetik yang menggunakan fasilitas produksinya bersamaan dengan produksi hand sanitizer menyebabkan dampak langsung pada Badan POM termasuk Balai Besar POM di Bandung sebagai UPT dari Badan POM. Sementara dampak tidak langsungnya ke masyarakat membuat Balai Besar POM di Bandung harus lebih giat dalam memberikan KIE mengenai cara konsumsi vitamin, obat tradisional, dan suplemen kesehatan yang benar; karena pastinya konsumsi produk ini akibat pandemi meningkat cukup signifikan.

Globalisasi, Perdagangan Bebas dan Komitmen Internasional

Era globalisasi dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan kesehatan, khususnya dalam rangka mengurangi dampak yang merugikan. Dampak dari pengaruh lingkungan eksternal khususnya globalisasi tersebut telah mengakibatkan Indonesia masuk dalam perjanjian-perjanjian internasional yang memungkinkan terbentuknya suatu kawasan bebas perdagangan. Hal ini membuka peluang produk Obat dan Makanan Indonesia akan lebih mudah memasuki pasaran domestik negara-negara yang tergabung dalam perjanjian pasar regional. Oleh karena itu diharapkan industri farmasi, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan dalam negeri mampu meningkatkan daya saing terhadap produk luar negeri. Hal tersebut juga berdampak pada pertumbuhan sektor industri Obat dan Makanan di Propinsi Jawa Barat. Berdasarkan data yang ada, pada tahun 2019 terdapat 88 industri farmasi, 54 industri Obat Tradisional, 24.291 industri PKRT, 187 industri kosmetik, 1802 industri suplemen makanan, 104 Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), 141 industri alat kesehatan dan 926 Industri Pangan. Hal tersebut merupakan potensi bagi Balai Besar POM di Bandung dalam pemantapan stakeholder untuk memberikan bimbingan dan pembinaan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha.

Pertumbuhan sektor industri di bidang Obat dan Makanan di Propinsi Jawa Barat terus mengalami peningkatan . Hal ini menjadi peluang bagi Balai Besar POM di Bandung untuk ikut serta dalam meningkatkan daya saing industri tersebut dalam menghadapi pasar global. Namun disisi lain, timbul permasalahan era perdagangan bebas yaitu masuknya produk Obat dan Makanan dari luar negeri yang belum tentu terjamin keamanan dan mutunya untuk dikonsumsi. Untuk itu, masyarakat membutuhkan proteksi yang kuat dan rasa aman dalam mengkonsumsi Obat dan Makanan tersebut.

Apabila dibandingkan pertumbuhan sektor industri di bidang Obat dan Makanan dengan SDM yang dimiliki oleh Balai Besar POM di Bandung, sampai dengan tahun 2014 presentase pemenuhan SDM sesuai beban kerja hanya 76,97%. Sedangkan pemenuhan SDM sesuai beban kerja tahun 2015 berdasarkan Renstra tahun 2015-2019 hanya sebesar 44,48 %. Jumlah SDM yang tidak sebanding ini menjadi tantangan yang sangat besar dalam pengawasan Obat dan Makanan.



Pandemi covid-19 yang kemudian mendatangkan vaksin dari Tiongkok juga merupakan bukti bahwa Badan POM terlibat dalam komitmen internasional, yang akhirnya menantang UPT-nya termasuk Balai Besar POM di Bandung untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM-nya terutama dalam hal pengawalan distribusi vaksin dan pengujian sampel swab antigen dan RT-PCR.

Berdasarkan hal ini, Balai Besar POM di Bandung harus menyusun strategi agar kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Barat dapat terlaksana secara optimal, dan juga menerapkan sistem manajemen kinerja secara optimal sehingga lebih efektif dan efisien. Namun demikian, Balai Besar POM di Bandung memiliki kelebihan yang dapat dipergunakan, yaitu adanya pedoman pengawasan yang jelas sebagai acuan dan standar baku dalam pengawasan atas Obat dan Makanan. Selain itu, Balai Besar POM di Bandung telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015 dan SNI ISO/IEC 17025: 2017.

Perubahan Iklim

Ancaman perubahan iklim dunia, akan semakin dirasakan oleh sektor pertanian khususnya produk bahan pangan di Indonesia. Perubahan iklim dapat mengakibatkan berkurangnya ketersediaan pangan yang berkualitas, sehat, bermanfaat, dengan harga yang kompetitif. Dari sisi ekonomi makro, industri makanan dan minuman di masa yang akan datang perannya akan semakin penting sebagai pemasok pangan dunia. Selain dari sisi pangan, perubahan iklim juga dapat mengakibatkan munculnya bibit penyakit baru hasil mutasi gen dari beragam virus. Bibit penyakit baru tersebut diantaranya virus influenza yang variannya sekarang menjadi cukup banyak dan mudah tersebar dari satu negara ke negara lain.

Menurut Kementerian Kesehatan yang bekerja sama dengan Research Center for Climate Change University of Indonesia (RCCC-UI) tahun 2013, dalam pelaksanaan kajian dan pemetaan model kerentanan penyakit infeksi akibat perubahan iklim, terdapat tiga penyakit yang perlu mendapat perhatian khusus terkait perubahan iklim dan perkembangan vektor yaitu Malaria, Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Diare. Selain dari ketiga jenis penyakit tersebut, masih ada lagi penyakit yang banyak ditemukan akibat adanya perubahan iklim seperti, Infeksi Saluran Pernapasan (ISPA) dan penyakit batu ginjal.

Di dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018 - 2023, salah satu misinya memiliki tujuan meningkatnya kebahagiaan dan kesejahteraan Masyarakat, dengan sasaran meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan.

Hal ini merupakan tindak lanjut pemerintah daerah dalam mencapai target yang ditetapkan dalam SDGs (*Sustainable Development Goals*) di sektor kesehatan yaitu diantaranya mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria dan penyakit tropis yang terabaikan, serta memerangi hepatitis, penyakit bersumber air dan penyakit menular



lainnya. Untuk mencapai target tersebut pasti akan diimbangi dengan peningkatan jenis dan jumlah obat terkait penyakit-penyakit tersebut, dan ini semakin nyata dengan terjadinya Pandemi covid-19 sejak 2020 yang lalu.

Dengan adanya potensi permasalahan serta peluang dari proses perubahan iklim, diperlukan peran dari Balai Besar POM di Bandung dalam mengawasi peredaran varian obat baru dari jenis penyakit tersebut. Selain dari obat kimia, varian obat baru ini juga diikuti pula dengan varian obat herbal tradisional Indonesia dan Cina yang paling banyak beredar di pasar. Kondisi ini menuntut kerja keras dari Balai Besar POM di Bandung dalam melakukan pengawasan terhadap perkembangan produksi dan peredaran obat tersebut.

Perubahan Demografi, Ekonomi dan Sosial Masyarakat

Kemajuan dari ekonomi suatu provinsi dapat dilihat dari indikator makro-ekonomi, yakni pendapatan per kapita. Pada tahun 2018 PDRB per kapita atas harga berlaku Provinsi Jawa Barat sebesar 40,30 juta rupiah mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 sebesar 37,18 juta atau naik sebesar 8,41 persen. Persentase jumlah penduduk miskin Jawa Barat juga mengalami penurunan dari tahun 2017 (7,86%) menjadi tahun 2018 (7,27%).

Hal ini menunjukkan adanya peningkatan daya beli masyarakat yang secara teori dan fakta, bahwa semakin tinggi pendapatan maka semakin besar pula konsumsi masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang memiliki standar dan kualitas. Faktor tersebut dapat menyebabkan kecenderungan perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat. Peningkatan konsumsi jumlah dan jenis produk Obat dan Makanan tanpa diimbangi dengan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kesehatan dapat menimbulkan penurunan derajat kesehatan.

Pada tahun 2020, penduduk Jawa Barat berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2020 yaitu sebanyak 48,27 juta jiwa, menjadikan Jawa Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia dalam hal jumlah penduduk terbesar. Terdiri atas laki-laki sebanyak 24,51 juta jiwa dan perempuan sebanyak 23,76 juta jiwa (Sumber: Badan Pusat Statistik - Jawa Barat dalam Angka 2020), menjadi tantangan bagi BBPOM di Bandung dalam perannya memberikan informasi dan edukasi publik mengenai produk Obat dan Makanan yang aman.

Pertumbuhan jumlah penduduk dan bergesernya pola hidup masyarakat umum menjadi tantangan Balai Besar POM di Bandung untuk meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan yang semakin banyak jenis dan jumlahnya. Hal tersebut juga harus disertai dengan peningkatan kualitas dan kuantitas edukasi terhadap masyarakat di Provinsi Jawa Barat mengenai produk Obat dan Makanan yang aman.



Tuntutan masyarakat

Tuntutan masyarakat terhadap pangan yang semula hanya pada aspek harga, rasa dan tren gaya hidup, pada saat ini telah bergeser lebih kepada keamanan dan mutu pangan. Hal tersebut disebabkan karena meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat dan semakin banyaknya lembaga perlindungan konsumen serta media informasi baik offline maupun online yang memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat dalam memilih produk serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh konsumen.

Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintahan yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Sistem Desentralisasi ini dapat menimbulkan beberapa permasalahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan diantaranya kurangnya dukungan dan kerjasama dari pemangku kepentingan di daerah sehingga tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan belum optimal.

Untuk itu, agar tugas pokok dan fungsi Balai Besar POM di Bandung berjalan dengan baik, diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan dan kerjasama yang baik dari para pelaku untuk menghasilkan tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang baik. Pembangunan kesehatan harus diselenggarakan dengan menggalang kemitraan yang dinamis dan harmonis antara pemerintahan pusat dan daerah, antara pemerintah dan masyarakat, termasuk dengan pihak swasta.

Disisi lain, pengakuan stakeholder akan keberadaan Balai Besar POM di Bandung semakin meningkat. Hal tersebut disebabkan karena Balai Besar POM di Bandung tidak hanya telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal tetapi juga berperan aktif didalam berbagai forum instansi lainnya dalam upaya pengawasan Obat dan Makanan. Beberapa diantaranya adalah Badan POM termasuk Balai Besar POM di Bandung sebagai Kelompok Kerja Keamanan Pangan Nasional di dalam Sistem Keamanan Pangan Terpadu (SKPT), Program Pembinaan Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah, Program Pasar Aman dsari Bahan Berbahaya, Program Gerakan Keamanan Pangan Desa, dan sebagai narasumber dalam upaya pengawasan Obat dan Makanan melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Balai Besar POM di Bandung juga melayani pengujian produk Obat dan Makanan dari pihak ketiga. Secara umum, pengujian dari pihak ketiga berasal dari instansi pemerintah dan masyarakat umum, antara lain kepolisian dan pelaku usaha. Hal tersebut menjadi peluang, khususnya bagi Laboratorium Balai Besar POM di Bandung dalam menjalin kerjasama dengan stakeholder sekaligus mendukung peningkatan daya saing pelaku usaha.





Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan teknologi, baik teknologi produksi, distribusi dan pengembangan jenis produk, akan membawa dampak perubahan secara terus-menerus pada produk Obat dan Makanan. Hal ini harus menjadi perhatian dan antisipasi Balai Besar POM di Bandung untuk terus berinovasi dalam menghadapi perkembangan dan tuntutan yang ada. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi juga dapat menjadi potensi bagi Balai Besar di Bandung untuk dapat melakukan pelayanan online, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat. Namun, teknologi informasi juga dapat menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Bandung terkait tren pemasaran dan transaksi produk Obat dan Makanan yang dilakukan secara online, yang juga perlu mendapatkan pengawasan dengan berbasis pada teknologi.

Sarana dan prasarana merupakan unsur penting dalam mendukung keberhasilan kegiatan dan untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Sarana dan prasarana tersebut dapat berupa sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan manajemen dan juga kegiatan teknis laboratorium. Laboratorium merupakan tulang punggung dari pengawasan Obat dan Makanan, oleh karenanya diperlukan sarana dan prasarana laboratorium yang lengkap mulai dari metode analisa, baku pembanding, reagensia sampai kepada peralatan yang memadai. Peralatan yang dimiliki masih belum memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan. Adalah fakta bahwa kemampuan dan kapasitas uji laboratorium Badan POM, termasuk Balai Besar POM di Bandung, belum memadai jika dibandingkan dengan beban kerja pengawasan Obat dan Makanan. Dengan perkembangan teknologi saat ini, tentu juga terkait erat dengan perkembangan teknologi di bidang pengujian, sehingga menjadi suatu tantangan tersendiri untuk laboratorium Balai Besar POM di Bandung. Laboratorium dituntut untuk terus mengikuti perkembangan teknologi yang ada terkait dengan produk dan metode analisis.

Implementasi Program Fortifikasi Pangan

Salah satu upaya di dalam mendukung Arah Kebijakan Nasional Perbaikan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat dilakukan melalui peningkatan peran industri dan pemerintah daerah dalam ketersediaan pangan beragam, aman, dan bergizi diantaranya dengan dukungan fortifikasi mikronutrien penting. Fortifikasi pangan merupakan salah satu cara dalam menangani permasalahan tingginya angka kekurangan gizi mikro. Sebagai langkah awal pemerintah menetapkan fortifikasi pada garam konsumsi, tepung terigu dan minyak goreng sawit, mengingat juga masih tingginya masalah gangguan kesehatan karena kurang yodium (GAKI). Penerapan fortifikasi harus diiringi dengan pengawasan oleh Balai Besar POM di Bandung. Hasil pengawasan garam beryodium dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2015– 2019)



menunjukkan tren penurunan terhadap hasil uji yang tidak memenuhi syarat (TMS) yaitu pada tahun 2015 jumlah sampel garam yang TMS sebesar 85% dan hingga tahun 2017 menjadi 81,62%, kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan signifikan menjadi 54,82%. Sedangkan hasil pengawasan tepung terigu dan minyak goreng sawit dalam kurun waktu empat tahun terakhir (2015- 2019) menunjukkan relatif semua sampel yang diuji memenuhi syarat (MS).

Kegiatan intensifikasi pengawasan produk fortifikasi Nasional (garam konsumsi, tepung terigu dan minyak goreng sawit) merupakan upaya pengawasan produk pangan baik dalam rangka pemenuhan persyaratan (compliance) maupun surveilan keamanan pangan. Upaya tersebut dilakukan melalui verifikasi terhadap pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), baik penerapan CPPOB pada produsen pangan dan penerapan Cara Ritel Pangan yang Baik di sarana peredaran. Selain itu juga dilakukan pengawasan terhadap produk pangan baik di sarana produksi maupun di sarana distribusi serta penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran di bidang pangan. Kegiatan lainnya yaitu pengujian laboratorium terhadap parameter keamanan dan mutu pangan dan gizi pangan, pengawasan terhadap kesesuaian label serta pengawasan terhadap keamanan kemasan pangan yang beredar melalui sampling dan pengujian.

Jejaring Kerja

Balai Besar POM di Bandung menyadari dalam pengawasan Obat dan Makanan tidak dapat menjadi single player. Untuk itu Balai Besar POM di Bandung mengembangkan kerjasama dengan lembaga-lembaga, baik di pusat, daerah, maupun internasional. Sebagai salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan BPOM, maka Balai Besar POM di Bandung sebagai bagian dari beberapa jejaring kerja yang sudah dimiliki BPOM yaitu Jejaring Keamanan Pangan Nasional/Daerah, *Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed* (INRASFF), Jaringan Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (JLPPI), Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal (Pusat dan Daerah), *Indonesia Criminal Justice System* (ICJS), dan Gerakan Nasional Waspada Obat dan Makanan Ilegal (GNWOMI). Di tingkat regional maupun internasional, BPOM memiliki jejaring kerja dengan *ASEAN Rapid Alert System for Food and Feed* (ARASFF), *World Health Organization* (WHO), *Codex Alimentarius Commission*, Forum Kerjasama Asia Pasifik dalam harmonisasi regulasi bidang obat (RHSC), *ASEAN References Laboratories* (AFL), *Pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme* (PIC/S), dan *International Crime Police Organization Interpol*.

Balai Besar POM di Bandung melakukan pengembangan dan penguatan program pemberdayaan masyarakat melalui Food Safety Masuk Desa, PJAS, Pasar Aman dari Bahan Berbahaya. Selain itu, dilakukan pengembangan jejaring komunikasi



melalui peningkatan komunikasi sosial melalui kegiatan Komunikasi, Edukasi, dan Informasi (KIE) bersamaan tokoh masyarakat serta Iklan Layanan Masyarakat.

Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Balai Besar POM di Bandung melaksanakan reformasi birokrasi (RB) sesuai PP Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010- 2025. Upaya atau proses RB yang dilakukan Balai Besar POM di Bandung merupakan pengungkit dalam pencapaian sasaran sebagai hasil yang diharapkan dari pelaksanaan RB dengan membentuk tim POKJA dalam area Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sumber Daya Manusia, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sebagai wujud pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Pandemik Covid-19

Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada 2 Maret 2020, ketika dua orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada 9 April 2020, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi, termasuk Provinsi Jawa Barat. Setelah Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengakhiri pembatasan social berskala besar (PSBB) pada bulan Juni 2020 dan mulai menerapkan tatanan new normal, penambahan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Provinsi Jawa Barat alami peningkatan yang cukup tajam. Hal ini menjadi tantangan besar bagi BBPOM di Bandung dapat turut berkontribusi dalam percepatan penanganan covid-19 dan menjalankan tugas pengawasan Obat dan Makanan dalam masa pandemik-Covid-19 dengan membuat berbagai inovasi seperti layanan publik berbasis digital.



BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024**
- 2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021**
- 2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2021**
- 2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) TAHUN 2021**
- 2.5 METODE PENGUKURAN**

2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Renstra BPOM Tahun 2020-2024 disusun mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 serta dengan memperhatikan adanya perubahan organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang BPOM serta Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berdampak pada perubahan arah kebijakan dan strategi serta perubahan sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator kinerjanya.

Secara garis besar, lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh BPOM pada tahun 2020-2024 terdiri atas 2 (dua) isu pokok, yaitu kesehatan dan globalisasi. Isu kesehatan terkait Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta sehingga perlu peningkatan pengawasan Obat dan Makanan sebagai implikasi diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), desentralisasi dan otonomi daerah, agenda Sustainable Development Goals (SDGs), demografi, program fortifikasi pangan, serta perubahan iklim dunia. Adapun isu terkait globalisasi, utamanya tantangan menghadapi perdagangan bebas dan komitmen internasional, perubahan ekonomi dan sosial masyarakat, serta perkembangan teknologi.

Diharapkan output dan outcome dari pelaksanaan program dan kegiatan BPOM Tahun 2020-2024 tersebut menjadi bentuk konkrit kontribusi BPOM terhadap pencapaian agenda Nawacita nasional, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Untuk itu, capaian target outcome dan output akan dipantau secara berkala, dan dievaluasi pada akhir periode Rencana Strategis/RPJMN sebagai *impact assessment*.

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Balai Besar POM di Bandung sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Unit Pelaksana Teknis BPOM yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Barat dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM serta Peraturan



Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia khususnya Propinsi Jawa Barat sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan impact dari berbagai hasil (outcome) yang ingin diwujudkan Balai Besar POM di Bandung dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

VISI

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka Balai Besar POM di Bandung telah menetapkan Visi 2020-2024 yaitu:

“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek:

Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah



- seminimal mungkin/dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
- Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
- Berdaya Saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

MISI

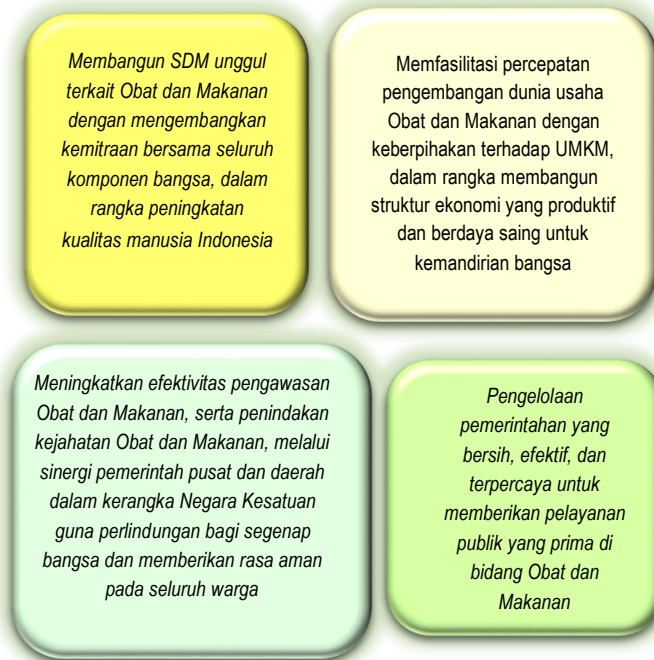
Dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan di atas, beberapa hal yang penting dimiliki dan atau dilakukan Balai Besar POM di Bandung sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan secara *full spectrum* pada periode 2020-2024, antara lain:

1. Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan yang holistik dan komprehensif sehingga mampu mengatur pengawasan Obat dan Makanan hulu ke hilir. Undang-undang ini diharapkan dapat bersifat *lex spesialis* yang mampu mengatur pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan baik (*Good Regulatory Practise*);
2. Penguatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan efek jera;
3. Meningkatkan akses pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan, pelaku usaha kefarmasian dan makanan sekaligus dalam tindak lanjut hasil pengawasan;
4. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UPT utamanya di wilayah Kabupaten/Kota, khususnya dalam penataan *people, process, infrastructure*;
5. Orientasi kinerja organisasi sampai level individu (sasaran dan indikator) yang bermuara pada *outcome* dan *impact*;



LAPORAN KINERJA INTERIM BALAI BESAR POM DI BANDUNG TRIWULAN I TAHUN 2021

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi Balai Besar POM di Bandung sebagai berikut:

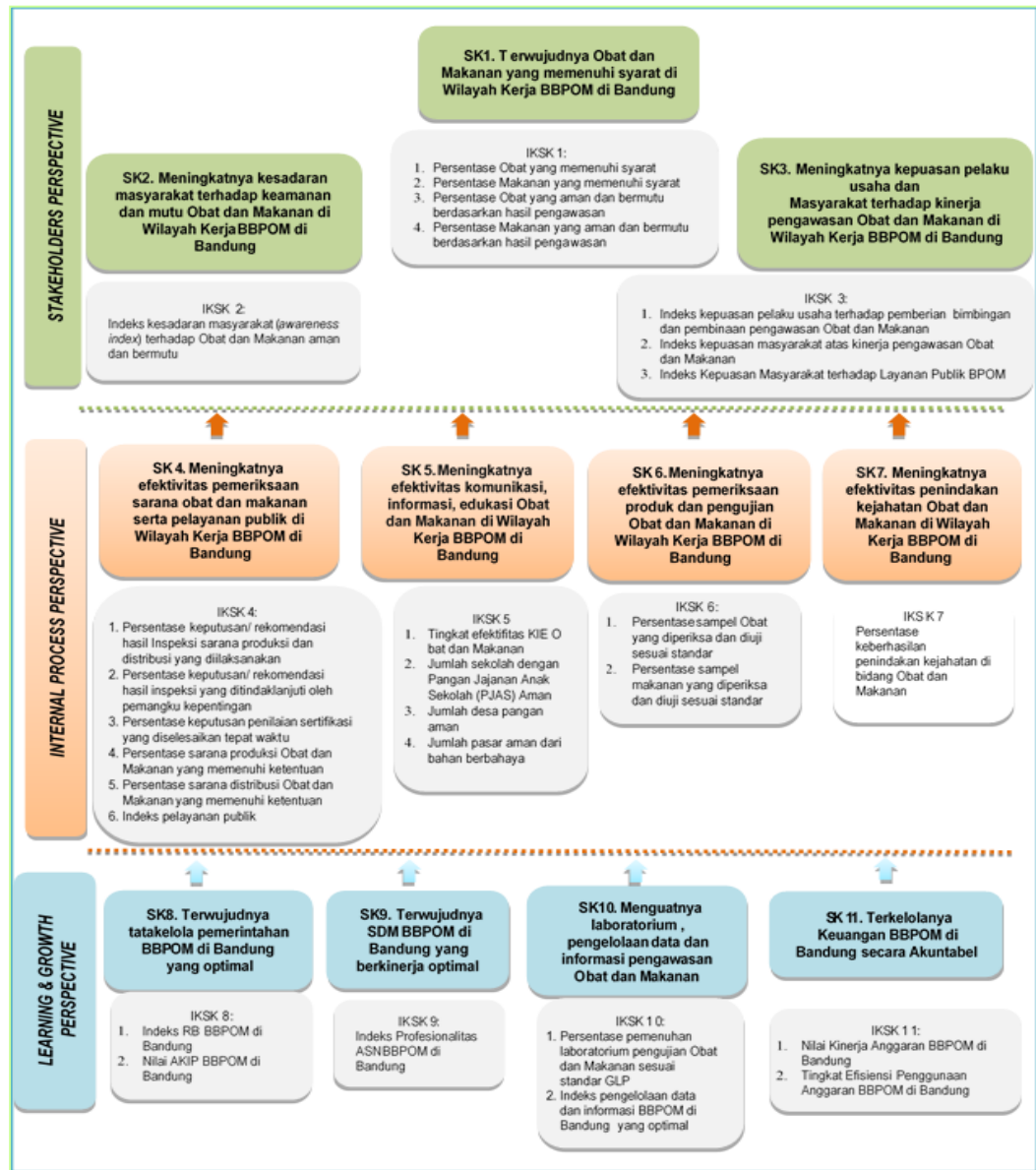


Gambar 2.1 Misi Balai Besar POM di Bandung 2020-2024



SASARAN KEGIATAN

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai Besar POM di Bandung dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai Besar POM di Bandung. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan Balai Besar POM di Bandung akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagaimana tergambar pada peta strategi level II Balai Besar POM di Bandung berikut



Gambar 2.2 Peta Strategi Level II Balai Besar POM di Bandung

Sumber: Konsensus BPOM



**LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dan mendukung pada tercapainya sasaran agenda pembangunan 2020-2024, BBPOM di Bandung menetapkan sasaran Kegiatan, indikator kegiatan dan target sebagaimana disajikan pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target BBPOM di Bandung
Tahun 2020-2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
STAKEHOLDER PERSPECTIVE						
SK1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	83,6	86,6	90	92,3
	2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	82	84	86
	3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	91	92	93	94
	4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	73	75	76	78
SK2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	5. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	72	75	78	81	83
SK3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	6. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83	85	86	87,5	89
	7. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71	74	77	80	83
	8. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandung	88,5	90,5	91	91,5	92
INTERNAL PERSPECTIVE						
SK4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung	9. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	89	91	93	95
	10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	56,9	63,9	70,9	78	85
	11. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	88	91	94	97
	12. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50	55	60	65	70
	13. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76	78	80	81	82



**LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2021**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
	14. Indeks pelayanan publik BBPOM di Bandung	3,7	3,75	3,81	4,16	4,51
SK5. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	15. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	70	73	77	80	83
	16. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20	42	62	82	104
	17. Jumlah desa pangan aman	9	19	28	37	47
	18. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	4	8	13	18	23
SK6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	19. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82	85	88	91	94
	20. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82	84	86	88	90
SK7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	21. Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	74	78	82	86	90
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE						
SK8. Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal	22. Indeks RB BBPOM di Bandung	91	92	93	94	95
	23. Nilai AKIP BBPOM di Bandung	81	85	90	91	92
SK9. Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	24. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	75	77	80	82	85
SK10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan	25. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	76	79	81	85	90
	26. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	1,51	2	2,26	2,5	3
SK11. Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	27. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	93	94	95	96	97
	28. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Bandung	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)



2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Besar POM di Bandung Tahun 2021 adalah bentuk penjabaran langkah-langkah pencapaian kinerja yang akan dilakukan pada tahun 2021 dan juga sebagai acuan dalam penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan. RKT Balai Besar POM di Bandung Tahun 2021 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Bandung Nomor. HK.02.02.103.1031.06.20.1060B tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2021 sebagaimana tabel 2.2 berikut:

**Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahunan BBPOM di Bandung
Tahun 2021**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	5. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	75
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	6. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	85
		7. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	74
		8. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandung	90,5
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung	9. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
		10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	63,9
		11. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88
		12. Persentase sarana produksi Obat dan	55



**LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2021**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
		Makanan yang memenuhi ketentuan	
		13. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78
		14. Indeks pelayanan publik BBPOM di Bandung	3,78
5.	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	15. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	89,18
		16. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	42
		17. Jumlah desa pangan aman	19
		18. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	8
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	19. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85
		20. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	84
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	21. Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	78
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal	22. Indeks RB BBPOM di Bandung	92
		23. Nilai AKIP BBPOM di Bandung	85
9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	24. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	77
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan	25. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	79
		26. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	2
11.	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	27. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	94
		28. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Bandung	Efisiensi (92%)

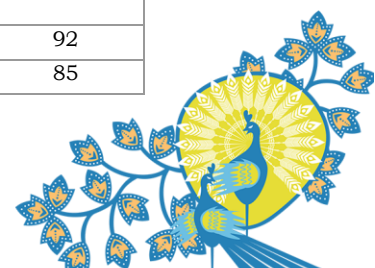
2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2020

Setelah penyerahan DIPA Balai Besar POM di Bandung Tahun Anggaran 2021, maka disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2021 berdasarkan RKT Tahun 2021 dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA yang telah disahkan sebesar Rp. 57.089.510.000. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Bandung Tahun 2021 sebagaimana tabel 2.3 berikut:



**Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja BBPOM di Bandung
Tahun 2021**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	5. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	75
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	6. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	85
		7. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	74
		8. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandung	90,5
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung	9. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
		10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	63,9
		11. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88
		12. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
		13. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78
		14. Indeks pelayanan publik BBPOM di Bandung	3,78
5.	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	15. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	89,18
		16. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	42
		17. Jumlah desa pangan aman	19
		18. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	8
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	19. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85
		20. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	84
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	21. Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	78
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di	22. Indeks RB BBPOM di Bandung	92
		23. Nilai AKIP BBPOM di Bandung	85



**LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2021**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Bandung yang optimal		
9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	24. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	77
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan	25. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	79
		26. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	2
11.	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	27. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	94
		28. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Bandung	Efisiensi (92%)

Kegiatan :

Anggaran

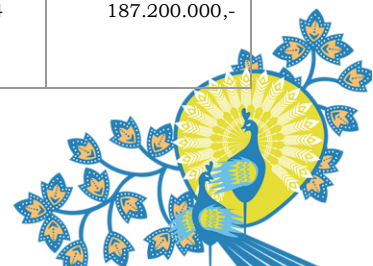
- | | |
|---|----------------------|
| 1. Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia | Rp. 31.191.604.000,- |
| 2. Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM | Rp. 25.897.906.000,- |

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) TAHUN 2020

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2021 menyajikan target triwulan yang tercantum dalam PK Balai Besar POM di Bandung beserta anggarannya sebagaimana tabel tabel 2.4 berikut:

**Tabel 2.4
Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)
Tahun 2021**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN (Rp)
			B03	B06	B09	B12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	83,6	83,6	83,6	669.700.000,-
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	80	80	80	277.190.000,-
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91	91	91	91	5.801.000,-
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73	73	73	73	3.883.000,-
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	5. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu				75	27.490.000,-
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	6. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan				85	122.650.000,-
		7. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan				74	187.200.000,-



**LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2021**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN (Rp)
			B03	B06	B09	B12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		8. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandung				90,5	124.000.000,-
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung	9. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	89	89	89	146.155.000,-
		10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	63,9	63,9	63,9	63,9	126.405.000,-
		11. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88	88	88	88	744.791.000,-
		12. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	55	55	55	817.601.000,-
		13. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78	78	78	78	1.399.220.000,-
		14. Indeks pelayanan publik BBPOM di Bandung				3,78	636.520.000,-
5.	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	15. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan				89,18	6.600.000.000,-
		16. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman				42	653.170.000,-
		17. Jumlah desa pangan aman				19	1.100.950.000,-
		18. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya				8	328.099.000,-
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	19. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	17,5	37,5	62,5	85	954.600.000,-
		20. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	22,5	42,5	65	84	516.683.000,-
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	21. Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	46	60	68	78	1.930.891.000,-
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal	22. Indeks RB BBPOM di Bandung				92	306.263.000,-
		23. Nilai AKIP BBPOM di Bandung				85	135.390.000,-
9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	24. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung				77	1.146.110.000,-
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan	25. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP				79	11.697.667.000,-
		26. Persentase pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	0,5	1	1,5	2	589.126.000,-
11.	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	27. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	24	48	72	94	18.999.000,-
		28. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Bandung	Efisiensi (92%)	Efisiensi (92%)	Efisiensi (92%)	Efisiensi (92%)	25.819.956.000,-



2.5 METODE PENGUKURAN

Keberhasilan suatu sasaran kegiatan dapat diukur melalui capaian indikator sasaran kegiatan atau yang biasa disebut indikator kinerja. Seluruh Indikator Kinerja Kegiatan Balai Besar POM Di Bandung merupakan Indikator Kegiatan Utama. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran kegiatan sesuai definisi operasional indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan rumus dibawah ini:

Pengukuran **INDIKATOR POSITIF** (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran **INDIKATOR NEGATIF** (semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya) yang satuannya dalam % dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(100 - \text{Realisasi})}{(100 - \text{Target})} \times 100\%$$

Pengukuran **INDIKATOR NEGATIF** (semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya) yang satuannya **BUKAN DALAM** % dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk sasaran kegiatan yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, nilai pencapaian sasaran dihitung berdasarkan capaian rata-rata indikator dari sasaran. Indikator kinerja utama (IKU) diberi bobot lebih tinggi (2 kali) karena mempunyai kontribusi yang lebih besar terhadap pencapaian sasaran.

Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja (X) yang digunakan adalah sebagai berikut:

TABEL 2.5
KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA



**LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2021**

					
Tidak Dapat Disimpulkan	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
X > 120%	$110\% \leq X \leq 120\%$	$90\% \leq X < 110\%$	$70\% \leq X < 90\%$	$50\% \leq X < 70\%$	$X < 50\%$





BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.2 REALISASI ANGGARAN

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sesuai dengan yang tercantum di dalam Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandung tahun 2020-2024 dan Penetapan Kinerja Balai Besar POM di Bandung tahun 2021 memuat 11 (sebelas) sasaran kegiatan. Pencapaian keseluruhan sasaran kegiatan Balai Besar POM di Bandung pada triwulan I tahun 2021 secara lengkap adalah sebagai berikut:

**TABEL 3.1
CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN TRIWULAN I TAHUN 2021**

SASARAN KEGIATAN	NILAI PENCAPAIAN SASARAN	KRITERIA	
1. TERWUJUDNYA OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	100,00	BAIK	
2. MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KEAMANAN DAN MUTU OBAT DAN MAKANAN WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	-	-	-
3. MENINGKATNYA KEPUASAN PELAKU USAHA DAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	-	-	-
4. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN OBAT DAN MAKANAN SERTA PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	92,70	BAIK	
5. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	-	-	-
6. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PRODUK DAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	88,96	CUKUP	
7. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENINDAKAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	52,17	KURANG	
8. TERWUJUDNYA TATAKELOLA PEMERINTAHAN BBPOM DI BANDUNG YANG OPTIMAL	-	-	-
9. TERWUJUDNYA SDM BBPOM DI BANDUNG YANG BERKINERJA OPTIMAL	-	-	-
10. MENGUATNYA LABORATORIUM, PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	-	-
11. TERKELOLANYA KEUANGAN BBPOM DI BANDUNG SECARA AKUNTABEL	117,68	SANGAT BAIK	



Sasaran kegiatan yang ditetapkan diukur dengan 28 indikator kinerja utama. Perbandingan target dan realisasi setiap indikator kinerja utama dari masing-masing sasaran kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini:

**TABEL 3.2
PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TRIWULAN I TAHUN 2021**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2021	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN (%)	KRITERIA CAPAIAN
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1. Persentase obat yang memenuhi syarat	83,60%	83,60%	97,52%	116,65%	Sangat Baik
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80,00%	80,00%	91,75%	114,69%	Sangat Baik
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91,00%	91,00%	95,24%	104,66%	Baik
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73,00%	73,00%	46,73%	64,01%	Kurang
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN				100,00%	BAIK
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja BBPOM di Bandung	5. Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	75,00	75,00	-	-	Pengukuran pada akhir tahun
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN				-	-
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	6. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	85,00	85,00	-	-	Pengukuran pada akhir tahun
		7. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan	74,00	74,00	-	-	Pengukuran pada akhir tahun



**LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TRIWULAN I TAHUN 2021**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2021	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN (%)	KRITERIA CAPAIAN
		Obat dan Makanan					
		8. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Bandung	90,00	90,00	-	-	Pengukuran pada akhir tahun
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN				-	-
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung	9. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.	89,00%	89,00%	75,00%	84,27%	Cukup
		10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	63,90%	63,90%	48,06%	75,21%	Cukup
		11. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88,00%	88,00%	93,59%	106,35%	Baik
		12. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00%	55,00%	48,65%	88,45%	Cukup
		13. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78,00%	78,00%	85,18%%	109,20%	Baik
		14. Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandung	3,75	3,75	-	-	Pengukuran pada akhir tahun
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN				92,70%-	BAIK-
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	15. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	89,18	89,18	-	-	-
		16. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	42,00	42,00	-	-	-



**LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TRIWULAN I TAHUN 2021**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2021	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN (%)	KRITERIA CAPAIAN
		aman					
		17. Jumlah desa pangan aman	19,00	19,00	-	-	-
		18. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	8,00	8,00	-	-	-
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN				-	-
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	19. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85,00%	17,50%	14,22%	81,26%	Cukup
		20. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	84,00%	22,50%	21,75%	96,65%	Baik
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN				88,96%	CUKUP
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	21. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	78,00%	46,00%	24,00%	52,17%	Kurang
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN				52,17%	KURANG
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal	22. Indeks RB BBPOM di Bandung	92,00	-	-	-	Pengukuran pada akhir tahun -
		23. Nilai AKIP BBPOM di Bandung	85,00	-	-	-	Pengukuran pada akhir tahun -
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN				-	-
9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	24. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	92,00	-	-	-	Pengukuran pada akhir tahun -
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN				-	-
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	25. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	79,00%	-	-	-	Pengukuran pada akhir tahun
		26. Indeks pengelolaan data dan	2,00	0.50	-	-	-



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2021	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN (%)	KRITERIA CAPAIAN
		informasi BBPOM di Bandung yang optimal					
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN				-	-
11.	Terkelolanya keuangan BBPOM di Bandung secara akuntabel	27. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	94,00	24,00	36.92	153.83	Tidak Dapat Disimpulkan
		28. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Bandung	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (75%)	81,52%	Cukup
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN				117.68	SANGAT BAIK

Pada triwulan I tahun 2021, terdapat satu (1) pencapaian sasaran kegiatan dengan kriteria kurang yaitu “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung”. Dengan kategori cukup terdapat satu (1) pencapaian sasaran kegiatan yaitu: “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung” Dan terdapat dua (2) pencapaian sasaran kegiatan dengan kriteria baik yaitu : “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung” dan “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung”, dan terdapat satu (1) sasaran kegiatan dengan kriteria sangat baik yaitu : “Terkelolanya keuangan BBPOM di Bandung secara akuntabel”. Sedangkan 6 (enam) sasaran kegiatan belum dilakukan pengukuran pencapaian sasaran kegiatan karena pengukuran dilakukan pada akhir tahun. Secara rinci setiap sasaran kegiatan akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya.



Nilai Kinerja Organisasi Balai Besar POM di Bandung pada triwulan I Tahun 2021 berdasarkan *Perspective Balance Score Card* sebesar 40, dengan rincian Nilai Kinerja *Stakeholder Perspective* (33); Nilai Kinerja *Internal Process Perspective* (58) dan Nilai Kinerja *Learning and Growth Perspective* (29), secara rinci sebagaimana tabel 3.3 berikut:

**TABEL 3.3
NILAI KINERJA ORGANISASI BERDASARKAN
PERSPECTIVE BALANCE SCORE CARD
TRIWULAN I TAHUN 2021**

PERSPECTIVE	SASARAN KEGIATAN	NILAI PENCAPAIAN SASARAN	NILAI PENCAPAIAN PERSPECTIVE
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE	1. TERWUJUDNYA OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	100,00	33
	2. MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KEAMANAN DAN MUTU OBAT DAN MAKANAN WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	-	
	3. MENINGKATNYA KEPUASAN PELAKU USAHA DAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	-	
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE	4. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN OBAT DAN MAKANAN SERTA PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	92,70	58
	5. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	-	
	6. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PRODUK DAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	88,96	
	7. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENINDAKAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	52,17	
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE	8. TERWUJUDNYA TATAKELOLA PEMERINTAHAN BBPOM DI BANDUNG YANG OPTIMAL	-	29
	9. TERWUJUDNYA SDM BBPOM DI BANDUNG YANG BERKINERJA OPTIMAL	-	
	10. MENGUATNYA LABORATORIUM, PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	
	11. TERKELOLANYA KEUANGAN BBPOM DI BANDUNG SECARA AKUNTABEL	117,68	
NILAI KINERJA ORGANISASI			40



Penjelasan mengenai kendala pencapaian dan upaya perbaikan untuk pencapaian target dapat dilihat pada penjelasan indikator kinerja di bawah ini:

**SASARAN
KEGIATAN
KE-1**

**TERWUJUDNYA OBAT DAN MAKANAN YANG
MEMENUHI SYARAT DI WILAYAH KERJA BBPOM
DI BANDUNG**

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 4 (empat) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan keempat indikator tersebut, diperoleh nilai pencapaian sasaran sebesar **100,00%** dengan kriteria **Baik**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.4

**TABEL 3.4
CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-1
TRIWULAN I TAHUN 2021**

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN	KRITERIA	
1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	83,60%	97,52%	116,65%	Sangat Baik	
2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	80,00%	91,75%	114,69%	Sangat Baik	
3. Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	91,00%	95,24%	104,66%	Baik	
4. Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	73,00%	46,73%	64,01%	Kurang	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			100,00%	BAIK	

Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan kesatu, sebagai berikut:

1. PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT

Persentase Obat yang memenuhi syarat diukur dengan membandingkan jumlah sampel acak memenuhi syarat pada tahun 2021 dibandingkan dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji pada tahun 2021. Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika. Sampel acak adalah sampel yang disampling terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun 2021. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: (1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu

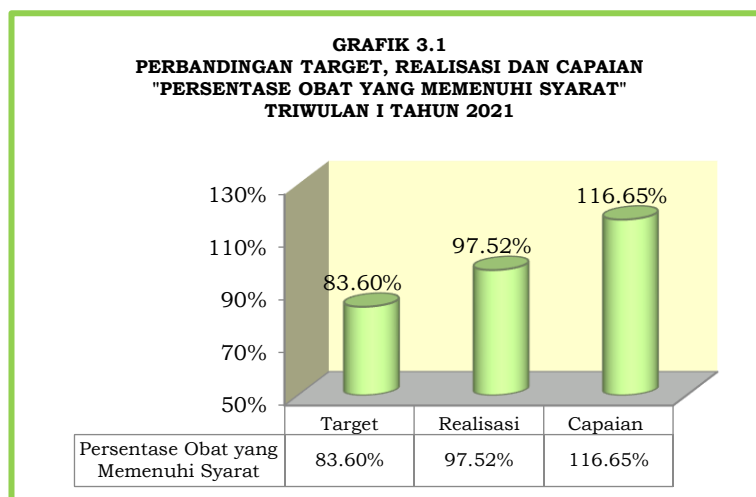


(termasuk kadaluarsa nomor izin edar); (2) Produk kadaluarsa; (3) Produk rusak; (4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan dan (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, namun apabila termasuk poin 4, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

**TABEL 3.5
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT”
TRIWULAN I TAHUN 2021**

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	83,60%	97,52%	116,65%	Sangat Baik	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2021



Pada triwulan I tahun 2021, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 83,60%. Sebanyak 161 sampel acak telah diperiksa dan diuji dengan rincian sebanyak 157 sampel memenuhi syarat, 4

sampel tidak memenuhi syarat (TMS). Persentase Obat yang memenuhi syarat sebesar 97,52%. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar **116,65%** dengan kriteria **Sangat Baik**. Hasil pengujian Obat yang TMS sebanyak 4 sampel yang terdiri dari 3 sampel TMK penandaan dan 1 sampel yang TMS mutu pengujian. Sampel yang TMK penandaan berasal dari 1 sampel Suplemen Kesehatan dan 2 sampel Obat Tradisional. Sedangkan 1 sampel yang TMS mutu pengujian berasal dari Obat Tradisional. Parameter Uji TMS, meliputi pengujian mikrobiologi (Angka Kapang Khamir).



B. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAS PENINGKATAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Kebhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada triwulan I tahun 2021 disebabkan antara lain :

- ☸ Meningkatnya kepatuhan produsen Obat terhadap pedoman yang telah ditetapkan dengan hasil sarana produksi Obat yang memenuhi ketentuan pada triwulan I tahun 2021 adalah 83,3% (35 dari 42 sarana) dibandingkan pada akhir tahun 2020.
- ☸ Adanya kegiatan Layanan Informasi serta Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) baik secara langsung maupun melalui media elektronik dan media sosial. KIE dilaksanakan melalui media sosial berupa infografis dan IG Live Kelom Geulis , media elektronik melalui Talkshow Radio
- ☸ Pengawasan terhadap produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang beredar lebih intensif, antara lain melalui kegiatan operasi daerah dan nasional seperti Operasi Pangea.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- ☸ Peningkatan kerjasama dengan stakeholder diantaranya Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi, pelaksanaan Dana Alokasi Kegiatan (DAK) pengawasan Obat dan Makanan dan pengawasan bersama.
- ☸ Peningkatan pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi tentang peraturan, kepada masyarakat luas melalui media social (facebook, Instagram, Ig Live), media masa melalui talkshow bekerjasama dengan radio. Bekerjasama dengan stakeholder (instansi terkait, organisasi masyarakat, organisasi profesi, tokoh masyarakat) melaksanakan KIE melalui tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan.
- ☸ Pembinaan dan KIE kepada masyarakat tentang Obat yang memenuhi ketentuan, Peraturan Perundang-undangan di bidang Obat serta Tips memilih obat yang aman. KIE dilaksanakan secara daring maupun luring. Pembinaan dilakukan saat pengawasan rutin di sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian dengan memberikan informasi mengenai cek klik.
- ☸ Penerapan sanksi, baik administratif atau *pro justicia*, terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi/mendistribusikan Obat Tanpa Ijin Edar (TIE)/ dilarang beredar. Pengawasan terhadap produk Obat yang beredar lebih intensif, antara lain melalui kegiatan Operasi Daerah dan Operasi Rutin Penindakan yang sudah direncanakan sesuai tingkat prioritasnya. Pada triwulan 1 tahun 2021 didapatkan 2 sarana distribusi obat yg tidak sesuai dengan ketentuan dengan jumlah barang yang diamankan



sebanyak 373 jenis obat dengan nilai sebesar Rp 257.333.392-. Sarana distribusi obat yg tidak sesuai dengan ketentuan berada di Wilayah Sukabumi. Kedua sarana tersebut dikenakan sanksi *pro justicia* dan prosesnya masih berlanjut. Penerapan sanksi yang cukup keras yaitu sanksi *pro justicia* diharapkan mampu memberikan efek jera baik bagi 2 sarana distribusi tersebut ataupun bagi sarana lain.

C. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Berikut adalah kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja :

- ☰ Pengambilan contoh sampel obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang dilakukan oleh BBPOM di Bandung dilakukan tepat waktu sesuai dengan rencana pelaksanaan sampling. Kegiatan tersebut dilakukan dengan melakukan pengambilan contoh terhadap produk yang ada di pasaran meliputi sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian.
- ☰ Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, dan kosmetik yang dilakukan secara rutin oleh BBPOM di Bandung, meliputi sarana Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha Mikro Obat Tradisional, Industri Kosmetik, dan Industri Suplemen Kesehatan. Sampai dengan triwulan I tahun 2021 jumlah sarana produksi yang diperiksa sejumlah 42 sarana.
- ☰ Adanya kegiatan Layanan Informasi serta Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) baik secara langsung maupun melalui media elektronik dan media sosial. Dan kegiatan pemberian layanan informasi Tata Cara Pendaftaran Obat dan Makanan.

D. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut :

- ☰ Intensifikasi pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dalam pemenuhan CPOB, CPOTB termasuk fokus khusus penandaan obat tradisional terhadap sarana produksi Obat Tradisional, pemenuhan CPKB dan CDOB.
- ☰ Meningkatkan monitoring pelaksanaan *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.
- ☰ Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan pemberian layanan informasi tentang Obat secara daring maupun tatap muka.



- ✎ Peningkatan kegiatan sosialisasi (KIE) tentang peraturan terkait Obat kepada pelaku usaha dan masyarakat, termasuk penyebaran informasi kepada stakeholder dan masyarakat tentang adanya *Public Warning* Obat yang diterbitkan oleh Badan POM. KIE tentang obat juga dilakukan melalui Media Sosial
- ✎ Peningkatan kerjasama dengan stakeholder (Dinas Kesehatan Kab./Kota setempat) terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Obat.
- ✎ Pembinaan dan penyebaran informasi terhadap sarana distribusi Obat serta masyarakat tentang Obat yang memenuhi ketentuan dilakukan melalui tatap muka maupun daring menggunakan Media sosial dan media elektronik.
- ✎ Penerapan sanksi, baik administratif atau *pro justicia*, terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi/mendistribusikan Obat Tanpa Ijin Edar (TIE)/ dilarang beredar. *Pro justicia* memiliki arti demi hukum, untuk hukum atau undang-undang. Secara formal administratif, *pro justicia* menunjukkan bahwa tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum adalah tindakan hukum yang sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana. Penerapan sanksi baik administratif atau *pro justicia* diharapkan mampu memberikan efek jera bagi masyarakat luas.
- ✎ Melaporkan hasil evaluasi penandaan Obat ke pusat untuk ditindaklanjuti ke produsen sebanyak 543 label .
- ✎ Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dengan melibatkan dalam pelatihan yang diadakan Badan POM.

E. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

2. PRESENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT

Persentase Makanan yang memenuhi syarat diukur dengan membandingkan jumlah sampel acak memenuhi syarat pada tahun 2021 dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji pada tahun 2021. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk



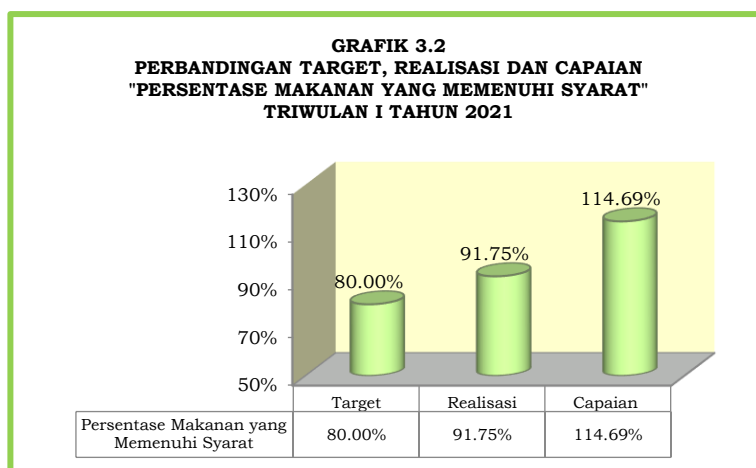
Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: (1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); (2) Produk kadaluarsa; (3) Produk rusak; (4) Tidak memenuhi ketentuan label; dan (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jika termasuk poin 1, 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK label, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung satu sampel TMS. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.6.

TABEL 3.6
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT”
TRIWULAN I TAHUN 2021

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	80,00%	91,75%	114,69%	Sangat Baik 

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2021

Pada triwulan I tahun 2021, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini sesuai dengan target yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 80,00%. Realisasi pada triwulan



I tahun 2021 sebesar 91,75%, dengan rincian 89 sampel memenuhi syarat dan 8 sampel tidak memenuhi syarat. Total sampel acak yang diperiksa dan diuji sebanyak 97 sampel. Dengan demikian capaian indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **114,69%** dengan kriteria **Sangat Baik**.

Sampai dengan triwulan I tahun 2021, sampel yang tidak memenuhi syarat mutu sebanyak 3 sampel tidak memenuhi syarat mutu yang mengandung Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang melebihi persyaratan, seperti pengawet benzoat dan sorbat, serta pemanis sakarin. Sedangkan sampel makanan TMK



label/penandaan sebanyak 5 sampel (TMK label/penandaan Kriteria Major sebanyak 3 sampel dan Tanpa Ijin Edar sebanyak 2 sampel).

B. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAS PENINGKATAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Peningkatan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada triwulan I tahun 2021 disebabkan antara lain :

- ☪ Perubahan definisi operasional mengenai kesimpulan sampel makanan yang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan Tahun 2021, bahwa sampel makanan dengan hasil evaluasi label/penandaan tidak memenuhi ketentuan dengan kriteria minor dan hasil uji laboratorium memenuhi syarat maka kesimpulan akhir sampel tersebut memenuhi syarat. Hal ini menyebabkan sampel dengan kesimpulan akhir memenuhi syarat mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- ☪ Pada triwulan 1 tahun 2021, peningkatan jumlah sarana produksi makanan yang diperiksa yaitu sebanyak 69 sarana dibandingkan triwulan yang sama pada tahun 2020 (39 sarana). Hal ini memberikan dampak inisiatif dari sarana produksi makanan dalam kepatuhan pemenuhan GMP dari sarana produksi yang diperiksa.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

- ☪ Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk makanan yang memenuhi standar melalui KIE yang intensif baik melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat atau melalui media sosial berupa infografis dan IG Live Kelo Geulis maupun elektronik berupa Radio
- ☪ Meningkatkan monitoring pelaksanaan *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.)
- ☪ Peningkatan koordinasi dengan stakeholder (Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota setempat) terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Makanan.
- ☪ Penerapan sanksi, baik administratif atau pro justicia, terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi/mendistribusikan makanan Tanpa Ijin Edar (TIE)/ dilarang beredar. Pengawasan terhadap produk makanan yang beredar lebih intensif, antara lain melalui kegiatan Operasi Daerah dan Operasi Rutin Penindakan yang sudah direncanakan sesuai tingkat prioritasnya. Pada triwulan 1 tahun 2021 didapatkan 2 sarana produksi makanan yang melakukan pelanggaran Undang-undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Sarana pertama merupakan pabrik Tahu di



Wilayah Bekasi yang memproduksi tahu dengan bahan tambahan yg berbahaya yaitu formalin. Jumlah barang yang diamankan dari sarana tersebut sebanyak 14 item dengan nilai sebesar Rp 12.241.000-. Tindak lanjut untuk sarana tersebut adalah dilimpahkan ke Detasemen Polisi Militer karena tersangka merupakan anggota TNI aktif. Sarana kedua merupakan pabrik Mie Basah di Wilayah Cileungsi yang memproduksi Mie Basah dengan bahan tambahan yg berbahaya yaitu formalin. Jumlah barang yang diamankan dari sarana tersebut sebanyak 12 item dengan nilai sebesar Rp 47.525.000-. Sarana tersebut dikenakan sanksi *pro justicia* dan prosesnya masih berlanjut. Penerapan sanksi yang cukup keras yaitu sanksi *pro justicia* diharapkan mampu memberikan efek jera baik bagi tersebut ataupun bagi sarana lain.

- ☛ Peningkatan pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi tentang peraturan, klarifikasi berita hoax terkait Obat dan makanan, Public Warning Obat dan makanan yang diterbitkan oleh Badan POM kepada masyarakat luas melalui media social (facebook, Instagram, Ig Live), media masa melalui talkshow bekerjasama dengan radio dengan bekerjasama dengan Sonora. Bekerjasama dengan stake holder (instansi terkait, organisasi masyarakat, organisasi profesi, tokoh masyarakat) Selain itu, melalui media sosial sebanyak 61 kali,

C. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja adalah :

- ☛ Pengawasan sarana produksi makanan yang dilakukan secara rutin oleh Balai Besar POM di Bandung meliputi sarana Industri Pangan Olahan MD dan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Sampai dengan triwulan I tahun 2021, jumlah sarana produksi yang diperiksa sejumlah 69 sarana.
- ☛ Desk CAPA secara daring dalam rangka meningkatkan pemahaman Pelaku Usahat terhadap Pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diselenggarakan pada tanggal 19 Maret 2021.

D. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut :

- ☛ Peningkatan pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi tentang peraturan, klarifikasi berita hoax terkait Obat dan makanan, Public Warning Obat dan makanan yang diterbitkan oleh Badan POM kepada masyarakat luas melalui media social (facebook, Instagram, Ig Live), media masa melalui talkshow bekerjasama dengan radio. Sampai dengan triwulan I tahun 2021, KIE melalui media sosial sebanyak 61 kali,



- ☸ Meningkatkan pembinaan terhadap sarana produksi makanan terkait pemenuhan CPPOB yaitu sebanyak 69 sarana produksi yang diperiksa pada triwulan I tahun 2021.
- ☸ Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap distributor dan penjual retail produk makanan mengenai Makanan yang memenuhi ketentuan, yaitu sebanyak 34 sarana distribusi yang diperiksa pada triwulan I tahun 2021. (
- ☸ Peningkatan kerjasama dengan stakeholder (Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan) terkait pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi makanan.
- ☸ Melaporkan hasil evaluasi penandaan ke pusat untuk ditindaklanjuti ke produsen, yaitu sebanyak 284 label pangan.

E. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

3. PRESENTASE OBAT YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN

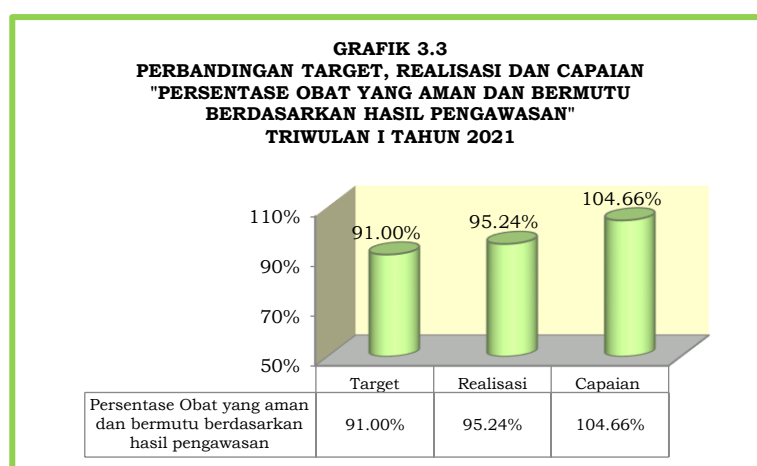
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diukur dengan membandingkan jumlah sampel targeted yang memenuhi syarat tahun 2021 dibandingkan dengan total sampel targeted yang diperiksa dan diuji tahun 2021. Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika. Berkualitas yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive tahun 2021. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: (1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu; (2) Produk kadaluwarsa; (3) Produk rusak; (4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.7.



**TABEL 3.7
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE OBAT YANG AMAN DAN BERMUTU
BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN”
TRIWULAN I TAHUN 2021**

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91,00%	95,24%	104,66%	Baik	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2021



Pada triwulan I tahun 2021, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini sebesar 91,00%. Sampel targeted yang diperiksa dan diuji sebanyak 63 sampel dengan rincian sebanyak 60 sampel

memenuhi syarat dan 3 sampel tidak memenuhi syarat, sehingga persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh sebesar 95,24%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **104,66%** dengan kriteria **Baik**. Hasil pengujian Obat yang tidak memenuhi syarat (TMS) berasal dari produk Obat Tradisional dengan rincian 2 sampel TMK penandaan dan 1 sampel TMS mutu pengujian. Parameter uji yang tidak memenuhi syarat adalah pengujian mikrobiologi (Angka Kapang Khamir).

B. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAS PENINGKATAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada triwulan I tahun 2021 disebabkan antara lain:

- ☞ Pengambilan contoh sampel obat, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan kosmetik yang dilakukan oleh BBPOM di Bandung dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan rencana pelaksanaan sampling.



- ☰ Pada triwulan 1 tahun 2021, sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan meningkat menjadi 85,5% dibandingkan capaian akhir tahun sebelumnya.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

- ☰ Peningkatan pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi tentang peraturan, klarifikasi berita hoax terkait Obat dan makanan, *Public Warning* Obat dan makanan yang diterbitkan oleh Badan POM kepada masyarakat luas melalui media social (facebook, Instagram, Ig Live), media masa melalui talkshow bekerjasama dengan radio Bekerjasama dengan stake holder (instansi terkait, organisasi masyarakat, organisasi profesi, tokoh masyarakat) melaksanakan KIE melalui IG Live Kelom Geulis tentang Alur Perizinan Obat Tradisional.
- ☰ Peningkatan kerjasama dengan stakeholder (Dinas Kesehatan Kab./Kota setempat) terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Obat.
- ☰ Pembinaan dan penyebaran informasi terhadap sarana distribusi Obat serta masyarakat tentang Obat yang memenuhi ketentuan.
- ☰ Penerapan sanksi administratif terhadap sarana produksi dan distribusi yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) mulai dari peringatan, peringatan keras dan penghentian sementara kegiatan.
- ☰ Pengawasan terhadap produk Obat yang beredar lebih intensif, antara lain melalui kegiatan Operasi Daerah dan Operasi Rutin Penindakan yang sudah direncanakan sesuai tingkat prioritasnya. Seperti yg dilakukan pada triwulan 1 tahun 2021. Hasil dari pengawasan terhadap produk Obat pada triwulan 1 didapatkan 2 sarana distribusi obat yg tidak sesuai dengan ketentuan dengan jumlah barang yang diamankan sebanyak 373 jenis obat dengan nilai sebesar Rp 257.333.392-. Sarana distribusi obat yg tidak sesuai dengan ketentuan berada di Wilayah Sukabumi. Kedua sarana tersebut dikenakan sanksi *pro justicia* dan prosesnya masih berlanjut. Penerapan sanksi yang cukup keras yaitu sanksi *pro justicia* diharapkan mampu memberikan efek jera baik bagi 2 sarana distribusi tersebut ataupun bagi sarana lain.

C. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Berikut adalah kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja :

- ☰ Pengambilan contoh sampel obat, obat tradisional, dan kosmetik yang dilakukan oleh BBPOM di Bandung, dilakukan sesuai perencanaan pada triwulan 1 yaitu sejumlah 543 sampel. Kegiatan tersebut dilakukan dengan



melakukan pengambilan contoh terhadap produk yang ada di pasaran meliputi sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian.

- ☸ Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, dan kosmetik yang dilakukan secara rutin oleh BBPOM di Bandung, meliputi sarana Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha Mikro Obat Tradisional, Industri Kosmetik, dan Industri Suplemen Kesehatan. Pada triwulan I tahun 2021 jumlah sarana produksi yang diperiksa sejumlah 42 sarana.
- ☸ Pengawasan sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian dilaksanakan dalam rangka pengawasan sediaan farmasi yang beredar di pasaran. Sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian meliputi, Pedagang Besar Farmasi, Instalasi Farmasi Pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Toko Obat, Klinik, Puskesmas, dan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, serta suplemen kesehatan. Pada triwulan I tahun 2021 jumlah sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian yang diperiksa sejumlah 420 sarana.

D. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut :

- ☸ Intensifikasi pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dalam pemenuhan CPOB, CPOTB, CPKB dan CDOB.
- ☸ Meningkatkan monitoring pelaksanaan *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan setiap minggu.
- ☸ Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) secara langsung maupun melalui media sosial berupa infografis tentang Obat dan Makanan maupun IG Live Kelom Geulis Tentang Obat Tradisional serta Iklan Layanan Masyarakat (ILM).
- ☸ Peningkatan kegiatan sosialisasi tentang peraturan terkait Obat kepada pelaku usaha dan masyarakat, termasuk penyebaran informasi kepada stakeholder dan masyarakat tentang adanya *Public Warning* Obat yang diterbitkan oleh Badan POM yang dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.
- ☸ Peningkatan kerjasama dengan stakeholder (Dinas Kesehatan Kab./Kota setempat) terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Obat.
- ☸ Pembinaan dan pelayanan informasi tentang Obat dan Makanan terhadap sarana distribusi Obat serta masyarakat tentang Obat yang memenuhi ketentuan



☞ Penerapan sanksi, baik administratif atau pro justicia, terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi/mendistribusikan Obat Tanpa Ijin Edar (TIE)/ dilarang beredar. Proses penegakan hukum sampai dengan projusticia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana. Penerapan sanksi baik administratif atau pro justicia diharapkan mampu memberikan efek jera bagi masyarakat luas.

E. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

4. PRESENTASE MAKANAN YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN

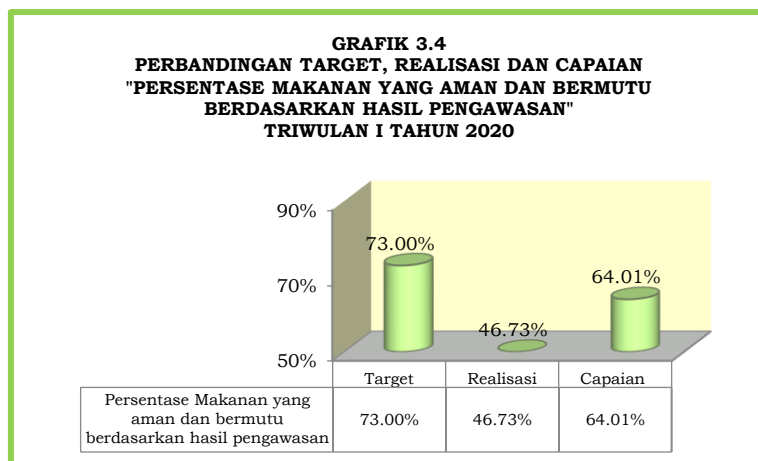
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diukur dengan membandingkan jumlah sampel targeted memenuhi syarat pada tahun 2021 dibandingkan dengan total sampel targeted yang diperiksa dan diuji pada tahun 2021. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.8 .

TABEL 3.8
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE MAKANAN YANG AMAN DAN BERMUTU
BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN”
TRIWULAN I TAHUN 2021

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Persentase Makanan Yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	73,00%	46,73%	64,01%	Kurang	



A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2021



Pada triwulan I tahun 2021, target yang ditetapkan indikator sasaran ini sesuai dengan target yang ditetapkan pada RAPK triwulan I Tahun 2021 adalah sebesar 73,00%. Persentase Makanan yang aman

dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada triwulan I tahun 2021 sebesar 46,73%, dengan rincian sebanyak 50 sampel targeted memenuhi syarat dan 57 sampel targeted tidak memenuhi syarat dari total sampel targeted yang diperiksa dan diuji sebanyak 107 sampel targeted. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **64,01%** dengan kriteria **Kurang**.

B. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAS PENINGKATAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Penurunan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada triwulan I tahun 2021 disebabkan antara lain :

Sampai dengan triwulan I tahun 2021, hasil pengujian sampel makanan yang TMS sebanyak 57 sampel (53,27%) dari total 107 sampel makanan yang diperiksa dan diuji. Hasil pengujian sampel makanan yang TMS tersebut, sebagian besar berasal dari sampel fortifikasi garam beryodium yaitu sebanyak 54 sampel tidak memenuhi syarat, yaitu KIO₃ yang substandard dari total 98 sampel fortifikasi garam beryodium yang diperiksa dan diuji. Sedangkan sampel TMS lainnya berasal dari sampel Air Minum Isi Ulang sebanyak 3 sampel. Sampel tersebut tidak memenuhi syarat mikrobiologi, yaitu mengandung bakteri *P Aeruginosa*.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

- ☼ Meningkatkan pembinaan terhadap sarana produksi makanan terkait pemenuhan CPPOB melalui pelaksanaan *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.
- ☼ Peningkatan pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi tentang peraturan, klarifikasi berita hoax terkait Obat dan makanan, Public Warning Obat dan makanan yang diterbitkan oleh Badan POM kepada masyarakat luas melalui



media social (facebook, Instagram, Ig Live), media masa melalui talkshow bekerjasama dengan radio.

**C. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN
ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA**

Berikut adalah kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian kinerja :

- Hasil pemeriksaan rutin pada triwulan 1 tahun 2021, pemenuhan kepatuhan GMP sarana produksi makanan masih sangat rendah yaitu sebesar 27,5% (19 dari 69 sarana yang diperiksa).

D. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk makanan yang memenuhi syarat melalui penyebaran informasi yang intensif baik melalui sosialisasi langsung atau melalui media sosial Instagram, Facebook dan Twitter
- Meningkatkan pembinaan terhadap sarana produksi makanan terkait pemenuhan CPPOB.
- Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap distributor dan penjual retail produk makanan mengenai Makanan yang memenuhi syarat.
- Peningkatan kerjasama dengan stakeholder terkait pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi makanan serta melakukan advokasi pengawasan pangan fortifikasi secara langsung di tempat produsen.

E. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

**SASARAN
KEGIATAN
KE-2**

**MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT
TERHADAP KEAMANAN DAN MUTU OBAT DAN
MAKANAN WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG**

Kebhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator yaitu : Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu. Pengukuran indikator tersebut merupakan hasil survey oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan Badan POM yang dilakukan pada akhir tahun anggaran.



Kesadaran mencakup beberapa aspek yaitu: (1) Pengetahuan (Knowledge) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat; (2) Sikap (Attitude) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi obat dan makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran obat atau obat tradisional palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengkonsumsi obat & makanan yang benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan; dan (3) Perilaku (Practices) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM.

Interprestasi indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu mengacu pada skala 0-100 dengan kategori sebagai berikut:

**TABEL 3.9
KATEGORI INDEKS KESADARAN MASYARAKAT (AWARENESS INDEX)
TERHADAP OBAT DAN MAKANAN AMAN DAN BERMUTU**

SKOR	INTERPRESTASI
≤ 45,00	TIDAK BAIK
45,01 – 60,00	KURANG BAIK
60,01 – 75,00	CUKUP BAIK
75,01 – 90,00	BAIK
≥ 90,01	SANGAT BAIK

**SASARAN
KEGIATAN
KE-3**

**MENINGKATNYA KEPUASAN PELAKU USAHA DAN
MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PENGAWASAN
OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI
BANDUNG**

KE-3 eberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 3 (tiga) indikator yaitu: (1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan; (2) Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan Obat dan Makana; dan (3) Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM. Pengukuran indikator tersebut merupakan hasil



survey oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan Badan POM yang dilakukan pada akhir tahun anggaran.

1. INDEKS KEPUASAN PELAKU USAHA TERHADAP PEMBERIAN BIMBINGAN DAN PEMBINAAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Indeks kepuasan pelaku usaha merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM. Bimbingan dan pembinaan merupakan pemberian bimbingan teknis dan supervise yang mencakup sosialisasi/seminar, workshop/ pelatihan/bimbingan teknis, asistensi/pendampingan/coaching clinic, konsultasi, focus group discussion (FGD). Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan. Aspek pengukuran dalam survey ini adalah: (1). Aspek bimbingan dan pembinaan; (2). Aspek tindak lanjut pasca bimbingan dan pembinaan; (3). Aspek penanganan saran dan masukan; (4). Aspek manfaat; (5). Aspek dampak/pengaruh atas bimbingan dan pembinaan; dan (6). Aspek pengetahuan dan pemahaman.

2. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM. Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu *tangibles*, *realibility*, *responsiveness*, *assurance* dan *emphaty*. Untuk mengukur ke 5 (lima) indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 (dua) pengukuran indeks yaitu: (1). Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (*tangibles*); dan (2). Indikator tidak langsung yaitu sejauh manakerja BPOM dalam melakukan pengawasan (*realibility*), tindakan (*responsiveness*), memberikan perlindungan (*assurance*) dan kepedulian (*emphaty*) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.



3. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PUBLIK BPOM

Indeks kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Pada tahap interpretasi, untuk memudahkan penafsiran dan mengacu pada pengelompokan kinerja unit pelayanan berdasarkan PemanPAN dan RB Nomo 14 Tahun 2017, indeks yang diperoleh dikelompokkan sebagai berikut:

TABEL 3.10
NILAI KONVERSI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
TERHADAP LAYANAN PUBLIK BPOM

NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
76,61 - 88,30	B	Baik
88,31 - 100,00	A	Sangat Baik

SASARAN KEGIATAN KE-4

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN OBAT DAN MAKANAN SERTA PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 6 (enam) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Namun, pada triwulan I tahun 2021, hanya 5 (lima) indikator yang dapat diukur. Dari perhitungan kelima indikator diperoleh hasil rata-rata capaian sebesar **92,70%** dengan kriteria **Baik**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.11.



**TABEL 3.11
CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS KE-4
TRIWULAN I TAHUN 2021**

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.	89,00%	75,00%	84,27%	Cukup	
2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	63,90%	48,06%	75,21%	Cukup	
3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88,00%	93,59%	106,35%	Baik	
4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00%	48,65%	88,45%	Cukup	
5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78,00%	85,18%%	109,20%	Baik	
6. Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandung	3,75	-	-	Pengukuran pada akhir tahun	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			92,70%	BAIK	

1. PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI YANG DILAKSANAKAN

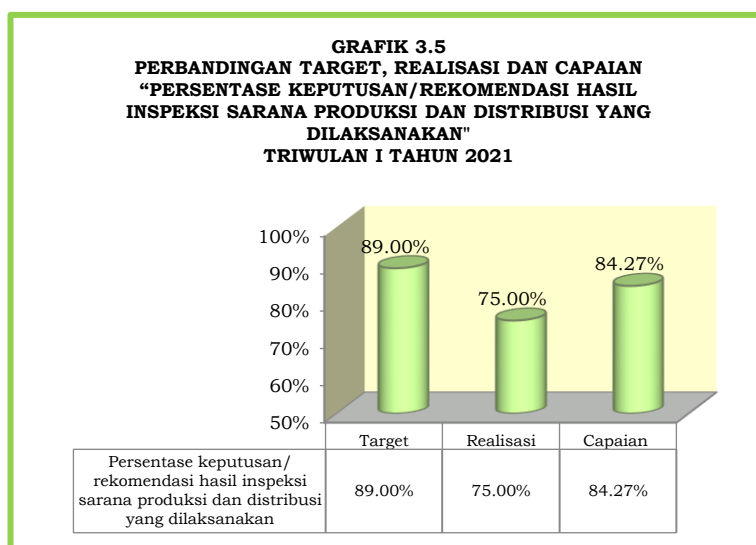
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diukur rata-rata jumlah persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT, persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT, persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT, persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT) s.d triwulan n.



TABEL 3.12
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI
DAN DISTRIBUSI YANG DILAKSANAKAN”
TRIWULAN I TAHUN 2021

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.	89,00%	75,00%	84,27%	Cukup	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2021



Pada triwulan I tahun 2021, target yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan adalah sebesar 89,00%. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang

dilaksanakan pada triwulan I tahun 2021 sebesar 75,00%%. Dengan rincian persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT sebesar 100%; persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT sebesar 100%; persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain sebesar 0%; dan persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT sebesar 100%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **84,27%** dengan kriteria **Cukup**.

B. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAS PENINGKATAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Ketidakberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada triwulan I tahun 2021 disebabkan antara lain:



- Pada triwulan 1 tahun 2021, rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain sejumlah 1 rekomendasi pada bulan Maret, sehingga belum ada tindak lanjut oleh Pusat. Hal tersebut berpengaruh signifikan terhadap keseluruhan nilai capaian persentase keputusan /rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.

Terkait hal tersebut diatas, maka alternatif solusi yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja indikator kegiatan tersebut antara lain :

- Peningkatan koordinasi dengan stakeholder terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Makanan.
- Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan inspeksi dan hasil tindak lanjut pengawasan.

C. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Berbagai upaya telah dilakukan dalam mencapai kinerja sesuai tindaklanjut yang direncanakan, antara lain :

- Pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan inspeksi dan hasil tindak lanjut pengawasan dilakukan setiap bulan, serta dilaporkan melalui Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Seksi Inspeksi Tahun 2021.

D. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

2. PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI YANG DITINDAKLANJUTI OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN

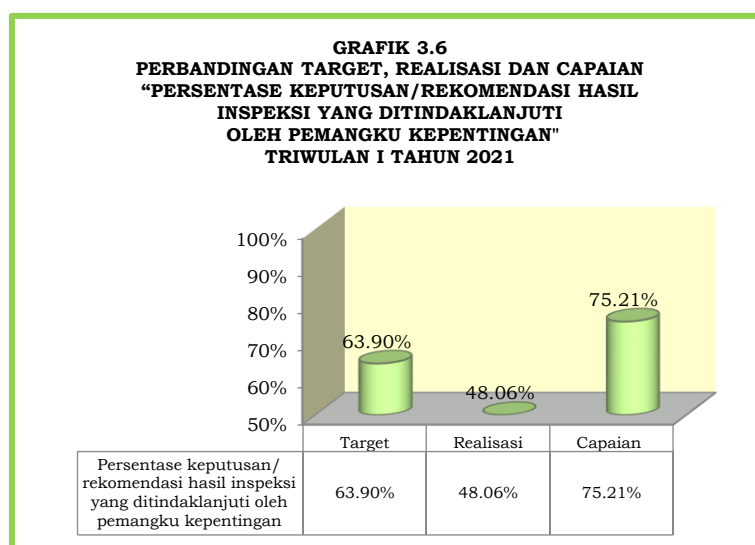
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan diukur rata-rata jumlah persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dan persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor s.d tahun berjalan.



**TABEL 3.13
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI YANG
DITINDAKLANJUTI OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN”
TRIWULAN I TAHUN 2021**

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	63,90%	48,06%	75,21%	Cukup	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2021



Pada triwulan I tahun 2021, target yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 63,90%. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada

triwulan I tahun 2021 sebesar 48,06%. Dengan rincian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha sebesar 45,90% dan persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor sebesar 50,0%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **75,21%** dengan kriteria **Cukup**.

B. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAS PENINGKATAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Kegagalan capaian indikator ini disebabkan oleh:

- ☹ Kurangnya respon sarana terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan
- ☹ Meningkatnya tindak lanjut hasil pemeriksaan untuk sarana yang tidak memenuhi ketentuan, sehingga rekomendasi yang diterbitkan lebih banyak.

Terkait hal tersebut diatas, maka alternatif solusi yang harus dilakukan dalam rangka memperbaiki capaian kinerja indikator kegiatan tersebut antara lain:

- ☹ Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan kepada pelaku usaha dengan menyampaikan form *Corrective*



Action Preventive Action (CAPA) dan kemudahan penyampaian CAPA tersebut melalui email kantor.

- ☰ Meningkatkan monitoring pelaksanaan *Corrective Action Preventive Action (CAPA)* sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.

C. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Berbagai upaya telah dilakukan dalam mencapai kinerja sesuai tindak lanjut yang direncanakan, antara lain :

- ☰ Pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan inspeksi dan hasil tindak lanjut pengawasan dilakukan setiap bulan, serta dilaporkan melalui Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Seksi Inspeksi Tahun 2021.

D. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

3. PERSENTASE KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diukur dengan membandingkan jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (termasuk carry over tahun sebelumnya) s.d triwulan n dengan jumlah permohonan penilaian sertifikasi (termasuk carry over tahun sebelumnya) s.d triwulan n. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup: (1). Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT; (2). Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk; (3). Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik; (4). Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar; (5). Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB; (6). Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan; (7). Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK.

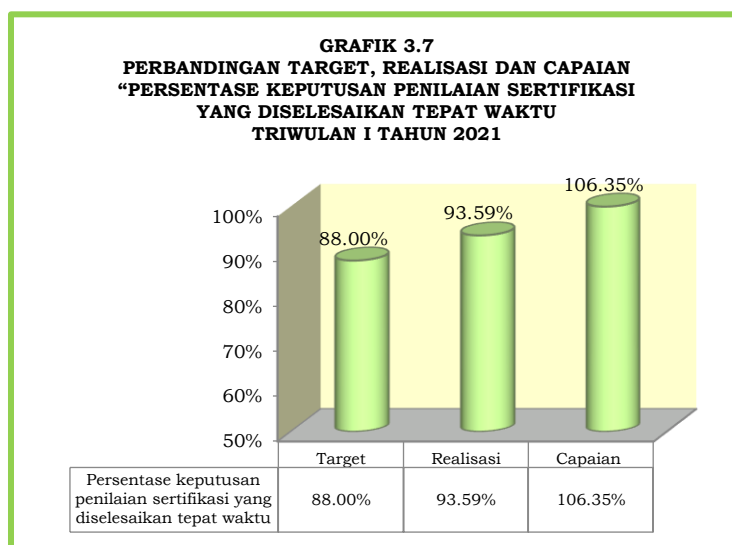


**TABEL 3.14
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI
YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU”
TRIWULAN I TAHUN 2021**

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88,00%	93,59%	106,35%	Baik	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2021

Pada triwulan I tahun 2021, target yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan adalah sebesar 88,00%. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada triwulan I tahun 2021 sebesar 93,59%. Dengan rincian



jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (termasuk carry over tahun sebelumnya) sebanyak 759 keputusan dan jumlah permohonan penilaian sertifikasi (termasuk carry over tahun sebelumnya) sebanyak 811 permohonan. Dengan demikian capaian target indikator sasaran tersebut sebesar **106.35%** dengan kriteria **Baik**. Secara rinci dijelaskan pada tabel berikut :

**TABEL 3.15
HASIL PENILAIAN SERTIFIKASI
TRIWULAN I TAHUN 2021**

No	Rekomendasi/ sertifikasi	Satuan	RAPK s.d TW I (Jan - Mar)		
			Jumlah rek tepat waktu (pembilang)	Jumlah Permohonan (Penyebut)	% sertifikasi tepat waktu (Capaian)
1	Surat Keterangan Impor (SKI)	Surat Keterangan	0	0	0.00
2	Surat Keterangan Ekspor (SKE)	Surat Keterangan	405	472	85.81
3	Rekomendasi/ Sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB	Rekomendasi	198	172	115.12
4	Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga	Sertifikat	156	167	93.41
Total			759	811	93.59



B. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAS PENINGKATAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Capaian Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu pada triwulan I tahun 2021 memenuhi target yang ditetapkan dikarenakan adanya hal berikut:

- ✎ Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik memudahkan pelaku usaha khususnya di bidang Obat dan Makanan dalam memenuhi persyaratan administrasi dalam rangka sertifikasi terkait perizinan usaha yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh lembaga *Online Single Submission* (OSS) berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Angka Pengenal Import (API).
- ✎ Adanya kebijakan Badan POM dalam penerapan CPOTB bertahap, memudahkan pelaku usaha obat tradisional yaitu Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dalam memenuhi persyaratan teknis dalam CPOTB.
- ✎ Keterbukaan dan kemudahan akses informasi bagi seluruh pelaku usaha khususnya terkait persyaratan dan prosedur sertifikasi baik melalui media elektronik dan nonelektronik yang diselenggarakan oleh Balai Besar POM di Bandung.
- ✎ Adanya aplikasi e-bpom yang memfasilitasi layanan proses perizinan eksportasi yang diselenggarakan oleh Balai Besar POM di Bandung semakin stabil, selain itu kompetensi dan komitmen SDM evaluator yang tinggi sehingga dapat melakukan evaluasi sesuai dengan persyaratan dan memenuhi timeline yang telah ditetapkan.
- ✎ Berbagai Bimbingan Teknis/Sosialisasi/Diseminasi/Penggalangan Komitmen di Bidang Obat dan Makanan kepada pelaku usaha yang diselenggarakan oleh Balai Besar POM di Bandung secara rutin berdampak pada peningkatan pemahaman dan komitmen pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai peraturan yang berlaku.
- ✎ Peningkatan kompetensi dan komitmen SDM Balai Besar POM di Bandung dalam kegiatan sertifikasi sehingga sarana produksi dan sarana distribusi yang mengajukan permohonan dalam rangka sertifikasi dapat memenuhi ketentuan dan dapat diselesaikan sesuai timeline yang telah ditetapkan. Meskipun jumlah SDM sangat kurang dibandingkan dengan beban kerjanya.
- ✎ Walaupun terjadi pandemi Covid 19, kegiatan sertifikasi tetap berjalan secara optimal karena audit / pemeriksaan sarana dilakukan secara daring (*online*) dan *onsite*.



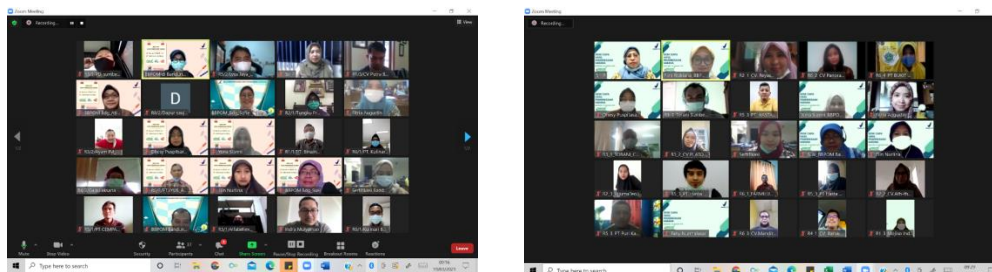
Terkait hal tersebut diatas, maka alternatif solusi yang harus dilakukan dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- ✎ Meningkatkan kompetensi SDM sesuai dengan standar kompetensi teknis yang dipersyaratkan melalui pelatihan/*workshop*/bimtek/diseminasi/webinar mengenai CPOB, CPOTB, CPKB dan CDOB.
- ✎ Meningkatkan pemahaman dan komitmen pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan melalui Bimtek/Sosialisasi/Diseminasi/Penggalangan Komitmen.
- ✎ Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sertifikasi.
- ✎ Meningkatkan sarana dan prasarana kerja pendukung pelaksanaan kegiatan sertifikasi.

C. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Berikut adalah kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

- ✎ Meningkatkan monitoring CAPA sebagai bentuk tindaklanjut pengawasan dengan cara membuat tabel monitoring surat masuk beserta progresnya.
- ✎ Telah dilaksanakan kegiatan Desk CAPA di bulan Januari dan Bulan Maret. Penyelenggaraan kegiatan Desk CAPA secara rutin setiap 2 (dua) bulan sehingga kendala-kendala yang dialami oleh pelaku usaha dalam rangka pemenuhan CAPA-nya lebih diminimalisir hal ini berdampak pada pencapaian jumlah rekomendasi yang dikeluarkan semakin meningkat.

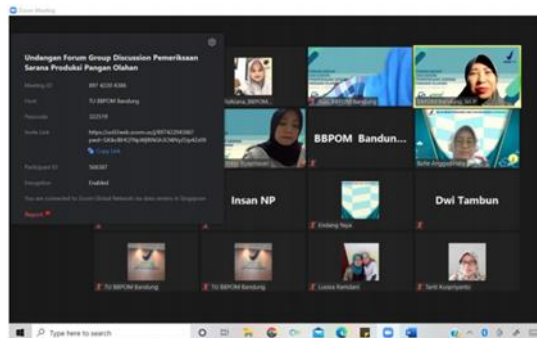


GAMBAR 3.1
DESK CAPA YANG DISELENGGARAKAN SECARA DARING

- ✎ Pada tanggal 23 Februari 2021 diadakan kegiatan coaching clinic terhadap para pelaku usaha UMKM Pangan di Kabupaten Cirebon terkait kendala-kendala yang mereka hadapi dalam hal menempuh proses untuk mendapatkan rekomendasi pemeriksaan sarana dalam rangka pendaftaran pangan.



- ✎ Pada tanggal 12 Februari 2021, diadakan FGD Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan dengan Koordinator Kelompok Substansi Pengawasan Produksi Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang, Bahan Tambahan Pangan, Bahan Penolong, Kemasan Yang Digunakan Untuk Pangan dan Bahan Lainnya – Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan – Kedeputan III Bidang Pengawasan Pangan Olahan – Badan POM RI) dalam rangka salah satu upaya peningkatan kompetensi dan komitmen SDM Balai Besar POM di Bandung dalam kegiatan sertifikasi sehingga sarana produksi dan sarana distribusi yang mengajukan permohonan dalam rangka sertifikasi dapat memenuhi ketentuan dan dapat diselesaikan sesuai timeline yang telah ditetapkan.
- ✎ Pendampingan registrasi melalui online dengan petugas sertifikasi.
- ✎ Walaupun terjadi pandemi Covid 19, kegiatan sertifikasi tetap berjalan secara optimal karena audit / pemeriksaan sarana dilakukan secara daring (*online*) dan *onsite*.



D. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Adapun Rekomendasi yang belum dilaksanakan pada TW 4 (Kendala dan Permasalahan).

- ✎ Upaya peningkatan kompetensi evaluator SKE belum dilaksanakan karena belum adanya kegiatan dari BPOM terkait updating informasi maupun regulasi tentang SKE yang melibatkan BBPOM Di Bandung.
- ✎ Meningkatkan pengetahuan pelaku usaha dalam hal regulasi ekspor melalui pemberian informasi kepada pelaku usaha terkait regulasi ekspor

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut:

- ✎ Pada tanggal 26 Maret 2021 evaluator SKE/SKI BBPOM Bandung mengikuti Bimtek SKI Obat yang diselenggarakan oleh Direktorat KMEI Badan POM RI.
- ✎ Untuk meningkatkan pengetahuan pelaku usaha dalam pelayanan SKE, BBPOM Bandung menyelenggarakan FGD Pelayanan Publik pada tanggal 5 Maret 2021.



E. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

4. PERSENTASE SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN

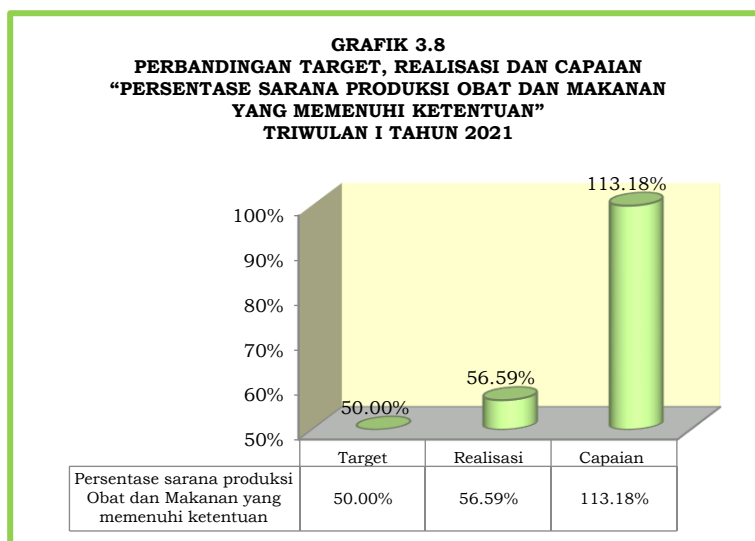
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diukur dengan membandingkan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun n dengan Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa pada tahun n.

**TABEL 3.16
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN
YANG MEMENUHI KETENTUAN”
TRIWULAN I TAHUN 2021**

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00%	48,65%	88,45%	Cukup	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2021

Pada triwulan I tahun 2021, target yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 55%. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2020 sebesar 48,65%.



Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **88,45%** dengan kriteria **Cukup**. Dengan rincian jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebanyak 54 sarana dan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa sebanyak 111 sarana.



B. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAS PENINGKATAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Penurunan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada triwulan I tahun 2021 disebabkan antara lain:

- ☛ Hasil pemeriksaan rutin pada triwulan 1 tahun 2021, pemenuhan kepatuhan GMP sarana produksi makanan sangat rendah yaitu sebesar 27,5% (19 dari 69 sarana yang diperiksa).

Terkait hal tersebut diatas, maka alternatif solusi yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja indikator kegiatan tersebut antara lain :

- ☛ Hasil pemeriksaan sarana produksi pangan yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) akan dijadikan sebagai salah satu aspek pertimbangan dalam kajian resiko penyusunan prioritas pemeriksaan sarana.
- ☛ Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan inspeksi dan hasil tindak lanjut pengawasan.
- ☛ Menyediakan pelayanan *help desk* untuk pelaku usaha yang memerlukan informasi terkait pengelolaan sarana produksi.

C. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Berdasarkan evaluasi sebelumnya, telah dilakukan tindak lanjut pada tahun 2021 sebagai berikut:

- ☛ Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan inspeksi terhadap perencanaan yang dibuat pada awal tahun.
- ☛ Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan serta kemudahan dalam penyampaian CAPA melalui email kantor.

D. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

5. PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diukur dengan membandingkan jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun n dengan jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa pada tahun n.

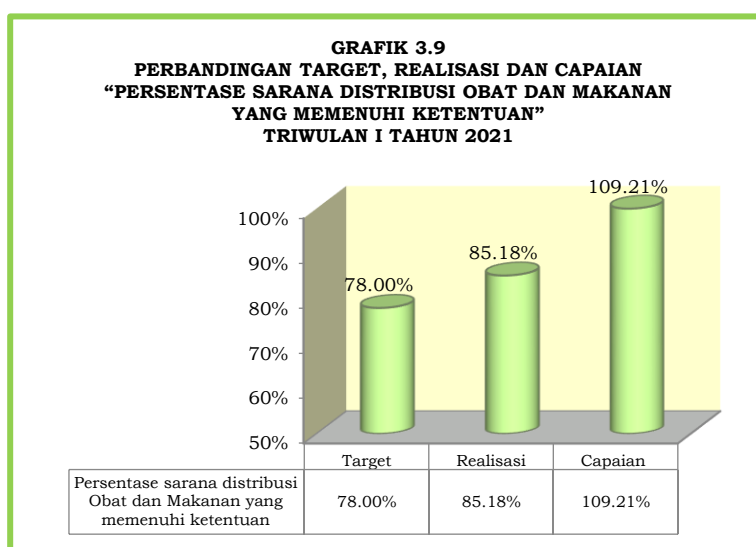


**TABEL 3.17
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN
YANG MEMENUHI KETENTUAN”
TAHUN 2020**

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	78,00%	85,18%%	109,20%	Baik	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2021

Pada triwulan I tahun 2021, target yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan adalah sebesar 78%. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada triwulan I tahun 2021 sebesar 85,18%.



Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **109,21%** dengan kriteria **Baik**. Dengan rincian jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebanyak 385 sarana dan jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa sebanyak 452 sarana.

B. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAS PENINGKATAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Peningkatan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada triwulan I tahun 2021 disebabkan antara lain:

- ☪ Fokus pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Pelayanan Kefarmasian pada awal tahun 2021 yaitu pengawalan vaksin COVID-19 pada sarana pengelolaan obat pemerintah daerah yang pada umumnya kepatuhan pemenuhan ketentuan dalam pendistribusian obat sudah baik.
- ☪ Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi profesi seperti Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Daerah Jawa Barat sehingga membantu



meningkatkan kesadaran penanggung jawab sarana dalam pemenuhan ketentuan pengelolaan obat di sarana pelayanan kefarmasian.

Terkait hal tersebut diatas, maka alternatif solusi yang telah dilakukan dalam rangka memperbaiki capaian kinerja indikator kegiatan tersebut antara lain:

- ☰ Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.
- ☰ Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan inspeksi dan hasil tindak lanjut pengawasan.
- ☰ Menyediakan pelayanan *help desk* untuk pelaku usaha yang memerlukan informasi terkait pengelolaan sarana distribusi.

C. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Berikut adalah kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

- ☰ Pada tanggal 06 Januari 2021 dilaksanakan kegiatan pelatihan Penanganan Vaksin COVID-19 di Sarana Pelayanan Kefarmasian Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat secara daring kepada tenaga kesehatan yang akan mengelola vaksin COVID-19 di daerah.



D. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Berdasarkan evaluasi sebelumnya, telah dilakukan tindaklanjut pada tahun 2021 sebagai berikut:

- ☰ Telah dilakukan monitoring dan evaluasi capaian rekomendasi secara berkala berdasarkan rekomendasi periode sebelumnya.
- ☰ Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan serta kemudahan dalam penyampaian CAPA melalui email kantor.
- ☰ Melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten setempat dan Organisasi Profesi untuk meningkatkan kesadaran penanggung jawab pengelola obat di sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian dalam pemenuhan pedoman teknis pengelolaan obat yang baik.



E. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

6. INDEKS PELAYANAN PUBLIK BBPOM DI BANDUNG

Penilaian kinerja internal Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan BPOM mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yang dilakukan terhadap 6 (enam) aspek, terdiri atas: (1) Kebijakan pelayanan; (2) Profesionalisme SDM; (3) Sarana Prasarana; (4) Sistem Informasi Pelayanan Publik; (5) Konsultasi dan Pengaduan; serta (6) Inovasi.

**TABEL 3.18
KATEGORI NILAI KINERJA UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK**

RANGE NILAI	KATEGORI	MAKNA
0 – 1.00	F	Gagal
1.01 – 1.50	E	Sangat Buruk
1.51 – 2.00	D	Buruk
2.01 – 2.50	C-	Cukup (Dengan Catatan)
2.51 – 3.00	C	Cukup
3.01 – 3.50	B-	Baik (Dengan Catatan)
3.51 – 4.00	B	Baik
4.01 – 4.50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5.00	A	Pelayanan Prima

**SASARAN
KEGIATAN
KE-5**

**MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KOMUNIKASI,
INFORMASI, EDUKASI OBAT DAN MAKANAN DI
WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG**

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dari 4 (empat) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan indikator tersebut, diperoleh capaian sebesar **100,94%** dengan kriteria **Baik**. Hasil Selengkapannya dapat dilihat pada tabel 3.19.



**TABEL 3.19
CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS KE-5
TRIWULAN I TAHUN 2021**

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	89,18	-	-	-	-
2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	42,00	Progress 0%	0%	-	-
3. Jumlah desa pangan aman	19,00	Progress 0%	0%	-	-
4. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	8,00	Progress 0%	0%	-	-
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			-	-	-

1. TINGKAT EFEKTIFITAS KIE OBAT DAN MAKANAN

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Beberapa jenis Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi: (a) KIE melalui media cetak dan elektronik; (b) KIE langsung ke masyarakat; dan (c) KIE melalui media sosial. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria: (a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE; (b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima; (c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE; (d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan. Pengolahan data kuesioner KIE dilakukan oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan Badan POM yang dilakukan setiap semester.

**TABEL 3.20
KATEGORI PENILAIAN
“TINGKAT EFEKTIFITAS KIE OBAT DAN MAKANAN”
TAHUN 2020**

SKOR INDEKS 100	INTERPRESTASI EFEKTIFITAS
<65.00	Kurang Efektif
65.01 - 75.00	Cukup Efektif
75.01 - 85.00	Efektif
85.01 - 95.00	Sangat Efektif
95.01 - 100	Sangat Efektif Sekali



2. JUMLAH SEKOLAH DENGAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH (PJAS) AMAN

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman diukur berdasarkan jumlah sekolah baru yang mendapatkan penghargaan atas penerapan persyaratan keamanan pangan mengacu pada Petunjuk Teknis Piagam Bintang Keamanan Pangan.

**TABEL 3.21
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“JUMLAH SEKOLAH DENGAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH (PJAS) AMAN”
TRIWULAN I TAHUN 2020**

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	42,00	Progress 0%	0%		

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2021

Tahap kegiatan PJAS yang dilaksanakan adalah Advokasi dengan lintas sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah, Pemberian Paket Edukasi/Produk Informasi Keamanan Pangan, Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan di Sekolah, Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman level 1, Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman Level 2 dan Workshop Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan terhadap 26 sekolah di Kabupaten Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Karawang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Purwakarta. Secara rinci progress pelaksanaan kegiatan PJAS dapat dilihat pada tabel berikut.

**TABEL 3.22
PROGRESS PELAKSANAAN KEGIATAN PJAS
TRIWULAN I TAHUN 2020**

KEGIATAN		PEMBOBOTAN PROGRESS (%)	PROGRES (CAPAIAN DJA)				TOTAL PROGRESS
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Adokasi Lintas Sektor PJAS	20	0				0
2	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	20	0				0
3	Pemberian Paket Edukasi/Produk Informasi Keamanan Pangan	15	0				0
4	Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah						



KEGIATAN	PEMBOBOTAN PROGRESS (%)	PROGRES (CAPAIAN DJA)				TOTAL PROGRESS
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
🕌 Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah	5	0				0
🕌 Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah	5	0				0
🕌 Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman Level 1	15	0				0
🕌 Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman Level 2	20					
TOTAL SKOR	100	0				0

B. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAS PENINGKATAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Penurunan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada triwulan I tahun 2021 disebabkan antara lain: Penganggaran kegiatan advokasi hanya untuk 1 Kabupaten, sedangkan pelaksanaan Advokasi ada di 6 Kabupaten/Kota

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain: Melakukan revisi anggaran untuk melaksanakan kegiatan advokasi keamanan pangan terpadu di 6 Kabupaten/Kota yang diintervensi serta melakukan percepatan pelaksanaan audiensi dengan lintas sektor terkait.

C. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Berikut adalah kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja: Berikut adalah kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja:

1. Revisi anggaran kegiatan audiensi sesuai dengan jumlah Kabupaten/Kota terkait.
2. Sudah dilaksanakan audiensi ke satuan kerja perangkat daerah terkait di 6 Kabupaten/Kota yang diintervensi.





**GAMBAR 3.2
AUDIENSI DENGAN LINTAS SEKTOR KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PURWAKARTA**



**GAMBAR 3.3
AUDIENSI DENGAN LINTAS SEKTOR DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAJALENGKA**

D. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

3. JUMLAH DESA PANGAN AMAN

Jumlah desa pangan aman diukur berdasarkan jumlah desa yang memiliki kader keamanan pangan desa yang aktif melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa, dan mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain. Tahapan pelaksanaan kegiatan Pembentukan Desa Pangan Aman: (1) Advokasi Kelembagaan Desa; (2) Bimtek Kader Pembentukan Desa Pangan Aman; (3) Bimtek Komunitas; (4) Fasilitasi Keamanan Pangan; (5) Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan; (6) Monitoring dan Evaluasi Pembentukan Desa Pangan; (7) Lomba Desa; dan (8) Pengawalan. 9 Desa akan diintervensi dengan Tipe A meliputi 2 Desa di Kabupaten



Purwakarta, 2 Kelurahan di Kota Cirebon, 1 Desa di Kabupaten Cirebon, 2 Desa di Kabupaten Majalengka dan 2 Desa di Kabupaten Sumedang. 4 Desa akan diintervensi dengan tipe B berada di Kabupaten Karawang

**TABEL 3.23
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“JUMLAH DESA PANGAN AMAN”
TRIWULAN I TAHUN 2021**

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Jumlah desa pangan aman	19,00	Progress 0%	0%		

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2021

Tahapan Kegiatan Desa Pangan Aman adalah : Advokasi, Bimtek Kader Keamanan Pangan, Bimtek Komunitas Desa, Bimtek Pelaku Usaha Pangan Desa, Fasilitasi Keamanan Pangan I, Fasilitasi Keamanan Pangan II, Workshop Monev, Lomba Desa Pangan Aman dan Pengawalan.

**TABEL 3.24
PROGRESS PELAKSANAAN DESA PANGAN AMAN
TRIWULAN I TAHUN 2021**

KEGIATAN		PEMBOBOTAN PROGRESS (%)	PROGRESS (CAPAIAN DJA)				TOTAL PROGRESS
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Adokasi Kelembagaan Desa	20	0				0
2	Pengadaan gimmick, rapid test kit dll	5	0				0
3	Pengawalan	10	0				0
4	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	15	0				0
5	Bimtek Komunitas	15	0				0
6	Fasilitasi Keamanan Pangan	10	0				0
7	Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan	10	0				0
8	Monitoring dan Evaluasi (pertemuan lintas sektor)	10	0				0
9	Lomba Desa Pangan Aman	5	0				0
TOTAL SKOR		100	0				0



B. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAS PENINGKATAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Penurunan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada triwulan I tahun 2021 disebabkan antara lain: Penganggaran kegiatan advokasi hanya untuk 1 Kabupaten, sedangkan pelaksanaan Advokasi ada di 6 Kabupaten/Kota

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain: Melakukan revisi anggaran untuk melaksanakan kegiatan advokasi keamanan pangan terpadu di 6 Kabupaten/Kota yang diintervensi serta melakukan percepatan pelaksanaan audiensi dengan lintas sektor terkait.

C. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Berikut adalah kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja:

Revisi anggaran kegiatan audiensi sesuai dengan jumlah Kabupaten/Kota terkait

Sudah dilaksanakan audiensi ke satuan kerja perangkat daerah terkait di 6 Kabupaten/Kota yang diintervensi.



**GAMBAR 3.4
AUDIENSI DENGAN LINTAS SEKTOR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
KABUPATEN SUMEDANG**





**GAMBAR 3.5
AUDIENSI DENGAN LINTAS SEKTOR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
KABUPATEN MAJALENGKA**

D. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

4. JUMLAH PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA

Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya diukur berdasarkan jumlah pasar yang mendapat intervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya, mengalami penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya, serta mempunyai rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. Pasar yang mendapat intervensi adalah Pasar yang berada di wilayah Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang.

**TABEL 3.25
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“JUMLAH PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA”
TRIWULAN I TAHUN 2021**

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	8,00	Progress 0%	0%		

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2021

Tahapan pelaksanaan kegiatan pangan aman dan bahan berbahaya adalah : Advokasi, Survei pasar, Bimtek Pengelola Pasar + Materi pelatihan Fasilitator, Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap 1 Pasar, Penyuluhan, Kampanye, Monev Tahap 2 (Sampling dan Pengujian) Pasar, Lomba Pasar Aman



**TABEL 3.26
PROGRESS PELAKSANAAN KEGIATAN PANGAN AMAN
DARI BAHAN BERBAHAYA
TRIWULAN I TAHUN 2021**

KEGIATAN		PEMBOBOTAN PROGRESS (%)	PROGRES (CAPAIAN DJA)				TOTAL PROGRESS
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Adokasi	30	0				0
2	Survey Pasar	5	0				0
3	Bimtek Pengelola Pasar + Materi pelatihan Fasilitator	15	0				0
4	Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap 1 Pasar	20	0				0
5	Penyuluhan	5	0				0
6	Kampanye	5	0				0
7	Monev Tahap 2 (Sampling dan Pengujian) Pasar	20	0				0
8	Lomba Pasar Aman	10	0				0
TOTAL SKOR		100	0				0

B. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAS PENINGKATAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Penurunan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada triwulan I tahun 2021 disebabkan antara lain: Penganggaran kegiatan advokasi hanya untuk 1 Kabupaten, sedangkan pelaksanaan Advokasi ada di 6 Kabupaten/Kota

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain: Melakukan revisi anggaran untuk melaksanakan kegiatan advokasi keamanan pangan terpadu di 6 Kabupaten/Kota yang diintervensi serta melakukan percepatan pelaksanaan audiensi dengan lintas sektor terkait.

C. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Berikut adalah kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja:

Revisi anggaran kegiatan audiensi sesuai dengan jumlah Kabupaten/Kota terkait Sudah dilaksanakan audiensi ke satuan kerja perangkat daerah terkait di 6 Kabupaten/Kota yang diintervensi.





**GAMBAR 3.6
AUDIENSI DENGAN LINTAS SEKTOR
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN MAJALENGKA**

D. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

**SASARAN
KEGIATAN
KE-6**

**MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN
PRODUK DAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN
DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG**

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 2 (dua) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU) dan diukur pada akhir tahun. Dari perhitungan kedua indikator tersebut, diperoleh hasil rata-rata capaian sebesar **101.16%** dengan kriteria **Baik**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**TABEL 3.27
CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-6
TRIWULAN I TAHUN 2021**

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
1. Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	17,50%	14,22%	81,26%	Cukup	
2. Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	22,50%	21,75%	96,65%	Baik	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			88,96%	CUKUP	



1. PERSENTASE SAMPEL OBAT YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR

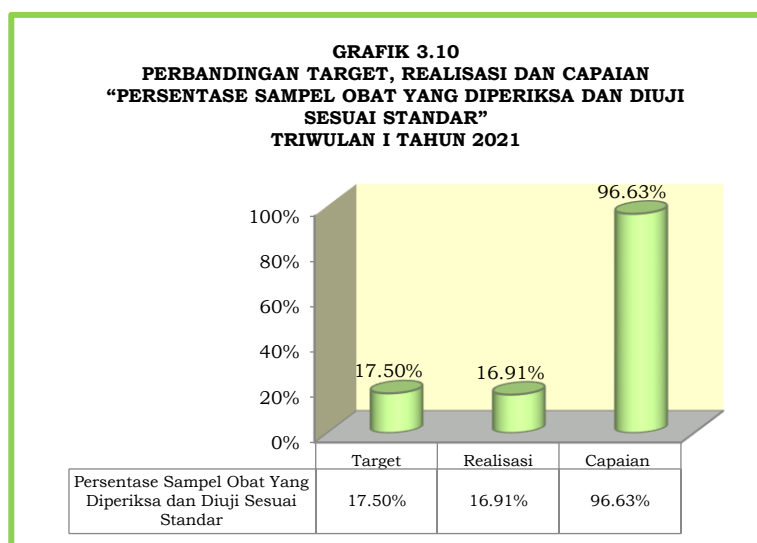
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar diukur dengan cara menjumlahkan persentase sampel Obat yang diperiksa sesuai standar dan persentase sampel Obat yang diuji sesuai standar kemudian dibagi 2 (dua). Persentase sampel Obat yang diperiksa sesuai standar adalah jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar dibagi Jumlah target sampel Obat dikali 100%. Sedangkan persentase sampel Obat yang diuji sesuai standar adalah jumlah sampel obat yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel Obat dikali 100%.

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Definisi operasional sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

TABEL 3.28
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE SAMPEL OBAT YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR”
TRIWULAN I TAHUN 2021

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Persentase Sampel Obat Yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	17,50%	14,22%	81,26%	Cukup	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2020



Pada triwulan I, jumlah sampel obat yang disampling sebanyak 685 sampel dan jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar sebanyak 276 sampel. Dari data tersebut, diperoleh nilai persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji



sesuai standar sebesar 14,22%. Target pada triwulan I yang telah ditetapkan sebesar 17,50%, dengan demikian nilai pencapaian sasaran indikator tersebut adalah sebesar **81,26%** dengan kriteria **Cukup**.

B. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAS PENINGKATAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Kegagalan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada triwulan I tahun 2021 disebabkan antara lain :

- ☼ Tidak tercapainya target pada sasaran kegiatan persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar karena sampel baru masuk ke laboratorium pada bulan Februari 2021 dan 102 sampel masuk ke laboratorium pada tanggal 19 Maret 2021 sehingga mengurangi waktu pengujian.
- ☼ Pada bulan Februari 2021 terdapat 3 orang staf labotarorium obat tradisional dan suplemen kesehatan yang terkonfirmasi positif Covid-19 dan harus menjalani isolasi mandiri.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

- ☼ Koordinasi sampling dan pengujian yang lebih baik, sehingga tidak terjadi penumpukan pengujian pada saat bersamaan.
- ☼ Telah dilakukan penyesuaian jam kerja dengan sistem *Work From Home* terkait terpaparnya beberapa pegawai yang terkonfirmasi positif Covid-19, dengan tetap menjalankan protokol kesehatan ketat.
- ☼ Telah dilakukan peningkatan kompetensi SDM dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pengujian melalui pelatihan atau webinar-webinar. Dengan adanya pelatihan ini terjadi peningkatan pengetahuan dan keterampilan dari personel penguji.
- ☼ Telah dilakukan peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, baik pemeriksaan sampel obat maupun pengujian obat sehingga pemeriksaan dan pengujian Obat sehingga dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

C. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Berikut adalah kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian kinerja :

- ☼ Koordinasi sampling dan pengujian yang kurang baik, sehingga sampel baru masuk ke laboratorium pada bulan Februari 2021 dan sebanyak 102 sampel masuk ke laboratorium pada tanggal 19 Maret 2021 sehingga mengurangi waktu pengujian.



D. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut :

- ☰ Telah dilakukan penyesuaian jam kerja dengan tetap memperhatikan pemenuhan target kinerja yang direncanakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kerja Balai Besar POM di Bandung sehingga target tahun 2020 dapat tercapai dengan optimal. Dengan penyesuaian ini, dilakukan penjadwalan pengujian dan pemakaian alat uji, sehingga pengujian dapat berjalan efisien dan efektif.
- ☰ Telah dilakukan peningkatan kompetensi SDM dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pengujian melalui pelatihan atau webinar-webinar. Dengan adanya pelatihan ini terjadi peningkatan pengetahuan dan keterampilan dari personel penguji.
- ☰ Telah dilakukan peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, baik pemeriksaan sampel obat maupun pengujian obat sehingga pemeriksaan dan pengujian Obat sehingga dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

E. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

2. PERSENTASE SAMPEL MAKANAN YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diukur dengan cara menjumlahkan persentase sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar dan persentase sampel Makanan yang diuji sesuai standar kemudian dibagi 2 (dua). Persentase sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar adalah jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar dibagi Jumlah target sampel Makanan dikali 100%. Sedangkan persentase sampel Makanan yang diuji sesuai standar adalah jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel Makanan dikali 100%.

Definisi operasional sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

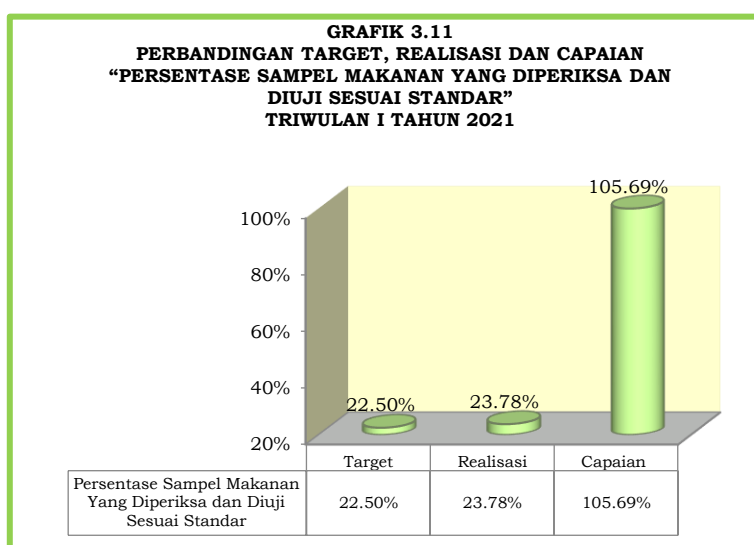


**TABEL 3.29
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE SAMPEL MAKANAN YANG DIPERIKSA
DAN DIUJI SESUAI STANDAR”
TRIWULAN I TAHUN 2021**

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Persentase Sampel Makanan Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar	22,50%	21,75%	96,65%	Baik	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2021

Pada triwulan I tahun 2021, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 22,50%. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada triwulan I tahun 2021 sebesar 21,75%, dengan rincian



jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar sebesar 27,15% (sebanyak 313 sampel dibandingkan terhadap jumlah target sampel Makanan sebanyak 1153 sampel) dan jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar sebesar 16,35% (sebanyak 229 sampel dibandingkan terhadap jumlah sampel Makanan yang diuji sebanyak 1401 sampel). Dengan demikian nilai pencapaian sasaran indikator tersebut adalah sebesar **96,65%** dengan kriteria **Baik**.

B. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAS PENINGKATAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Kebhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada triwulan I tahun 2021 disebabkan antara lain :

- 🕌 Kondisi pandemi Covid 19 masih berlangsung pada tahun 2021, sehingga masih berlaku adanya sistem *work from home*. Pengaturan sistem kerja ini diatur sedemikian rupa sehingga jam kerja tetap efektif dan efisien. Hal ini ditandai dengan tercapainya sasaran kegiatan ini.



- Target yang ditetapkan utk sampel yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah 22,50% dan realisasinya sebesar 21,75% (sampel diperiksa sesuai standar sebesar 27,15% : sebanyak 313 sampel dari 1153 sampel yang ditargetkan, sedangkan untuk sampel yang diuji sesuai standar sebesar 16,35% : 229 sampel dari 1401 target sampel yang diuji). Pencapaian ini apabila kita analisis diakibatkan oleh adanya perubahan strategi dalam pengujian sampel. Hal –hal yang dilakukan antara lain adalah pembuatan tim-tim kecil dalam proses pengujian, penjadwalan yang lebih ketat dan pengaturan penggunaan alat uji yang lebih baik.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

- Koordinasi sampling dan pengujian yang lebih baik, sehingga tidak terjadi penumpukan pengujian pada saat bersamaan.
- Pembuatan jadwal untuk proses pengujian dan penggunaan alat uji yang lebih tepat, sehingga lebih efisien dan efektif.
- Peningkatan kompetensi SDM dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengujian melalui pelatihan atau webinar sesuai perkembangan terkini, baik dari segi kompetensi teknis maupun kompetensi manajerial.
- Peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengujian sesuai target yang ditetapkan agar efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat meningkat.

C. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Berikut adalah kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja :

- Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung terlaksananya efektivitas pengujian obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandung adalah peningkatan kompetensi dan kapabilitas personel melalui pelatihan dan webinar-webinar. Sampai dengan triwulan I tahun 2021 terdapat beberapa webinar yang diikuti oleh personel laboratorium kimia pangan, yaitu 1). Pentingnya preparasi sampel dalam analisis kromatografi; 2). Pentingnya *Spektroskopi Raman* untuk identifikasi dan verifikasi zat aktif dalam obat secara cepat; 3). Menilai Kelayakan Mikropipet berdasarkan Persyaratan ISO 8655-2.
- Monitoring dan Evaluasi Kegiatan yang dilakukan secara rutin. Rapat Monev Kinerja Bulanan yang dipimpin oleh Plt. Kepala Balai Besar POM di Bandung



dan dihadiri oleh seluruh Koordinator/SubKoordinator yang diselenggarakan secara Luring dan Daring.

D. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut :

- ☰ Dalam rangka mendukung terlaksananya efektivitas pengujian obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandung maka Laboratorium Balai Besar POM di Bandung harus handal dengan dilengkapi oleh alat laboratorium yang lengkap, sehingga seluruh parameter uji kritis yang ditetapkan dalam standar pedoman sampling dan timeline telah sesuai dengan pedoman/SOP yang telah ditetapkan.
- ☰ Triwulan I tahun 2021 masih terkendala pandemic Covid-19, sehingga masih dilakukan penyesuaian jam kerja dengan tetap memperhatikan pemenuhan target kinerja yang direncanakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kerja Balai Besar POM di Bandung sehingga target triwulan I tahun 2021 dapat tercapai. Dengan penyesuaian ini, dilakukan penjadwalan pengujian dan pemakaian alat uji, sehingga pengujian dapat berjalan efisien dan efektif.
- ☰ Telah dilakukan peningkatan kompetensi SDM dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pengujian melalui pelatihan atau webinar-webinar yaitu 1). Pentingnya preparasi sampel dalam analisis kromatografi; 2). Pentingnya *Spektroskopi Raman* untuk identifikasi dan verifikasi zat aktif dalam obat secara cepat; 3). Menilai Kelayakan Mikropipet Berdasarkan Persyaratan ISO 8655-2. Dengan adanya webinar ini terjadi peningkatan pengetahuan dari personel penguji kimia pangan.
- ☰ Telah dilakukan peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, baik pemeriksaan sampel makanan maupun pengujian makanan sehingga pemeriksaan dan pengujian makanan dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

E. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.



**SASARAN
KEGIATAN
KE-7**

**MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENINDAKAN
KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH
KERJA BBPOM DI BANDUNG**

KE-1

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator yang merupakan indikator kinerja utama (IKU) yaitu persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung. Dari perhitungan 1 (satu) indikator tersebut, diperoleh capaian sebesar **52,17%** dengan kriteria **Kurang**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.30.

TABEL 3.30
CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS KE-7
TAHUN 2020

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	46,00%	24,00%	52,17%	Kurang	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			52,17%	KURANG	

**PERSENTASE KEBERHASILAN PENINDAKAN KEJAHATAN DI
BIDANG OBAT DAN MAKANAN**

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT. Tahapan Penindakan antara lain: (a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan); (b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)); (c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) dan (d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum). Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus sedangkan jumlah perkara yang dihitung adalah perkara yang telah diterbitkan SPDP-nya kepada Kejaksaan melalui Korwas PPNS.



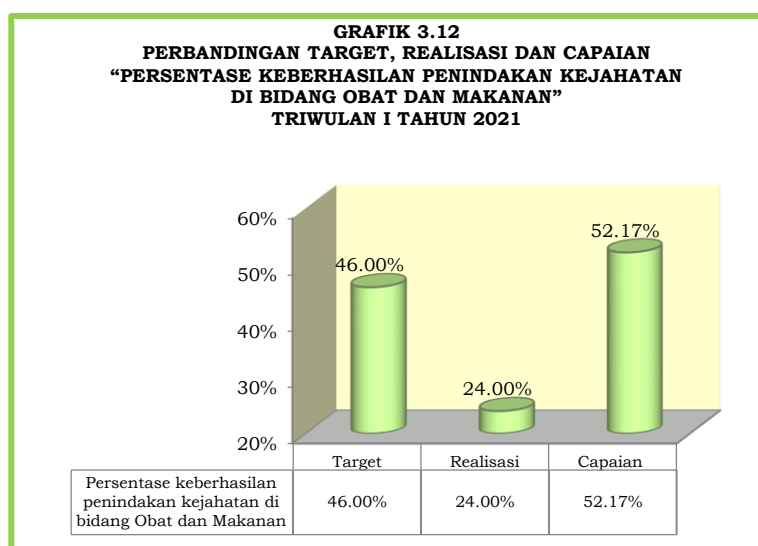
Cara untuk menghitung persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan adalah dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

- SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- P21 sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$

Nilai Tingkat Keberhasilan =

$$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian} / \text{target perkara})$$

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2021



Pada triwulan I tahun 2021, target yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan ini adalah sebesar 46,00%. Realisasi kinerja untuk sasaran kegiatan ke-7 sebesar 24,00% sehingga capaian indikator sasaran kegiatan ke-7

sebesar **52.17%** dengan kriteria **Kurang**. Secara rinci dijelaskan pada tabel berikut.

TABEL 3.31
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
"PERSENTASE KEBERHASILAN PENINDAKAN KEJAHATAN
DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN"
TRIWULAN I TAHUN 2021

Tahapan	s.d Maret										
	Target		Realisasi		Koefisie n Tahun Berjalan	Koefisie n Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d Triwulan n	Perkara Carry Over							
SPDP	16	16	3	2	1.00		0.15	15.00%	40.43%	59.38%	24.00%
Tahap I			0	4	0.00	0.74	0.4	16.00%			
P21			0	8	0.00	0.53	0.3	8.57%			
Tahap II			0	2	0.00	0.11	0.15	0.86%			
Total	16	16	3	16							



**TABEL 3.32
RINCIAN NILAI KEEKONOMIAN BARANG BUKTI YANG DITANGANI
SD TRIWULAN I TAHUN 2021**

JENIS BARANG BUKTI	NILAI TAKSIRAN SITAAN			
	PRO JUSTITIA		NON PRO JUSTITIA	
Pangan	Rp.	47.525.000	Rp.	
Obat	Rp.	257.333.392	Rp.	
Kosmetika	Rp.		Rp.	
Obat Tradisional	Rp.		Rp.	
Jumlah	Rp.		Rp.	
TOTAL KESELURUHAN	RP. 304.858.392			

B. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAS PENINGKATAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Penurunan dalam pencapaian kinerja sasaran ini disebabkan oleh:

-  Kekosongan Koordinator Kelompok Substansi Penindakan di awal tahun. Mulai dari bulan Oktober 2020 sampai awal Februari 2021, jabatan Koordinator Kelompok Substansi Penindakan diisi oleh Plt yang juga merangkap sebagai Koordinator Kelompok Substansi Pengujian. Hal ini menyebabkan kurang maksimalnya kinerja Bidang Penindakan di awal tahun.
-  Redistribusi pegawai dari dan ke dalam Kelompok Substansi Penindakan. Adanya perpindahan pegawai dari Kelompok Substansi Penindakan ke Kelompok Substansi lain cukup berpengaruh terhadap proses rantai kegiatan bidang penindakan yang harus berkesinambungan. Salah satu pegawai yang terkena mutasi cukup berpengalaman dan memiliki jejaring informasi yang luas. Dengan dipindahnya petugas tersebut, pengalaman dan jejaring informasi yang sudah terbentuk hilang. Kelompok Substansi Penindakan juga menerima pegawai lain sebagai tambahan personil namun harus membuat jejaring informasi kembali karena sebagian besar pegawai yang dipindah ke Kelompok Substansi Penindakan adalah orang baru. Permasalahan ini sangat berpengaruh terhadap kinerja penindakan karena untuk dapat membangun jejaring informasi yang kuat dibutuhkan waktu yang lama. Selain itu, informasi terhadap target operasi adalah kunci dari berjalannya rantai kegiatan bidang penindakan.
-  Redistribusi pegawai dari luar daerah. Ada beberapa pegawai yang diredistribusi ke Kelompok Substansi Penindakan Balai Besar POM di Bandung yang berasal dari luar daerah. Pegawai redistribusi ini menambah kekuatan personel di Kelompok Substansi Penindakan tapi membutuhkan waktu untuk bisa beradaptasi. Adaptasi harus dilakukan melihat banyaknya perbedaan mulai dari perbedaan budaya, perbedaan sistem kerja, perbedaan cara komunikasi, perbedaan lingkungan kerja, dan perbedaan lain. Adaptasi



ini membutuhkan waktu agar pegawai dan unit kerja barunya bisa bersinergi dan menghasilkan kinerja yang maksimal.

- ☰ Pandemi Covid 19 menghambat proses rantai kegiatan penindakan yang seharusnya berkesinambungan dimulai dari pengumpulan bahan keterangan, pendalaman informasi, operasi penindakan dan proses pemberkasan.
- ☰ Adanya aturan dan kebijakan baru yang disebabkan oleh Pandemi Covid 19 dalam proses koordinasi dan pemberkasan cukup menghambat proses penyelesaian berkas perkara.
- ☰ Adanya perubahan modus operandi kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang semakin berkembang antara lain: maraknya penjualan produk ilegal secara *online*, banyaknya *footloose* sarana produksi dan sarana distribusi, jam operasional yang tidak menentu/acak menyebabkan banyaknya operasi penindakan yang dilakukan tidak berhasil karena tutup, berpindah tempat dan tidak menemukan alat bukti yang cukup.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- ☰ Kelompok Substansi Penindakan Balai Besar POM di Bandung mulai membangun jejaring informasi kembali yang tidak berfokus kepada satu pegawai. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan intelijen, pegawai yang ditugaskan diharapkan mampu mendapat informan baru guna membangun jaringan yang lebih luas
- ☰ Untuk mempercepat proses adaptasi pegawai baru, dalam tim yang bertugas selalu disusun kombinasi antara petugas lama dan petugas baru. Hal ini diharapkan mampu mempercepat proses adaptasi dan pengenalan pegawai baru.
- ☰ Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait aturan dan kebijakan baru yang disebabkan oleh Wabah/pandemic *Corona*.
- ☰ Meningkatkan koordinasi dengan Direktorat Intelijen dan pihak terkait lain mengenai tindak lanjut dari Patroli Siber yang sudah dilakukan agar dapat mengungkap informasi penjualan produk ilegal secara *online*

C. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Dalam mendukung tercapainya sasaran kegiatan ke-7, yaitu: “Meningkatnya Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Bandung” dilaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan melalui 2 (dua) kegiatan yaitu: (1) Penyidikan obat dan makanan; dan (2) Dukungan Teknis Investigasi Awal di Bidang Obat dan Makanan. Kedua kegiatan tersebut merupakan salah satu fungsi Balai Besar POM di Bandung sebagaimana



yang diamanatkan oleh Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM, yaitu: Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Penyidikan Obat dan Makanan

Pada triwulan I tahun 2021, jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan yang ditangani sebanyak 3 perkara. Selain itu, terdapat 1 perkara yang dilimpahkan ke Detasemen Polisi Militer sesuai prosedur. Perkara adalah kasus yang ditindak lanjuti secara pro justicia berdasarkan hasil gelar perkara. Sedangkan jumlah perkara yang dihitung adalah perkara yang telah diterbitkan SPDP-nya kepada Kejaksaan melalui Korwas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). 3 perkara yang ditangani Kelompok Substansi Penindakan terdiri dari 2 perkara distribusi obat tanpa kewenangan di Wilayah Sukabumi dan 1 perkara produksi pangan Mie Basah dengan mencampurkan bahan berbahaya (formalin) di Wilayah Cileungsi, Bogor. Proses penyidikan atas 3 perkara tindak pidana di bidang obat dan makanan masih berlanjut dan diharapkan dapat selesai tahap 2 di tahun berjalan.



**GAMBAR 3.7
KEGIATAN PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN**



🕌 Investigasi Awal

Kegiatan investigasi awal adalah kegiatan untuk memastikan adanya dugaan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan dari informasi dari masyarakat, temuan hasil pemeriksaan, pengaduan masyarakat melalui Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi berdasarkan surat dari Badan POM RI, pengembangan kasus yang ditangani, serta penelusuran melalui media online. Kegiatan investigasi awal yang dilakukan pada triwulan 1 tahun 2021 terhadap 15 sarana, namun hanya 7 sarana yang terindikasi melakukan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan. Dari jumlah tersebut, 4 sarana ditindaklanjuti dengan kegiatan penindakan dengan output kasus pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan sebanyak 4 kasus, terdiri dari 3 kasus Pro-justitia ditangani Balai Besar POM di Bandung, dan 1 kasus Pro-justitia dilimpahkan ke Detasemen Polisi Militer.

D. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Rekomendasi untuk pencapaian sasaran ini pada tahun sebelumnya dan rekomendasi tahun 2021 bertumpu pada peningkatan kualitas SDM terkait penyidikan obat dan makanan serta peningkatan koordinasi lintas sektor khususnya dengan *Criminal Justice System (CJS)*.

Tindak lanjut yang telah dilakukan pada triwulan 1 tahun 2021 terhadap rekomendasi yang telah diberikan antara lain:

- 🕌 Peningkatan kompetensi SDM baik dari segi kompetensi teknis ataupun manajerial yang telah dilaksanakan Balai Besar POM di Bandung. Penunjukan peserta disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi staf untuk memperkecil perbedaan/gap kompetensi masing-masing individu. Salah satu contoh kegiatan ini adalah Workshop Manajemen Intelijen di Soreang. Didalam kegiatan ini terdapat beberapa materi yang disampaikan oleh Tim dari Pusat Pendidikan Intelijen POLRI. Penunjukan peserta juga disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, peserta yang mengikuti kegiatan ini Alex Sander, S.Farm Apt.,MH dan Angga Nugraha S.Si. Selain kegiatan ini, ada beberapa kegiatan peningkatan kompetensi SDM yang sudah direncanakan dan akan dilaksanakan mulai dari Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV.
- 🕌 Peningkatan koordinasi internal dan lintas sektor pada saat akan, selama dan setelah proses penindakan dilaksanakan secara intensif terutama dengan Korwas PPNS POLDA Jabar, Jaksa Penuntut Umum serta Biro Hukum dan Organisasi Badan POM RI, baik untuk percepatan penyelesaian berkas



perkara ataupun untuk menghadapi pra peradilan perkara yang ditangani penyidik Balai Besar POM di Bandung.

- ✎ Pelaksanaan “Pertemuan Peningkatan Koordinasi dan Sinergisme Dalam Rangka Integrated Criminal Justice System (ICJS)” yang rencananya akan dilaksanakan pada Triwulan IV tahun 2021.

E. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

SASARAN KEGIATAN KE-8

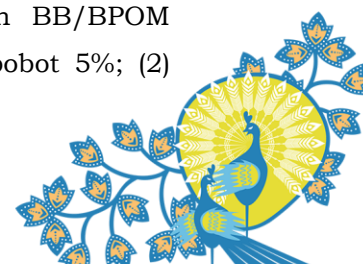
TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN BBPOM DI BANDUNG YANG OPTIMAL

K keberhasilan sasaran strategis ini diukur dari 2 (dua) indikator yang merupakan indikator kinerja utama (IKU) dan diukur pada akhir tahun anggaran.

1. INDEKS RB BBPOM DI BANDUNG

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM: (1) Manajemen Perubahan: bobot 5%; (2)



Penataan Tatalaksana: bobot 5%; (3) Penataan Sistem Manajemen SDM: bobot 15%; (4) Penguatan Akuntabilitas Kinerja: bobot 10%; (5). Penguatan Pengawasan: bobot 15%; dan (6) Penguatan Kualitas Pelayanan Publik: bobot 10%. Rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM: (1) Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN: bobot 20%; (2) Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat: bobot 20%.

2. INDEKS AKIP BBPOM DI BANDUNG

SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan Reformasi Birokrasi yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai AKIP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Indikator Nilai AKIP tersebut dihitung melalui penilaian evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Balai Besar POM di Bandung yang dilakukan oleh Inspektorat Badan POM RI.

SASARAN KEGIATAN KE-9

TERWUJUDNYA SDM BBPOM DI BANDUNG YANG BERKINERJA OPTIMAL

KE-9
K eberhasilan sasaran strategis ini diukur dari 1 (satu) indikator yang merupakan indikator kinerja utama (IKU) dan diukur pada akhir tahun anggaran.

INDEKS PROFESIONAL ASN BBPOM DI BANDUNG

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu: (1) Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai; (2) Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan; (3) Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS; dan (4)



Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami. Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT yang dipersiapkan oleh Biro Umum dan SDM Badan POM.

**SASARAN
KEGIATAN
KE-10**

**MENGUATNYA LABORATORIUM PENGELOLAAN
DATA DAN INFORMASI PENGAWASAN OBAT DAN
MAKANAN**

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 2 (dua) indikator, yaitu 1) Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP (diukur pada akhir tahun anggaran) dan 2) Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal (diukur setiap triwulan). Keduanya merupakan indikator kinerja utama (IKU).

**1. PERSENTASE PEMENUHAN LABORATORIUM
PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN SESUAI SESUAI
STANDAR GLP**

Pada tahun 2020 telah diterbitkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.01.1.2.11.20.1114 tahun 2020 tentang Standar Kemampuan Laboratorium Badan POM yang berlaku untuk tahun 2020-2024. Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) ini merupakan acuan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi pemenuhan SKL di Badan POM sebagai upaya penguatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium Badan POM.

Penilaian kemampuan laboratorium dilakukan terhadap 3 (tiga) parameter yaitu pemenuhan Standar Ruang Lingkup (SRL), Standar Kompetensi dan Standar Peralatan. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (P3OMN) dengan menggunakan tools penilaian sesuai Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.01.1.2.11.20.1115 tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Kemampuan Laboratorium Badan POM.

Metode penilaian yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penilaian Standar Ruang Lingkup (SRL)

Pemenuhan terhadap SRL pengujian menggunakan bukti Catatan Pengujian/Lembar Catatan Pengujian (CP/LCP). Hasil Uji Profisiensi yang inlier. Hasil Uji Kolaborasi yang diikuti untuk pengujian terkait. Perhitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh parameter yang mempunyai angka 1 dan dibagi dengan target kemudian dikalikan dengan 100%.

2. Penilaian Standar Kompetensi



Komponen penilaian kompetensi terdiri dari Pengetahuan dan Keterampilan. Bukti fisik untuk aspek pengetahuan adalah sertifikat pelatihan/bukti pelatihan/bukti diseminasi/surat keterangan supervisi tentang pelatihan terkait. Bukti fisik untuk keterampilan berupa CP/LCP pengujian minimal melakukan satu kali pengujian terkait parameter yang dimaksud/Laporan Pengujian hasil supervisi.

- ☰ Hitung nilai kompetensi masing-masing personel yang terdapat pada Formulir Informasi Kompetensi. Hasil sudah dinyatakan dalam persen (%).
- ☰ Hasil perhitungan kompetensi personel dari masing-masing laboratorium direkap pada Rekapitulasi Persentase Pemenuhan Kompetensi Personel.
- ☰ Hasil Rekapitulasi masing-masing Laboratorium kemudian digabungkan pada Profil Kompetensi Personel Penguji.

3. Penilaian Standar Peralatan

- ☰ Untuk perhitungan persentase masing-masing alat adalah jumlah alat yang dimiliki dibagi dengan standar dikalikan 100%.
- ☰ Untuk jumlah alat yang angka persentasenya lebih dari 100% maka angka yang digunakan adalah 100%.
- ☰ Pemenuhan standar peralatan dihitung dengan menjumlah persentase seluruh peralatan dibagi dengan jumlah jenis peralatan yang tercantum pada standar.

Pada triwulan I, belum dilakukan pengukuran terhadap realisasi kinerja indikator sasaran ini, karena pengukuran dilakukan pada akhir tahun anggaran 2021. Pada triwulan I tahun 2021, telah disusun roadmap Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) untuk tahun 2021-2024 serta perencanaan pemenuhan SKL triwulanan tahun 2021. Sampai dengan triwulan I pemenuhan SKL yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1). Peningkatan Standar Ruang Lingkup : Penambahan kemampuan uji laboratorium kimia obat (penambahan 4 ruang lingkup); laboratorium kimia kosmetik (penambahan 3 ruang lingkup); laboratorium kimia obat tradisional dan suplemen kesehatan (penambahan 4 ruang lingkup) dan laboratorium mikrobiologi (penambahan 4 ruang lingkup);
- 2). Peningkatan Standar Kompetensi : kegiatan bimbingan teknis dan webinar terkait teknis laboratorium untuk meningkatkan pengetahuan personil pengujian, antara lain Pelatihan Angka Enterobacteriaceae, Pelatihan Sekuensing DNA mikroba atau DNA spesifik spesies, webinar Pentingnya Preparasi Sampel dalam Analisis Kromatografi, webinar Pentingnya Spektroskopi Raman untuk Identifikasi dan Verifikasi Zat Aktif dalam Obat secara Cepat, webinar Menilai Kelayakan Mikropipet Berdasarkan Persyaratan ISO 8655-2;
- 3). Peningkatan Standar Alat Laboratorium : Pada triwulan I telah dibuat rencana pemenuhan penambahan beberapa alat laboratorium untuk meningkatkan alat laboratorium sesuai standar GLP. Pada subkoordinator substansi Pengujian Kimia,



direncanakan di triwulan III tahun 2021 ada penambahan sebanyak 4 alat (Microwave Digester, Fume Hood, Water Bath dan lemari pendingin). Pada subkoordinator substansi Pengujian Mikrobiologi direncanakan di triwulan III tahun 2021 ada penambahan sebanyak 10 alat terkait laboratorium uji COVID-19, yaitu Real Time PCR dan alat-alat pendukung lainnya seperti micropipette dan Laminar Air Flow (PCR Cabinet).

2. INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI BBPOM DI BANDUNG YANG OPTIMAL

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen: (1). Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut: SIPT, SPIMKer Data Keracunan. (2). Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup: email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai. Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

SASARAN KEGIATAN KE-11

TERKELOLANYA KEUANGAN BBPOM DI BANDUNG SECARA AKUNTABEL

KE-11
Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 2 (dua) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan kedua indikator tersebut, diperoleh nilai pencapaian sasaran tersebut sebesar **105,05%** dengan kriteria **Baik**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.33.



**TABEL 3.33
CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS KE-11
TRIWULAN I TAHUN 2021**

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
1. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	24,00	36.92	153.83	Tidak Dapat Disimpulkan	
2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Bandung	Efisien (92%)	Efisien (75%)	81,52%	Cukup	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			117.68	SANGAT BAIK	

1. NILAI KINERJA ANGGARAN BBPOM DI BANDUNG

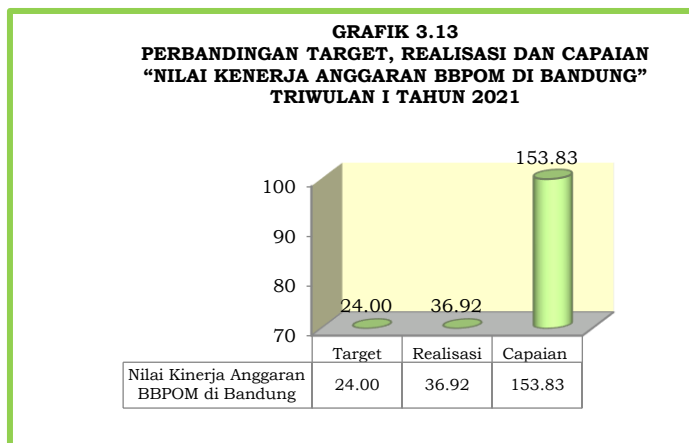
Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain: (1) Revisi DIPA; (2) Deviasi Halaman III DIPA; (3) Pengelolaan UP; (4) Rekon LPJ Bendahara; (5) Data Kontrak; (6) Penyelesaian Tagihan; (7) Penyerapan Anggaran; (8) Retur SP2D; (9) Perencanaan Kas (Renkas); (10) Pengembalian/Kesalahan SPM; (11) Dispensasi Penyampaian SPM; (12) Pagu Minus; dan (13) Konfirmasi Capaian Output.

**TABEL 3.34
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“NILAI KINERJA ANGGARAN BBPOM DI BANDUNG”
TRIWULAN I TAHUN 2021**

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	24,00	36.92	153.83	Tidak Dapat Disimpulkan	



A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2021



Pada triwulan I tahun 2021 target yang ditetapkan sebesar 24,00. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung triwulan I tahun 2021 sebesar 36,92. Dengan demikian capaian kinerja indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **153,83%** dengan

kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**. Dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 3.35
PERHITUNGAN NILAI KINERJA ANGGARAN BBPOM DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2021

EKA	IKPA	CAPAIAN
0	92.20	36.62

TABEL 3.36
NILAI INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)
BBPOM DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2021



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

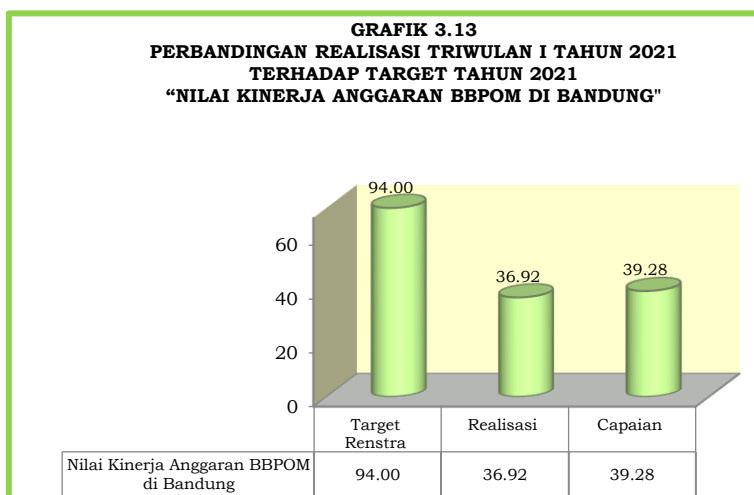
Sampai Dengan : MARET

No	Kode KPPN	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan			Kepatuhan Terhadap Regulasi			Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan				Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan		Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)	
					Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Pagu Minus	Data Kontrak	Pengelolaan UP dan TUP	LPJ Bendahara	Dispensasi SPM	Penyerapan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Capaian Output	Retur SP2D	Renkas				Kesalahan SPM
1	095	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	Nilai	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	69.20	100.00	47.72	100.00	0.00	80.00	67.38	73%	92.30	
				Bobot	5	0	5	10	8	5	5	15	10	0	5	0				5
				Nilai Akhir	5.00	0.00	5.00	10.00	8.00	5.00	5.00	10.38	10.00	0.00	5.00	0.00				4.00
				Nilai Aspek	200.00			100.00			105.64				80.00					
Disclaimer: Sesuai PER-4/PB/2021, untuk periode Triwulan I TA 2021 tidak dilakukan penilaian IKPA untuk indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Capaian Output																				



B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2021 DENGAN TARGET TAHUN 2021

Target Tahun 2021 yang ditetapkan sebesar 94,00. Jika realisasi kinerja pada triwulan I tahun 2021 dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja sebesar 39,28%. Secara lengkap dapat dilihat pada grafik 3.13.



C. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Peningkatan pencapaian kinerja disebabkan antara lain oleh:

- ☰ Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan pelaksanaan anggaran setiap rincian output dan sasaran kegiatan yang dilakukan setiap bulan dengan melibatkan pimpinan, sehingga pimpinan dapat menentukan arah kebijakan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran pada periode selanjutnya.
- ☰ Peningkatan kinerja pengelolaan APBN pada satker BBPOM di Bandung, antara lain: pertanggungjawab UP dan TUP tepat waktu, penyampaian data kontrak dan LPJ Bendahara tepat waktu, penyelesaian tagihan tepat waktu.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain:

- ☰ Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan pelaksanaan anggaran setiap rincian output dan sasaran kegiatan secara berkala.
- ☰ Pelaporan Kinerja melalui aplikasi kinerja dilakukan tepat waktu.
- ☰ Percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
- ☰ Upaya mengurangi kesalahan SPM dengan meningkatkan kompetensi SDM Pengelola APBN.
- ☰ Realokasi dan Refocussing anggaran untuk kegiatan prioritas antara lain : Kegiatan KIE dengan Tokoh Masyarakat dengan penambahan jumlah peserta KIE dan penambahan daya listrik untuk laboratorium BSL2 serta kegiatan dalam rangka Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM.



**D. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN
ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA**

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pernyataan kinerja sebagai berikut:

- ☛ Kegiatan Sosialisasi Keuangan yang diselenggarakan pada tanggal 09 Februari 2021 secara daring dan diikuti oleh 75 peserta dari BBPOM di Bandung, Loka POM di Kota Tasikmalaya dan Loka POM di Kabupaten Bogor. Narasumber dari KPPN Bandung II. Tujuan penyelenggaraan ini adalah meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terkait peraturan-peraturan pengelolaan keuangan yang terkini dan mendapatkan masukan dan saran dalam Peningkatan Nilai EKA dan IKPA.



**GAMBAR 3.8
SOSIALISASI KEUANGAN**

- ☛ Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja yang dilakukan setiap bulan yang dipimpin oleh Plt. Kepala Balai Besar POM di Bandung yang dihadiri oleh Bidang/Kelompok Substansi yang diselenggarakan secara luring dan daring. Kegiatan bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dan merumuskan rencana tindak lanjut untuk kegiatan bulan berikutnya serta monitoring terhadap progress realisasi anggaran dan mengukur tingkat efisiensi kegiatan dan sasaran kegiatan.



**GAMBAR 3.9
RAPAT MONEV KINERJA DAN ANGGARAN YANG DISELENGGARAKAN
SETIAP BULAN**



E. TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

Rekomendasi untuk meningkatkan nilai kinerja anggaran BBPOM di Bandung pada periode berikutnya adalah:

- ☰ Melakukan langkah-langkah untuk memenuhi seluruh indikator pembentuk EKA dan IKPA.
- ☰ Melakukan review terhadap *Plan of Action* yang telah disusun agar pada Triwulan II dapat mencapai target serapan anggaran sebesar 40% sesuai Surat Edaran Nomor : HK.02.02.2.21.04.21.11 tentang Target Rencana Penarikan Dana (RPD) Per Triwulan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2021.
- ☰ Percepatan pelaksanaan kegiatan khususnya pengadaan Barang dan Jasa dan percepatan petanggungjawaban keuangan.

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

2. TINGKAT EFISIENSI ANGGARAN BBPOM DI BANDUNG

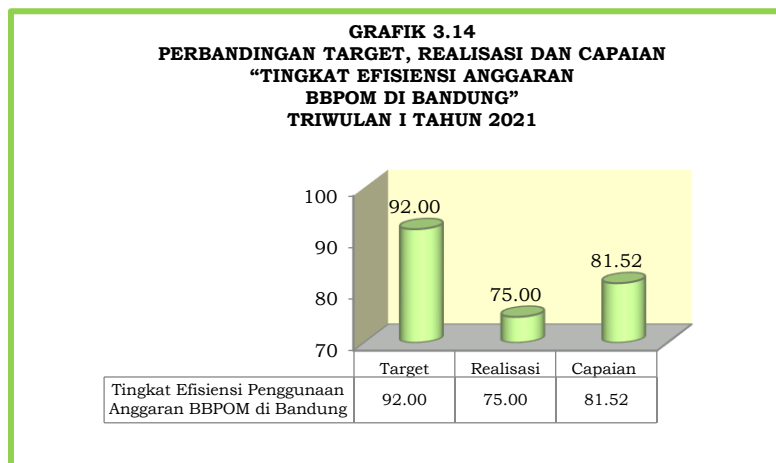
Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.

**TABEL 3.10
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“TINGKAT EFISIENSI ANGGARAN BBPOM DI BANDUNG”
TRIWULAN I TAHUN 2021**

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Bandung	Efisien (92%)	Efisien (75%)	81,52%	Cukup	



A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2021



Pada triwulan I tahun 2021 target yang ditetapkan sebesar 92,00. Tingkat Efisiensi Anggaran BBPOM di Bandung triwulan I tahun 2021 sebesar 75,00. Dengan demikian capaian

kinerja indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **81,52%** dengan kriteria **Cukup**.

B. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAS PENINGKATAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Peningkatan pencapaian kinerja sasaran disebabkan antara lain oleh:

- ☰ Monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dan anggaran yang dilakukan setiap bulan untuk mengetahui progress pelaksanaan kegiatan, mengetahui kendala dan permasalahan yang dihadapi serta untuk merumuskan rencana tindaklanjut pada periode selanjutnya.

Alternative solusi yang telah dilakukan, yaitu:

- ☰ Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan pelaksanaan anggaran setiap rincian output dan sasaran kegiatan secara berkala.
- ☰ Optimalisasi anggaran dari sisa dana kegiatan atau kontrak karena target telah tercapai untuk kegiatan lain, al. Pengadaan Alat Laboratorium, sisa pagu anggaran di realokasi untuk penambahan daya listrik dan pengadaan alat laboratorium penunjang lainnya.
- ☰ Percepatan pelaksanaan kegiatan khususnya pengadaan Barang dan Jasa dan percepatan pertanggungjawaban keuangan.

C. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAU PUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pernyataan kinerja sebagai berikut:

- ☰ Kegiatan Sosialisasi Keuangan yang diselenggarakan pada tanggal 09 Februari 2021 secara daring dan diikuti oleh 75 peserta dari BBPOM di Bandung, Loka POM di Kota Tasikmalaya dan Loka POM di Kabupaten Bogor. Narasumber dari KPPN Bandung II. Tujuan penyelenggaraan ini adalah



meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terkait peraturan-peraturan pengelolaan keuangan yang terkini dan mendapatkan masukan dan saran dalam Peningkatan Nilai EKA dan IKPA.

- ☰ Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja yang dilakukan setiap bulan yang dipimpin oleh Plt. Kepala Balai Besar POM di Bandung yang dihadiri oleh Bidang/Kelompok Substansi yang diselenggarakan secara luring dan daring. Kegiatan bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dan merumuskan rencana tindak lanjut untuk kegiatan bulan berikutnya serta monitoring terhadap progress realisasi anggaran dan mengukur tingkat efisiensi kegiatan dan sasaran kegiatan.

D. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Rekomendasi untuk meningkatkan tingkat efisiensi anggaran BBPOM di Bandung pada periode berikutnya adalah:

- ☰ Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan pelaksanaan anggaran setiap rincian output dan sasaran kegiatan secara berkala.
- ☰ Percepatan pelaksanaan kegiatan khususnya pengadaan Barang dan Jasa percepatan pertanggungjawaban keuangan.
- ☰ Optimalisasi anggaran dari sisa dana kegiatan atau kontrak karena target telah tercapai untuk kegiatan lain.

E. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2021, pagu anggaran Balai Besar POM di Bandung sebesar Rp. 57,089,510,000,- yang terdiri dari 2 program yaitu: (1) Program Pengawasan Obat dan Makanan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 31.191.604.000,-; dan (2) Program Dukungan Manajemen dengan pagu anggaran sebesar Rp. 25.897.906.000,-. Realisasi anggaran pada triwulan I tahun 2021, berdasarkan Omspan sebesar Rp. 5.924.311.156,- (10,38%), namun berdasarkan SAS sebesar Rp. 57.089.510.000,-(11,91%), dengan rincian sebagai berikut:



**TABEL 3.38
REALISASI ANGGARAN BALAI BESAR POM DI BANDUNG
BERDASARKAN OMSPAN TRIWULAN I TAHUN 2021**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG

REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

Bulan : 01 s.d. 03

NO	Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	432753 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	PAGU	20,376,445,000	27,709,065,000	9,004,000,000	0	0	0	0	0	0	57,089,510,000
		REALISASI	3,825,913,767 (18.78%)	2,098,397,389 (7.57%)	(0.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5,924,311,156 (10.38%)
		SISA	16,550,531,233	25,610,667,611	9,004,000,000	0	0	0	0	0	0	51,165,198,844
GRAND TOTAL		PAGU	20,376,445,000	27,709,065,000	9,004,000,000	0	0	0	0	0	0	57,089,510,000
		REALISASI	3,825,913,767 (18.78%)	2,098,397,389 (7.57%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	5,924,311,156 (10.38%)
		SISA	16,550,531,233	25,610,667,611	9,004,000,000	0	0	0	0	0	0	51,165,198,844

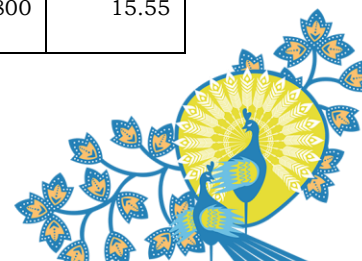
**TABEL 3.39
REALISASI ANGGARAN BALAI BESAR POM DI BANDUNG
BERDASARKAN SAS TRIWULAN I TAHUN 2021**

PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
Program Pengawasan Obat dan Makanan	31.191.604.000,-	1.375.758.825,-	4.41
Program Dukungan Manajemen	25.897.906.000,-	5.423.235.020,-	20.94
TOTAL	57.089.510.000,-	6.798.993.845,-	11.91

Berikut adalah realisasi anggaran berdasarkan sasaran kegiatan dan alokasi anggaran dan realisasinya berdasarkan indikator sasaran kegiatan:

**TABEL 3.40
ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN SASARAN KEGIATAN
TRIWULAN I TAHUN 2021**

NO.	SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN PER SASARAN KEGIATAN		
		PAGU (Rp)	REALISASI TW I (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung	956,574,000	226,012,294	23.63
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	435,060,000	62,134,300	14.28
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	490,545,000	89,856,000	18.32
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung	3,902,692,000	606,673,800	15.55



NO.	SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN PER SASARAN KEGIATAN		
		PAGU (Rp)	REALISASI TW I (Rp)	CAPAIAN (%)
5	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	8,247,159,000	1,400,000	0.02
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1,471,283,000	0	0.00
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1,930,891,000	242,311,000	12.55
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal	551,873,000	110,407,900	20.01
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	22,308,601,000	4,512,091,456	20.23
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	12,286,273,000	151,732,060	1.23
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	4,508,559,000	796,375,035	17.66
	TOTAL	57,089,510,000	6,798,993,845	11.91

Penyerapan anggaran per sasaran kegiatan pada triwulan I tahun 2021 dari yang terbesar secara berurutan adalah sebagai berikut :

- 1) Sasaran Kegiatan Kesatu yaitu: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung dengan pagu sebesar Rp. 956,574,000,- dan realisasi sebesar Rp. 226,012,294,- dengan capaian 23.63%.
- 2) Sasaran Kegiatan Kesembilan yaitu: Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal dengan pagu sebesar Rp. 22,308,601,000,- dan realisasi sebesar Rp. 4,512,091,456,- dengan capaian 20.23%.
- 3) Sasaran Kegiatan Kedelapan yaitu: Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal dengan pagu sebesar Rp. 551,873,000,- dan realisasi sebesar Rp. 110,407,900,- dengan capaian 20.01%.
- 4) Sasaran Kegiatan Ketiga yaitu: Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung dengan pagu sebesar Rp. 490,545,000,- dan realisasi sebesar Rp. 89,856,000,- dengan capaian 18.32%.
- 5) Sasaran Kegiatan Kesebelas yaitu: Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel dengan pagu sebesar Rp. 4,508,559,000,- dan realisasi sebesar Rp. 796,375,035,- dengan capaian 17.66%.
- 6) Sasaran Kegiatan Keempat yaitu: Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung dengan pagu sebesar Rp. 3,902,692,000,- dan realisasi sebesar Rp. 606,673,800,- dengan capaian 15.55%.
- 7) Sasaran Kegiatan Kedua yaitu: Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung



dengan pagu sebesar Rp. 435,060,000,- dan realisasi sebesar Rp. 62,134,300,- dengan capaian 14.28%.

- 8) Sasaran Kegiatan Ketujuh yaitu: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung dengan pagu sebesar Rp. 1,930,891,000,- dan realisasi sebesar Rp. 242,311,000,- dengan capaian 12.55%.
- 9) Sasaran Kegiatan Kesepuluh yaitu: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan dengan pagu sebesar Rp. 12,286,273,000,- dan realisasi sebesar Rp. 151,732,060,- dengan capaian 1.23%. Berdasarkan Plan of Action (PoA) yang telah disusun, realisasi fisik dan anggaran direncanakan pada triwulan II dan III.
- 10) Sasaran Kegiatan Kelima yaitu: Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung dengan pagu sebesar Rp. 8,247,159,000,- dan realisasi sebesar Rp. 1,400,000,- dengan capaian 0.02%. Kegiatan KIE dengan Tokoh Masyarakat sedianya akan dilaksanakan pada triwulan I terkendala adanya perubahan jumlah peserta yang sebelumnya dianggarkan untuk 250 orang menjadi 500 orang sehingga perlu dilakukan revisi anggaran terlebih dahulu. Pelaksanaan Kegiatan KIE dengan Tokoh Masyarakat direncanakan mulai triwulan II hingga triwulan III.
- 11) Sasaran Kegiatan Keenam yaitu: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung dengan pagu sebesar Rp. 1,471,283,000,- dan realisasi sebesar Rp. 0 dengan capaian 0,00%. Pengadaan Reagensia dan Media Mikrobiologi untuk pengujian sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, Suplemen Kesehatan, Makanan dan Pangan Fortifikasi belum dilaksanakan pada triwulan I. Berdasarkan Plan of Action (PoA) yang telah disusun, realisasi fisik dan anggaran direncanakan pada triwulan II dan III, dengan mempertimbangkan ketersediaan stok Reagen dan Media Mikrobiologi, hasil pengadaan tahun sebelumnya.

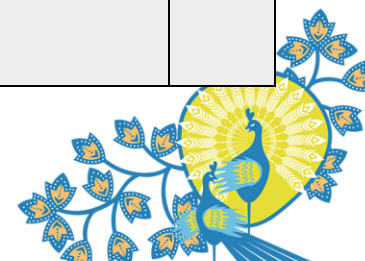
Sedangkan jika dilihat penyerapan anggaran berdasarkan *perspective balance score card* maka secara berturut-turut dari yang tertinggi adalah sebagai berikut:

- 1) *Stakeholders Perspective* dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5,784,871,000,- dan realisasi sebesar Rp. 984,676,394,- dengan capaian 17,02%.
- 2) *Learning and Growth Perspective* dengan pagu anggaran sebesar Rp. 39,655,306,000,- dan realisasi sebesar Rp. 5,570,606,451,- dengan capaian 14,05%.
- 3) *Internal Process Perspective* dengan pagu anggaran sebesar Rp. 11,649,333,000,- dan realisasi sebesar Rp. 243,711,000,- dengan capaian 2,09%.



**TABEL 3.41
REALISASI ANGGARAN PERSASARAN KEGIATAN BERDASARKAN PERSPECTIVE
BALANCE SCORE CARD BALAI BESAR POM DI BANDUNG TRIWULAN I TAHUN 2021**

Perspective	Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan			Perspective		
		Pagu	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE	1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung	956,574,000	226,012,294	23.63	5,784,871,000	984,676,394	17.02
	2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	327,870,000	324,321,258	98.92			
	3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	435,060,000	62,134,300	14.28			
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE	4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung	490,545,000	89,856,000	18.32	11,649,333,000	243,711,000	2.09
	5 Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	3,902,692,000	606,673,800	15.55			
	6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	8,247,159,000	1,400,000	0.02			
	7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1,471,283,000	0	0.00			
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE	8 Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal	1,930,891,000	242,311,000	12.55	39,655,306,000	5,570,606,451	14.05
	9 Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	551,873,000	110,407,900	20.01			
	10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	22,308,601,000	4,512,091,456	20.23			
	11 Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	12,286,273,000	151,732,060	1.23			



Perspective	Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan			Perspective		
		Pagu	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
NILAI PENCAPAIAN ANGGARAN		57,089,510,000	6,798,993,845	11.91	57,089,510,000	6,798,993,845	11.91

Pada triwulan I, RPD yang tercantum dalam Halaman II DIPA Balai Besar POM di Bandung sebesar Rp. 6.072.079.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.924.311.156,- (berdasarkan OMSPAN) dan Rp. 6.798.993.845,- (berdasarkan SAS) maka deviasi sebesar dengan deviasi -11,96 (berdasarkan OMSPAN dan SAS) kategori Baik (Hijau). Secara rinci dijelaskan pada tabel berikut.

**TABEL 3.42
HASIL PERHITUNGAN DEVIASI RPD
TRIWULAN I TAHUN 2021**

BULAN	RPD Halaman III DIPA	REALISASI (SAS)	DEVIASI	KATEGORI	REALISASI (OMSPAN)	Deviasi	KATEGORI
JANUARI	883,572,000	733,619,243	16.97	HATI-HATI	733,619,243	16.97	HATI-HATI
FEBRUARI	2,337,600,000	2,912,486,260	-24.59	BAIK	2,912,486,260	-24.59	BAIK
MARET	6,072,709,000	6,798,993,845	-11.96	BAIK	5,924,311,156	-11.96	BAIK

Berdasarkan Surat Edaran Nomor : HK.02.02.2.21.04.21.11 tentang Target Rencana Penarikan Dana (RPD) Per Triwulan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2021 bahwa target RPD per triwulan, mengacu pada target penyerapan anggaran per triwulan :

- Triwulan I, sebesar minimal 15 persen;
- Triwulan II, sebesar minimal 40 persen;
- Triwulan III, sebesar minimal 60 persen; dan
- Triwulan IV, sebesar minimal 99 persen.

Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran berdasarkan SAS pada triwulan I (11,91%) dibandingkan dengan target RPD pada triwulan I (15%) maka capaian sebesar 79,40%. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi terhadap RPD Halaman III DIPA disesuaikan dengan target sesuai surat edaran tersebut, dengan melakukan revisi PoA yang telah disusun sebelumnya agar dapat mencapai target RPD per triwulan.

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu sasaran kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu sasaran kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut:



$$IE = \frac{\% \text{ CAPAIAN OUTPUT}}{\% \text{ CAPAIAN INPUT}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ RENCANA CAPAIAN OUTPUT}}{\% \text{ RENCANA CAPAIAN INPUT}}$$

$$SE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Efisiensi ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Apabila $IE \geq SE$: kegiatan efisien

Apabila $IE < SE$: kegiatan tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Dalam laporan kinerja ini, pengukuran tingkat efisiensi bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dalam laporan kinerja ini dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara output dan input (berupa dana).



Hasil pengukuran Tingkat Efisiensi Sasaran Kegiatan pada triwulan I tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL 3.43
PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI
BERDASARKAN INDIKATOR SASARAN KEGIATAN
TRIWULAN I TAHUN 2021**

Indikator Sasaran Kegiatan	Volume	Anggaran	IE	TE	KATEGORI
	Capaian (%)	Capaian (%)			
a	b	c	d=b/c	e = d-1	f
1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	116.65	23.46	4.97	3.97	75 %
2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	114.69	24.85	4.62	3.62	75 %
3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	104.66	0.00			
4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	64.01	0.00			
5 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu		14.28	0.00	-1.00	75 %
6 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan		21.06	0.00	-1.00	75 %
7 Indeks Kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan Obat dan Makanan		9.56	0.00	-1.00	75 %
8 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandung		23.44	0.00	-1.00	75 %
9 Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	84.27	0.00			
10 Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75.21	0.00			
11 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	106.35	18.25	5.83	4.83	75 %
12 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	88.45	20.13	4.39	3.39	75 %
13 Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	109.21	21.42	5.10	4.10	75 %
14 Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandung		0.00			
15 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan		0.02	0.00	-1.00	75 %
16 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman		0.00			
17 Jumlah desa pangan aman		0.00			
18 Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya		0.00			
19 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	81.26	0.00			
20 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	96.67	0.00			
21 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	52.18	12.55	4.16	3.16	75 %
22 Indeks RB BBPOM di Bandung		20.93	0.00	-1.00	75 %
23 Nilai AKIP BBPOM di Bandung		10.76	0.00	-1.00	75 %
24 Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung		20.23	0.00	-1.00	75 %
25 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP		0.27	0.00	-1.00	75 %
26 Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal		20.40	0.00	-1.00	75 %
27 Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	153.83	9.62	16.00	15.00	75 %
28 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Bandung	81.52	17.77	4.59	3.59	75 %
Tingkat Efisiensi	94.93	11.91	7.97	6.97	75 %



Pada triwulan I tahun 2021, hasil pengukuran tingkat efisien berdasarkan indikator sasaran kegiatan sebanyak 28 (dua puluh delapan) indikator secara kumulatif masuk kedalam kategori Tidak Efisien (75%). Namun, berdasarkan data pada tabel di atas maka dapat diketahui sebanyak 10 (Sepuluh) indikator yang belum dapat diukur tingkat efisiensinya dan 18 (delapan belas) indikator yang masuk kedalam kategori Tidak Efisien (75%).

Sedangkan hasil pengukuran Tingkat Efisiensi Kegiatan pada triwulan I tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL 3.44
PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI
BERDASARKAN RINCIAN OUTPUT (RO)
TRIWULAN I TAHUN 2021**

No	Kegiatan/Output	Capaian Volume (%)	Capaian Anggaran (%)	IE	SE	TE
a	b	c	d	e=c/d	f	g=e-f
1	3165.ADD.001 - Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	5.00	1.82	2.74	1	1.74
2	3165.AEA.001 - Laporan Kegiatan Dukungan Investigasi dan penyidikan Obat dan Makanan oleh BB/BPOM	20.00	17.44	1.15	1	0.15
3	3165.BAH.001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang diselesaikan oleh BB/BPOM	14.29	19.74	0.72	1	-0.28
4	3165.BDC.001-KIE Obat dan Makanan Aman oleh BB/BPOM	9.00	0.96	9.35	1	8.35
5	3165.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	25.00	5.90	4.24	1	3.24
6	3165.BMB.001-Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh BB/BPOM	3.00	0.00			
7	3165.CAB.001 - Alat Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	10.00	0.00			
8	3065.CAB.002 - Layanan Sarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	3.00	0.00			
9	3165.CAB.003 - Layanan Prasarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	3.00	0.00			
10	3165.QCD.U02 - Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPPOM	18.75	11.42	1.64	1	0.64
11	3165.QDB.001 - Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	3.00	0.00			
12	3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	3.00	0.00			
13	3165.QDB.003 - Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	3.00	0.00			
14	3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang diperiksa oleh BB/BPOM	10.37	7.44	1.39	1	0.39
15	3165.QIA.005 - Sampel Obat, Obat Bahan Alam Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan yang diperiksa sesuai Standar oleh BB/BPOM	8.42	9.64	0.87	1	-0.13
16	3165.QIA.008 - Sampel Pangan Fortifikasi yang diperiksa oleh BB/BPPOM	65.33	20.74	3.15	1	2.15
17	3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang diperiksa oleh BB/BPOM	27.75	19.17	1.45	1	0.45
18	3165.QIC.004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang diperiksa oleh BB/BPOM	29.64	17.62	1.68	1	0.68



No	Kegiatan/Output	Capaian Volume (%)	Capaian Anggaran (%)	IE	SE	TE
a	b	c	d	e=c/d	f	g=e-f
19	6384.EAA.004 - Layanan Perkantoran UPT	25.00	20.94	1.19	1	0.19
	TINGKAT EFISIENSI	15.08	11.91	1.27	1	0.27

Pada triwulan I tahun 2021, BBPOM di Bandung melaksanakan 19 (sembilan belas) Rincian Output (RO), namun hanya 12 (dua belas) RO yang dapat diukur tingkat efisiensinya. Dari data perhitungan tingkat efisiensi, nilai TE tertinggi KIE Obat dan Makanan Aman oleh BB/BPOM adalah (TE=8,35) dan Sampel Pangan Fortifikasi yang diperiksa oleh BB/BPPOM (TE=2,15). Sedangkan nilai TE terendah adalah Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang diselesaikan oleh BB/BPOM (TE=-0,28). Berdasarkan perhitungan Nilai TE keseluruhan, dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan BBPOM di Bandung terlaksana secara efisien (TE=0.27) .

Namun, tingkat efisiensi adalah bersifat relative, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisien kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Ke depan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai.





BAB 4 PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

4.2 SARAN

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Interim Balai Besar POM di Bandung Triwulan I Tahun 2021 mengukur pencapaian kinerja triwulan I tahun 2021 berdasarkan target pada Penetapan Kinerja dan Rencana Aksi Penetapan Kinerja Tahun 2021. Pada tahun 2021 merupakan tahun kedua Renstra Balai Besar POM di Bandung Tahun 2020-2024. Berikut hasil pencapaian sasaran kegiatan pada triwulan I tahun 2021, yaitu:

1. Sasaran kegiatan yang telah ditetapkan pada Penetapan Kinerja dan Rencana Aksi Penetapan Kinerja Tahun 2021 sebanyak 11 (sebelas) sasaran kegiatan. Dari sasaran kegiatan tersebut diukur berdasarkan 28 (dua puluh delapan) indikator sasaran kegiatan, namun pada triwulan I tahun 2021 hanya 14 (empat belas) yang dapat diukur, dengan hasil sebagai berikut: 2 (dua) indikator sasaran kegiatan dengan kriteria **Sangat Baik**, 4 (empat) indikator sasaran kegiatan dengan kriteria **Baik**, 5 (lima) indikator sasaran kegiatan dengan kriteria **Cukup**, 2 (dua) indikator sasaran kegiatan dengan kriteria **Cukup**, dan 1 (satu) indikator sasaran kegiatan dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.
2. Hasil capaian kinerja sasaran kegiatan pada triwulan I tahun 2021 adalah sebagai berikut:

STAKEHOLDERS PERSPECTIVE

- ☪ Capaian kinerja sasaran kegiatan pertama sebesar 100% dengan kriteria Baik, ini menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat.
- ☪ Capaian kinerja sasaran kegiatan kedua belum diukur.
- ☪ Capaian kinerja sasaran kegiatan ketiga belum diukur.

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

- ☪ Capaian kinerja sasaran kegiatan keempat sebesar 92,70% dengan kriteria Baik, ini menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan serta pelayanan publik.
- ☪ Capaian kinerja sasaran kegiatan kelima belum diukur.
- ☪ Capaian kinerja sasaran strategis keenam sebesar 88,96% dengan kriteria Cukup, ini menunjukkan Balai Besar POM di Bandung belum berhasil dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan.



- ☸ Capaian kinerja sasaran kegiatan ketujuh sebesar 52,17% dengan kriteria Kurang, ini menunjukkan Balai Besar POM di Bandung belum berhasil dalam meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan.

LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE

- ☸ Capaian kinerja sasaran kegiatan kedelapan belum diukur.
 - ☸ Capaian kinerja sasaran kegiatan kesembilan belum diukur.
 - ☸ Capaian kinerja sasaran kegiatan kesepuluh belum diukur.
 - ☸ Capaian kinerja sasaran kegiatan kesebelas sebesar 117,68% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan, ini menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung mengelola keuangan secara akuntabel.
3. Pada triwulan I tahun 2021, hasil pengukuran tingkat efisien berdasarkan indikator sasaran kegiatan sebanyak 28 (dua puluh delapan) indikator secara kumulatif masuk kedalam kategori Tidak Efisien (75%). Namun, berdasarkan data pada tabel di atas maka dapat diketahui sebanyak 10 (Sepuluh) indikator yang belum dapat diukur tingkat efisiensinya dan 18 (delapan belas) indikator yang masuk kedalam kategori Tidak Efisien (75%).
 4. Pada triwulan I tahun 2021, BBPOM di Bandung melaksanakan 19 (sembilan belas) Rincian Output (RO), namun hanya 12 (dua belas) RO yang dapat diukur tingkat efisiensinya. Dari data perhitungan tingkat efisiensi, nilai TE tertinggi KIE Obat dan Makanan Aman oleh BB/BPOM adalah ($TE=8,35$) dan Sampel Pangan Fortifikasi yang diperiksa oleh BB/BPPOM ($TE=2,15$). Sedangkan nilai TE terendah adalah Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang diselesaikan oleh BB/BPOM ($TE=-0,28$). Berdasarkan perhitungan Nilai TE keseluruhan, dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan BBPOM di Bandung terlaksana secara efisien ($TE=0.27$) .

4.2 SARAN

Untuk melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan dalam kondisi new normal serta sumber daya yang terbatas maka perlu langkah-langkah strategi yang tepat serta inovasi. Capaian sasaran kegiatan pada triwulan I tahun 2021 merupakan dasar untuk menetapkan strategi dan inovasi pada periode selanjutnya. Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan oleh Balai Besar POM di Bandung, antara lain :

1. Koordinasi dengan lintas sektor sehingga inpres No. 3 tahun 2018 tentang peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan dapat dilaksanakan dengan baik melalui pemantapan jaringan pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Wilayah Provinsi Jawa Barat.



2. Menjalin kerjasama dengan *stake holder* terkait, sehingga instansi yang berkomitmen dalam pengawasan Obat dan Makanan lebih banyak lagi. Selain itu program atau kegiatan yang merupakan tanggungjawab dari pemangku kepentingan didorong agar dilaksanakan secara mandiri sehingga kerjasama/kemitraan berjalan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.
3. Mengupayakan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dengan melakukan berbagai inovasi yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pelayanan prima.
4. Melakukan penyesuaian dalam metode pengawasan pre market, post market dan penyidikan yaitu dengan menggunakan teknologi dan melakukan inovasi berbasis teknologi.
5. Melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan terus menerus serta berkesinambungan.





LAMPIRAN

- 1. RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR POM DI BANDUNG TAHUN 2020-2024**
- 2. RENCANA KINERJA TAHUNAN BALAI BESAR POM DI BANDUNG TAHUN 2021**
- 3. PERJANJIAN KINERJA BALAI BESAR POM DI BANDUNG TAHUN 2021**
- 4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA BALAI BESAR POM DI BANDUNG TAHUN 2021**
- 5. PENGUKURAN KINERJA SASARAN KEGIATAN BALAI BESAR POM DI BANDUNG TRIWULAN I TAHUN 2021**
- 6. TINGKAT EFISIENSI SASARAN KEGIATAN BALAI BESAR POM DI BANDUNG TRIWULAN I TAHUN 2021**
- 7. TINGKAT EFISIENSI RINCIAN OUTPUT BALAI BESAR POM DI BANDUNG TRIWULAN I TAHUN 2021**

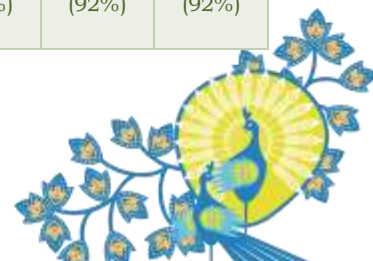
**LAMPIRAN 1
RENCANA STRATEGIS
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TAHUN 2020-2024**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan		Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
STAKEHOLDER PERSPECTIVE							
SK1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	83,6	86,6	90	92,3
	2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	82	84	86
	3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	91	92	93	94
	4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	73	75	76	78
SK2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	5.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	72	75	78	81	83
SK3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	6.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83	85	86	87,5	89
	7.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71	74	77	80	83
	8.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandung	88,5	90,5	91	91,5	92
INTERNAL PERSPECTIVE							
SK4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung	9.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	89	91	93	95
	10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	56,9	63,9	70,9	78	85
	11.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	88	91	94	97
	12.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50	55	60	65	70



**LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2021**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
	13. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76	78	80	81	82
	14. Indeks pelayanan publik BBPOM di Bandung	3,7	3,75	3,81	4,16	4,51
SK5. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	15. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	70	73	77	80	83
	16. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20	42	62	82	104
	17. Jumlah desa pangan aman	9	19	28	37	47
	18. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	4	8	13	18	23
SK6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	19. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82	85	88	91	94
	20. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82	84	86	88	90
SK7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	21. Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	74	78	82	86	90
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE						
SK8. Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal	22. Indeks RB BBPOM di Bandung	91	92	93	94	95
	23. Nilai AKIP BBPOM di Bandung	81	85	90	91	92
SK9. Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	24. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	75	77	80	82	85
SK10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan	25. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	76	79	81	85	90
	26. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	1,51	2	2,26	2,5	3
SK11. Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	27. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	93	94	95	96	97
	28. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Bandung	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)



**LAMPIRAN 2
RENCANA KINERJA TAHUNAN
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TAHUN 2021**



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

Jl. Pasteur No. 25 Bandung 40171

Telp. : 022 4230546, 4213152, 4266620, 4200381, 4200382 Fax. : 022 4230546

Email : bpom_bandung@pom.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

NOMOR. HK.02.02.103.1031.06.20.1060B

TENTANG

**RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TAHUN 2021**

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

- Menimbang** : bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 dan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor HK.02.03.103.05.20.1124A tahun 2020 tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2020-2024, dipandang perlu untuk menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2021.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12





BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

Jl. Pasteur No. 25 Bandung 40171

Telp. : 022 4230546, 4213152, 4266620, 4200381, 4200382 Fax. : 022 4230546

Email : bpom_bandung@pom.go.id

- Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1275);
 9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
 10. Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
 11. Keputusan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor HK.02.03.103.05.20.1124A tahun 2020 tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2020-2024.
 12. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1275);
 13. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
 14. Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
 15. Keputusan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor HK.02.03.103.05.20.1124A tahun 2020 tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG TAHUN 2021.
- KESATU : Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan penyusunan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2021.



**LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2021**



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

Jl. Pasteur No. 25 Bandung 40171

Telp. : 022 4230546, 4213152, 4266620, 4200381, 4200382 Fax. : 022 4230546

Email : bpom_bandung@pom.go.id

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan



Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 01 Juni 2020
Kepala Balai Besar POM di Bandung

Hardaningsih



**LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2021**



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

Jl. Pasteur No. 25 Bandung 40171

Telp. : 022 4230546, 4213152, 4266620, 4200381, 4200382 Fax. : 022 4230546

Email : bpom_bandung@pom.go.id

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI BANDUNG NOMOR.
HK.02.02.1031.06.20.1060B
TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI BANDUNG TAHUN 2021

**RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TAHUN 2021**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	5. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	75
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	6. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	85
		7. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	74
		8. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandung	90,5
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung	9. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
		10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	63,9
		11. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88
		12. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
		13. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78
		14. Indeks pelayanan publik BBPOM di Bandung	3,75



**LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2021**



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

Jl. Pasteur No. 25 Bandung 40171

Telp. : 022 4230546, 4213152, 4266620, 4200381, 4200382 Fax. : 022 4230546

Email : bpom_bandung@pom.go.id

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	15. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	89,18
		16. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	42
		17. Jumlah desa pangan aman	19
		18. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	8
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	19. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85
		20. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	84
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	21. Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	78
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal	22. Indeks RB BBPOM di Bandung	92
		23. Nilai AKIP BBPOM di Bandung	85
9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	24. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	77
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan	25. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	79
		26. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	2
11.	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	27. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	94
		28. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Bandung	Efisien (92%)



**LAMPIRAN 3
PERJANJIAN KINERJA
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TAHUN 2021**



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

Jl. Pasteur No. 25 Bandung 40171

Telp. : 022 4230546, 4213152, 4266620, 4200381, 4200382 Fax. : 022 4230546

Email : bpom_bandung@pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Hardaningsih, Apt, MHSM.
Jabatan : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 22 Desember 2020

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Pihak Pertama

Dra. Hardaningsih, Apt, MHSM.



**LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2021**



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

Jl. Pasteur No. 25 Bandung 40171

Telp. : 022-4230546, 4213152, 4266620, 4200381, 4200382 Fax. : 022-4230546

Email : bpom_bandung@pom.go.id

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	5. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	75
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	6. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	85
		7. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	74
		8. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandung	90,5
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung	9. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
		10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	63,9
		11. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88
		12. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
		13. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78
		14. Indeks pelayanan publik BBPOM di Bandung	3,75
5.	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	15. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	89,18
		16. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	42
		17. Jumlah desa pangan aman	19
		18. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	8



**LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2021**



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

Jl. Pasteur No. 25 Bandung 40171

Telp. : 022-4230546, 4213152, 4266620, 4200381, 4200382 Fax. : 022-4230546

Email : bpom.bandung@pom.go.id

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	19. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85
		20. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	84
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	21. Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	78
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal	22. Indeks RB BBPOM di Bandung	92
		23. Nilai AKIP BBPOM di Bandung	85
9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	24. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	77
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan	25. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	79
		26. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	2
11.	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	27. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	94
		28. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Bandung	Efisien (92%)

Kegiatan :

1. Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia
2. Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Anggaran

Rp. 31.191.604.000,-
Rp. 25.897.906.000,-

Bandung, 22 Desember 2020

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Pihak Pertama

Dra. Hardaningsih, Apt, MHSM.



**LAMPIRAN 4
RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TAHUN 2021**



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

Jl. Pasteur No. 25 Bandung 40171

Telp. : 022 4230546, 4213152, 4266620, 4200381, 4200382 Fax. : 022 4230546

Email : bpom_bandung@pom.go.id

RENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN (Rp)
			B03	B06	B09	B12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	83,6	83,6	83,6	669.700.000,-
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	80	80	80	277.190.000,-
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91	91	91	91	5.801.000,-
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73	73	73	73	3.883.000,-
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	5. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu				75	27.490.000,-
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	6. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan				85	122.650.000,-
		7. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan				74	187.200.000,-
		8. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandung				90,5	124.000.000,-
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung	9. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	89	89	89	146.155.000,-
		10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	63,9	63,9	63,9	63,9	126.405.000,-
		11. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88	88	88	88	744.791.000,-
		12. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	55	55	55	817.601.000,-
		13. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78	78	78	78	1.399.220.000,-
		14. Indeks pelayanan publik BBPOM di Bandung				3,75	636.520.000,-
5.	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	15. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan				89,18	6.600.000.000,-
		16. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman				42	653.170.000,-
		17. Jumlah desa pangan aman				19	1.100.950.000,-



**LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2021**



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

Jl. Pasteur No. 25 Bandung 40171

Telp. : 022 4230546, 4213152, 4266620, 4200381, 4200382 Fax. : 022 4230546

Email : bpom_bandung@pom.go.id

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN (Rp)
			B03	B06	B09	B12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		18. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya				8	328.099.000,-
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	19. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	17,5	37,5	62,5	85	954.600.000,-
		20. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	22,5	42,5	65	84	516.683.000,-
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	21. Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	46	60	68	78	1.930.891.000,-
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal	22. Indeks RB BBPOM di Bandung				92	306.263.000,-
		23. Nilai AKIP BBPOM di Bandung				85	135.390.000,-
9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	24. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung				77	1.146.110.000,-
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan	25. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP				79	11.697.667.000,-
		26. Persentase pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	0,5	1	1,5	2	589.126.000,-
11.	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	27. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	24	48	72	94	18.999.000,-
		28. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Bandung	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	25.819.956.000,-

Bandung, 22 Desember 2020

Pihak Pertama

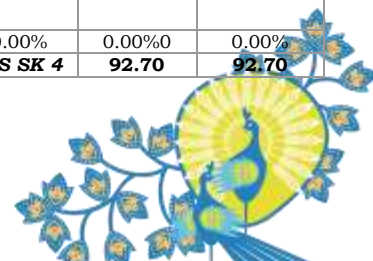
Dra. Hardaningsih, Apt, MHSM.



**LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2021**

**LAMPIRAN 5
PENGUKURAN KINERJA SASARAN KEGIATAN
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2021**

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahun 2021	Target TW I	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW I	Capaian Terhadap Target Tahun 2021
						TW I Tahun 2021				
						Pembilang	Penyebut	Realisasi		
Stakeholder Perspective										
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83.60%	83.60%	157	161	97.52%	116.65%	116.65%
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80.00%	80.00%	89	97	91.75%	114.69%	114.69%
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91.00%	91.00%	60	63	95.24%	104.66%	104.66%
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73.00%	73.00%	50	107	46.73%	64.01%	64.01%
NPS SK 1								100.00	100.00	
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	5	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	75.00	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
NPS SK 2								0	0	
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	85.00		-	-	0.00%	0.00%	0.00%
		7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	74.00		-	-	0.00%	0.00%	0.00%
		8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90.50		-	-	0.00%	0.00%	0.00%
NPS SK 3								0	0	
Capaian Perspective stakeholder								33	33	
Internal Process Perspective										
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	9	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89.00%	89.00%	130.00	131.00	75.00%	84.27%	84.27%
		10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	63.90%	63.90%	115.00	249.00	48.06%	75.21%	75.21%
		11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88,0%	88.00%	759	811	93.59%	106.35%	106.35%
		12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55.00%	55.00%	54	111	48.65%	88.45%	88.45%
		13	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78.00%	78.00%	385	452	85.18%	109.21%	109.21%
		14	Indeks Pelayanan Publik	3.75	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
NPS SK 4								92.70	92.70	



**LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2021**

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahun 2021	Target TW I	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW I	Capaian Terhadap Target Tahun 2021
						TW I Tahun 2021				
						Pembilang	Penyebut	Realisasi		
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	15	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	89.18	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
16		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	42.00	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	
17		Jumlah desa pangan aman	19.00	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	
18		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	8.00	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	
		NPS SK 5							0	0
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	19	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85.00%	17.50%	-	-	14.22%	81.26%	16.73%
		20	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	84.00%	22.50%	-	-	21.75%	96.67%	25.89%
		NPS SK 6							88.96	21.31
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	21	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	78.00%	46.00%	-	-	24.00%	52.17%	30.77%
		NPS SK 7							52.17	30.77
Capaian Internal Process Perspective									58	38
Learning & Growth Perspective										
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	22	Indeks RB UPT	92.00		-	-	0.00%	0.00%	0.00%
		23	Nilai AKIP UPT	85.00		-	-	0.00%	0.00%	0.00%
		NPS SK 8							0	0
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	24	Indeks Profesionalitas ASN UPT	77.00		-	-	0.00%	0.00%	0.00%
		NPS SK 9							0	0
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	25	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	79.00%	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
		26	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.00	0.50	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
		NPS SK 10							0	0
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	27	Nilai Kinerja Anggaran UPT	94.00	24.00	-	-	36.92	153.83%	39.28%
		28	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	92.00	92.00	-	-	75,00	81,52%	81,52%
		NPS SK 11							117.68	60.40
Capaian Learning & Growth Perspective									29	15
NPS TOTAL									40	29



**LAMPIRAN 6
TINGKAT EFISIENSI SASARAN KEGIATAN
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2021**

No	Indikator	Output TW I			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83.6	97.52	116.65	669,700,000	157,131,212	23.46	4.97	3.97	75 %
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	91.75	114.69	277,190,000	68,881,082	24.85	4.62	3.62	75 %
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91	95.24	104.66	5,801,000	0	0.00			
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73	46.73	64.01	3,883,000	0	0.00			
5	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT				435,060,000	62,134,300	14.28	0.00	-1.00	75 %
6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan				150,140,000	31,620,000	21.06	0.00	-1.00	75 %
7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan				155,200,000	14,830,000	9.56	0.00	-1.00	75 %
8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM				185,205,000	43,406,000	23.44	0.00	-1.00	75 %
9	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	75.00	84.27	139,155,000	0	0.00			
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	63.9	48.06	75.21	133,405,000	0	0.00			
11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88	93.59	106.35	744,791,000	135,950,000	18.25	5.83	4.83	75 %
12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	48.65	88.45	849,601,000	171,008,800	20.13	4.39	3.39	75 %
13	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78	85.18	109.21	1,399,220,000	299,715,000	21.42	5.10	4.10	75 %
14	Indeks Pelayanan Publik				636,520,000	0	0.00			
15	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan				6,164,940,000	1,400,000	0.02	0.00	-1.00	75 %
16	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman				653,170,000	0	0.00			
17	Jumlah desa pangan aman				1,100,950,000	0	0.00			
18	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya				328,099,000	0	0.00			



**LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2021**

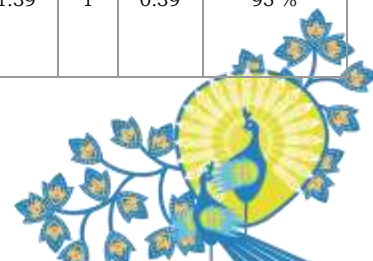
No	Indikator	Output TW I			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
19	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	17.5	14.22	81.26	954,600,000	0	0.00			
20	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	22.5	21.75	96.67	516,683,000	0	0.00			
21	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	46	24	52.18	1,930,891,000	242,311,000	12.55	4.16	3.16	75 %
22	Indeks RB UPT				501,673,000	105,007,900	20.93	0.00	-1.00	75 %
23	Nilai AKIP UPT				50,200,000	5,400,000	10.76	0.00	-1.00	75 %
24	Indeks Profesionalitas ASN UPT				22,308,601,000	4,512,091,456	20.23	0.00	-1.00	75 %
25	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP				11,697,667,000	31,663,015	0.27	0.00	-1.00	75 %
26	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	0.5			588,606,000	120,069,045	20.40	0.00	-1.00	75 %
27	Nilai Kinerja Anggaran UPT	24	36.92	153.83	56,149,000	5,400,000	9.62	16.00	15.00	75 %
28	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	Efisiensi (92%)	75	81.52	4,452,410,000	790,975,035	17.77	4.59	3.59	75 %
TOTAL				94.93	57,089,510,000	6,798,993,845	11.91	7.97	6.97	75 %



**LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2021**

**LAMPIRAN 7
TINGKAT EFISIENSI RINCIAN OUTPUT
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2021**

No	Rincian Output	Volume			Anggaran			IE	SE	TE	KATEGORI
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)				
a	b	c	d	e=(d/cx100)	f	g	h=(g/fx100)	i=e/h	j	k	l
1	3165.ADD.001 - Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	Progress 5%	5.00	2,907,667,000	52,963,015	1.82	2.74	1	1.74	78 %
2	3165.AEA.001 - Laporan Kegiatan Dukungan Investigasi dan penyidikan Obat dan Makanan oleh BB/BPOM	3	Progress 20%	20.00	361,995,000	63,130,000	17.44	1.15	1	0.15	100 %
3	3165.BAH.001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang diselesaikan oleh BB/BPOM	7	1	14.29	740,931,000	146,270,000	19.74	0.72	1	-0.28	75 %
4	3165.BDC.001-KIE Obat dan Makanan Aman oleh BB/BPOM	10,900	Progress 9%	9.00	6,600,000,000	63,534,300	0.96	9.35	1	8.35	75 %
5	3165.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	1	Progress 25%	25.00	2,697,458,000	159,114,416	5.90	4.24	1	3.24	75 %
6	3165.BMB.001-Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh BB/BPOM	26	Progress 3%	3.00	124,000,000	0	0.00		1		
7	3165.CAB.001 - Alat Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	2	Progress 10%	10.00	7,074,000,000	0	0.00		1		
8	3065.CAB.002 - Layanan Sarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	1	Progress 3%	3.00	60,000,000	0	0.00		1		
9	3165.CAB.003 - Layanan Prasarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	Progress 3%	3.00	1,870,000,000	0	0.00		1		
10	3165.QCD.U02 - Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPPOM	16	3	18.75	1,568,896,000	179,181,000	11.42	1.64	1	0.64	90 %
11	3165.QDB.001 - Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	42	Progress 3%	3.00	653,170,000	0	0.00		1		
12	3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	19	Progress 3%	3.00	1,100,950,000	0	0.00		1		
13	3165.QDB.003 - Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	8	Progress 3%	3.00	328,099,000	0	0.00		1		
14	3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang diperiksa oleh BB/BPOM	1,003	104	10.37	725,873,000	53,970,582	7.44	1.39	1	0.39	95 %



**LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2021**

No	Rincian Output	Volume			Anggaran			IE	SE	TE	KATEGORI
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)				
a	b	c	d	$e=(d/c \times 100)$	f	g	$h=(g/f \times 100)$	$i=e/h$	j	k	l
15	3165.QIA.005 - Sampel Obat, Obat Bahan Alam Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan yang diperiksa sesuai Standar oleh BB/BPOM	2,659	224	8.42	1,630,101,000	157,131,212	9.64	0.87	1	-0.13	75 %
16	3165.QIA.008 - Sampel Pangan Fortifikasi yang diperiksa oleh BB/BPOM	150	98	65.33	71,883,000	14,910,500	20.74	3.15	1	2.15	75 %
17	3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang diperiksa oleh BB/BPOM	400	111	27.75	900,001,000	172,568,800	19.17	1.45	1	0.45	92 %
18	3165.QIC.004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang diperiksa oleh BB/BPOM	1,525	452	29.64	1,776,580,000	312,985,000	17.62	1.68	1	0.68	90 %
19	6384.EAA.004 - Layanan Perkantoran UPT	1	Progress 25%	25.00	25,897,906,000	5,423,235,020	20.94	1.19	1	0.19	100 %





 bandung.pom.go.id

 BPOMBandung

 @bpombandung

 @BPOMBandung

 BalaiBesarPOMdiBandung

